KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Badan Pusat Statistik

PDB

PRODUK DOMESTIK BRUTO

SATELIT KEHUTANAN 2015-2020

KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Badan Pusat Statistik

PDB SATELIT KEHUTANAN 2015-2020

PRODUK DOMESTIK BRUTO

Pengarah:
Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS).

Ketua
Dr. Mahfudz, MP.,
Ir. Dody Herlando, M.Econ.,
Purwadi Soeprihanto, S.Hut., ME.

Penyusun/Penyunting Naskah
Dr. Mahfudz, MP.
Prof. Dodik R. Nurrochmat
Purwadi Soeprihanto, S.Hut., ME.
Nugraha Akbar.

Sekretariat
M. Taufiqur Rahman, SHut., MSi.; Suryadiningrat, SE., MM.; Dedy Lukmansjah, S.Si.; Deden Achmad Sunarjo, S.Si., MM.; Widdia Angraini, S.Si., MT.; Ari Sugih Mulia, SE, MSE, MA.; Trileni Ratna Aprita.

Tim Kerja/Kontributor
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) : Ir. Triyono Saputro, MSi.; Adhi Suprihadhi, SHut., MSc.; Dr. Ir. Iwan Setiawan, MSc.; Bambang Pancatriono, SKom.; Tri Adiriono, SHut. MSc; Iskandar, SHut; Yulfikar Tahir Zain, SHut.; Siswati, S.Hut.; Juarno; Alfian Chaniago, S.Kom.
Badan Pusat Statistik (BPS) : Agung Sampurno, SST.; Fauzul Hidayah, SST.; Pipit Ronalia, SST.; Noviana Indriastuti, SAP.; Wisnu Pratiko, SST.; Suryani, SST.; Luthfi Fajar Arifah, S.Tr.Stat.; Ihsan Maulid Rahmawan, S.Tr.Stat.; Windi Agustin Maulina, SST, MSE; Hanaa Prisityowati, SST; Nina Suri Sulistini, MT; Endah Riawati, SST, MM; Nasiyatul Ulfa, SST, MSi; Diana Bhakti, SST, SE, MSi; Riyuniawan Subekti, SST; Suci Wulandari, SST; Erma Novriawati, SST; Rizky Zulkarnain SST, MSi; Nur Indah Kristiani, S.Si., MSE; Akhmad Mun'im, SST, MA; Mella Anisa, SST; Sagap Aliktipo, SE. M.Si; Mudjiono, S.Si. ME.; Wisnu Winardi SST, ME.
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) : Dr. David.; Dr. Soewarso.; Dr. Endro Siswoko.; Kusnan Rahim.

Gambar Kulit/Penyunting Tata Letak:
Rifky Fadzri.

Diterbitkan dan Dicetak oleh:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

"Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan"

Diterbitkan oleh

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Bekerjasama dengan

Badan Pusat Statistik

DAFTAR ISI

Daftar Isi 5

Daftar Tabel 7

Daftar Gambar 8

Kata Pengantar 9

BAB 1 10
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang : Urgensi Penghitungan PDB Satelit Kehutanan
1.2. Penghitungan PDB Sektor Kehutanan
1.3. Kelemahan Konsep PDB Konvensional dan Urgensi Penerapan PDB Satelit
1.4. Maksud dan Tujuan
1.5. Konsep dan Definisi
1.6. Ruang Lingkup dan Cakupan

BAB 2 30
SUMBER DATA DAN METODOLOGI
2.1. Sumber Data
2.2. Metodologi
2.2.1. Penghitungan Nilai Tambah Bruto Subsektor Kehutanan
2.2.2. Penghitungan Nilai Tambah Bruto Industri Berbasis Kehutanan
2.2.3. Penghitungan Nilai Tambah Bruto Perdagangan Produk Kehutanan

BAB 3 42
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
3.1. Perkembangan PDB Kehutanan dan PDB Satelit Kehutanan Tahun 2015-2000
3.2. Evaluasi Fluktuasi PDB Kehutanan dan PDB Satelit Kehutanan
3.2.1. Fluktuasi PDB Kehutanan
3.2.2. Fluktuasi PDB Industri Berbasis Kehutanan : Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya
3.2.3. Fluktuasi Industri Kertas dan Barang dari Kertas
3.2.4. Fluktuasi PDB Industri Furnitur

BAB 4 58
ANALISIS POTENSI HHBK DAN JASA LINGKUNGAN

BAB 5 68
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN
5.1. Kesimpulan
5.2. Rekomendasi Kebijakan

DAFTAR PUSTAKA 72

LAMPIRAN-LAMPIRAN 74
Lampiran 1 Deskripsi 5 Digit KBLI Industri Berbasis Kehutanan
Lampiran 2 Perkembangan
Lampiran 3 Surat Keputusan Sekretaris Jenderal tentang

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	PDB Satelit Kehutanan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020 (Miliar Rupiah)	43
Tabel 3.2.	Kontribusi PDB Satelit Kehutanan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2020 Terhadap PDB Indonesia (Persen)	44
Tabel 3.3.	PDB Satelit Kehutanan Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2015-2020 (Miliar Rupiah)	50
Tabel 3.4.	Laju Pertumbuhan PDB Satelit Kehutanan Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2015-2020 (Miliar Rupiah)	51
Tabel 3.5.	Fenomena PDB Lapangan Usaha Kehutanan 2016-2020	52
Tabel 3.6.	Fenomena PDB Lapangan Usaha Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya Tahun 2016-2020	53
Tabel 3.7.	Fenomena PDB Lapangan Usaha Industri Kertas dan Barang dari Kertas Tahun 2016-2020	54
Tabel 3.8.	Fenomena PDB Lapangan Usaha Industri Furnitur Tahun 2016-2020	55
Tabel 4.1.	Matriks Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan (JLH)	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Proses Transformasi PDB Kehutanan menjadi PDB Satelit Kehutanan	16
Gambar 1.2.	Tujuan dan Manfaat PDB Satelit	17
Gambar 1.3.	Dasar Klasifikasi PDB Satelit Kehutanan	22
Gambar 1.4.	Batasan PDB Satelit Kehutanan	27
Gambar 1.5.	Cakupan PDB Satelit Kehutanan	27
Gambar 2.1.	Tahapan dan Jadwal Penyusunan Kajian	32
Gambar 2.2.	Keseuaian PDB Kehutanan dengan PDB Nasional	33
Gambar 2.3.	Alur Kerja Penyusunan PDB Subsektor Kehutanan	34
Gambar 2.4.	Diagram Logika Framework PDB Industri Berbasis Kehutanan	38
Gambar 2.5.	Konkordansi PDB 17 Industri ke dalam PDB Satelit Kehutanan	40
Gambar 3.1.	Grafik Distribusi PDB Satelit Kehutanan 2015-2020 Atas Dasar Harga Berlaku (Persen)	45
Gambar 3.2.	Grafik Perbandingan Kontribusi PDB Satelit Kehutanan Tahun 2015 dan 2020 Atas Dasar Harga Berlaku (Persen)	47
Gambar 3.3.	Kontrubusi Subsektor Kehutanan dan Logging di 34 Provinsi Terhadap PDB Kehutanan Nasional Tahun 2019 (Persen)	48
Gambar 3.4.	Kontribusi Subsektor Kehutanan dan Logging di 34 Provinsi Terhadap PDB Kehutanan Nasional Tahun 2020 (Persen)	49
Gambar 3.5.	Grafik Laju Pertumbuhan PDB Satelit Kehutanan 2016-2020 Berdasarkan Harga Konstan (Miliar Rupiah)	51
Gambar 4.1.	Neraca Ekonomi Sumber Daya Hutan	60

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan tuntunannya sehingga penyusunan Buku Penghitungan ***Product Domestic Bruto Satellite Account*** Subkategori Kehutanan ***Tahun 2015-2020*** (PDB Satelit Kehutanan) dapat diselesaikan.

Penghitungan PDB Satelit Kehutanan ini dimaksudkan untuk melengkapi penghitungan kontribusi Subsektor Kehutanan dalam PDB, sehingga diperoleh penilaian yang lebih proporsional dalam penghitungan PDB Subsektor Kehutanan dari hulu sampai hilir beserta pendistribusiannya. Tujuan yang ingin dicapai adalah tersedianya hasil analisis untuk menghitung kontribusi Subsektor Kehutanan terhadap PDB Indonesia berdasarkan kegiatan kehutanan dari hulu sampai hilir dan sebarannya dalam bentuk PDB Satelit Kehutanan.

Semoga publikasi ini dapat bermanfaat untuk mendukung kebijakan pemulihan ekonomi Indonesia khususnya Subsektor kehutanan di tengah pandemi COVID-19.

Kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam proses penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih.

Jakarta, Desember 2021
Kepala Pusat Data dan Informasi

Dr. Mahfudz, MP.
NIP 19670829 198203 1 004

BAB 1
Pendahuluan

1.1. Latar Belakang: Urgensi Penghitungan PDB Satelit Kehutanan

Neraca pendapatan nasional (*national income accounting*) merupakan salah satu inovasi penting dalam pengukuran indikator pembangunan pada abad ke 20. Dampak sosial dan politiknya sangat luas. Neraca pendapatan nasional menunjukkan tinggi rendahnya tingkat pendapatan nasional suatu negara, serta sumbangan masing-masing sektor kegiatan ekonomi terhadap besarnya tingkat pendapatan nasional yang bersangkutan.

Dalam sistem neraca pendapatan nasional dikenal beberapa istilah penting, diantaranya: Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik Neto (PDN), Produk Nasional Bruto (PNB), Produk Nasional Neto (PNN), Pendapatan Domestik dan Pendapatan Nasional. Konsep dasar yang sudah lama dianut adalah jika elemen penyusutan (*depresiasi*) modal buatan manusia (*man-made capital atau produced capital*) dikurangkan dari nilai PDB, maka diperoleh nilai Produk Domestik Neto (PDN). Selanjutnya jika PDN ini dikurangi lagi dengan nilai pajak tidak langsung (*indirect taxes*), didapatkan nilai Pendapatan Nasional.

Dalam bagian ini, kajian lebih difokuskan pada konsep dan pendekatan penghitungan nilai PDB. Salah satu tolok ukur terpenting dalam mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah dengan melihat Produk Domestik Bruto (PDB). PDB merupakan catatan tentang jumlah nilai rupiah dari barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam suatu negara untuk waktu satu tahun. Ada tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk menghitung PDB suatu negara, yaitu:

1. Pendekatan pendapatan
2. Pendekatan pengeluaran
3. Pendekatan nilai tambah

Di Indonesia, penghitungan nilai PDB yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah PDB dengan pendekatan nilai tambah. Menurut BPS (2005) nilai PDB suatu negara tersebut sebenarnya sama dengan nilai tambah yang diciptakan oleh semua sektor kegiatan ekonomi (lapangan usaha) di negara tersebut.

Untuk mempermudah penghitungan nilai tambah, BPS membagi sektor perekonomian di Indonesia menjadi sembilan sektor usaha, yaitu:

1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan
2) Pertambangan dan penggalian
3) Perindustrian Pengolahan
4) Listrik, Gas, dan Air Bersih
5) Bangunan (konstruksi)
6) Perdagangan, Hotel dan Restoran
7) Angkutan dan Komunikasi
8) Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan
9) Jasa-jasa

Dalam penghitungan PDB yang dilakukan oleh BPS, kehutanan termasuk salah satu sub-sektor perekonomian di dalam sektor pertanian. Penghitungan nilai PDB dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan diantaranya:

- Untuk keperluan analisis ekonomi serta perencanaan pembangunan nasional, PDB ditampilkan menurut struktur kegiatan ekonomi atau lapangan usaha.
- Dipergunakan sebagai salah satu tolok ukur atau instrumen untuk menilai keberhasilan pembangunan nasional.
- Dengan mengetahui struktur perekonomian nasional maupun laju pertumbuhan masing-masing sektor terhadap PDB, maka hasil-hasil pembangunan dapat diketahui dan rencana pembangunan nasional selanjutnya dapat disusun secara lebih rinci. Hal ini ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004 – 2009.

Selain beberapa manfaat di atas, salah satu penggunaan PDB yang sering dipergunakan secara internasional adalah pembedaan kategori negara maju dan negara berkembang atau terbelakang dengan melihat tinggi rendahnya tingkat pendapatan nasional per kapita di negara-negara tersebut. Apabila angka-angka pendapatan nasional per kapita ditampilkan untuk negara tertentu, maka laju pertumbuhan pendapatan nasional itu digunakan sebagai tolok ukur kemajuan suatu negara dan kecepatan transformasinya dari negara agraris kenegara industri dan negara jasa (Suparmoko dan Nurrochmat, 2005).

1.2. Penghitungan PDB Sektor Kehutanan

Sebagai bagian dari kegiatan sektor perekonomian nasional, kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB nasional juga dihitung dengan menggunakan pendekatan nilai tambah. Nilai tambah yang diciptakan sektor kehutanan merupakan perbedaan nilai suatu barang/ jasa yang timbul sebagai akibat suatu kegiatan produksi dan/atau distribusi hasil hutan. Produksi sektor kehutanan dapat bersifat ekstraktif berupa kayu hutan, rotan, daun, buah dan lain-lain; dan dapat pula berupa produk non-ekstraktif seperti rekreasi dan wisata hutan lainnya. Kedua jenis produk itu walaupun berbeda sifatnya namun memiliki ciri yang sama dalam hal produknya dapat dipasarkan. Jenis produk hutan yang lain adalah jasa lingkungan yang diberikan oleh hutan yang berupa kemampuan menahan air, menahan banjir, menahan erosi, sebagai tempat hidup keanekaragaman hayati, maupun sebagai penyerap karbon (*carbon sink*); yang semuanya itu tidak ada transaksi pasar dalam penggunaan atas produk jasa lingkungan tersebut. Karena belum ada transaksi pasarnya, maka dalam penghitungan PDB yang berlaku di Indonesia pada saat ini, jasa lingkungan tidak dimasukkan ke dalam penghitungan PDB. Salah satu alasan yang sering dikemukakan, mengapa jasa lingkungan tak ada transaksi pasarnya, adalah karena jasa-jasa lingkungan tersebut merupakan barang publik dan memiliki eksternalitas dimana semua pihak yang memanfaatkan jasa lingkungan tersebut tidak harus melakukan pembayaran kepada pengelola hutan. Membayar atau tidak membayar, semua pihak yang menggunakan jasa lingkungan sebagai produk sektor kehutanan tetap dimungkinkan. Mengapa demikian? Karena memang belum ada mekanisme yang mengatur pembayaran terhadap jasa lingkungan yang bersifat sebagai barang publik. Ciri barang publik ialah tidak diberlakukannya "*exclusion principle*" dan "*rivalry in consumption*" (Suparmoko dan Nurrochmat, 2005).

Selanjutnya Suparmoko dan Nurrochmat (2005) menyatakan bahwa seperti halnya dengan kasus barang publik lainnya dimana swasta sulit dimintai pembayaran untuk penggunaan atau pengkonsumsian atas barang publik tersebut, maka pemerintah (seharusnya) menggunakan sistem pemungutan pajak atau kompensasi jasa lingkungan. Pajak memang merupakan suatu pungutan yang dipaksakan yang balas jasanya sulit ditunjuk secara langsung

dan tegas. Dalam mendistribusikan beban pajak harus digunakan suatu *proxy* terhadap penggunaan jasa lingkungan yang dihasilkan sektor kehutanan. Semua sektor kegiatan di luar sektor kehutanan tentu menggunakan air, memanfaatkan kesegaran udara yang bebas dari pencemaran emisi karbon, menikmati perlindungan dari banjir dan erosi, serta terhindarinya sedimentasi.

Dalam hal barang privat, mengapa si pengguna atau konsumen dapat dikenai kewajiban membayar? Hal ini disebabkan oleh adanya kepastian mengenai jumlah atau volume barang yang digunakan. Contohnya seperti m3 kayu, ton batu bara, barel minyak, dan sebagainya. Dalam hal ini pemakai atau konsumen dapat dikenai pembayaran per unit produk yang digunakan. Demikian pula dalam jasa yang penggunaannya jelas bersifat privat seperti pelayanan dokter, pelayanan salon, penggunaan taman rekreasi, harga dapat ditentukan per unit penggunaan.

Bagaimana dengan penggunaan jasa hutan untuk pencegahan banjir, penyerapan karbon, penyediaan air, perlindungan dari erosi dan pelindungan dari sedimentasi? Untuk dapat diketahui berapa manfaatnya dan berapa penggunaan jasa jenis pelayanan tersebut, haruslah ditemukan sebuah metode pendekatan sebagai proksi untuk dapat melakukan penghitungan. Namun demikian akan sangat sulit untuk menghitung nilai tambah yang diciptakannya, karena semua jasa lingkungan tersebut merupakan sebagian masukan dalam proses produksi yang sifatnya sulit dikuantifikasi dalam setiap unit produk yang dihasilkan oleh sektor industri, sektor pertanian, maupun sektor perdagangan dan restoran, dan sektor-sektor lainnya (Suparmoko dan Nurrochmat, 2005). Karena sampai dengan saat ini penghitungan nilai tambah dari jasa lingkungan hutan masih sulit direalisasikan, maka kontribusi sektor kehutanan dalam PDB hanya memperhitungkan manfaat *tangible* hutan, terutama kayu dan industri primer produk perkayuan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika peran sub sektor kehutanan terhadap PDB terkesan sangat rendah.

1.3. Kelemahan Konsep PDB Konvensional dan Urgensi Penerapan PDB Satelit

Penghitungan PDB yang dilakukan hingga saat ini (PDB Konvensional) sebenarnya baru menghitung nilai total barang dan jasa akhir (*final product*) yang dihasilkan selama satu tahun dan dinyatakan dalam nilai rupiah. Nilai PDB (Konvensional) tersebut seolah-olah memberikan gambaran tentang struktur perekonomian dan pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh suatu daerah, baik secara total maupun secara sektoral, sehingga dianggap mencerminkan kondisi perekonomian daerah yang bersangkutan. Namun demikian, sesungguhnya anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar karena nilai sumberdaya alam yang hilang (*dieksploitasi*) dan kerusakan (*degradasi*) lingkungan belum diperhitungkan sebagai nilai kehilangan dan kerusakan yang seharusnya dibayar, sehingga nilai-nilai yang tercantum dalam PDB yang konvensional itu belum menunjukkan nilai kesejahteraan masyarakat yang sesungguhnya.

Dalam kaitannya dengan penggunaan sumberdaya alam, pendekatan yang digunakan dalam menghitung PDB Konvensional biasanya adalah pendekatan nilai tambah atau pendekatan produksi. Berdasarkan konsep penghitungan PDB Konvensional pengambilan sumberdaya alam justru dinyatakan sebagai penciptaan nilai tambah dan belum diperhitungkan sebagai modal alam yang hilang yang juga harus dinilai penyusutannya seperti halnya dengan penyusutan modal buatan manusia (gedung, mesin dan sebagainya).

Skema berikut ini menjelaskan urgensi penerapan satelit di sektor kehutanan dan proses transformasi dari PDB kehutanan menjadi PDB satelit kehutanan melalui dukungan instrumen

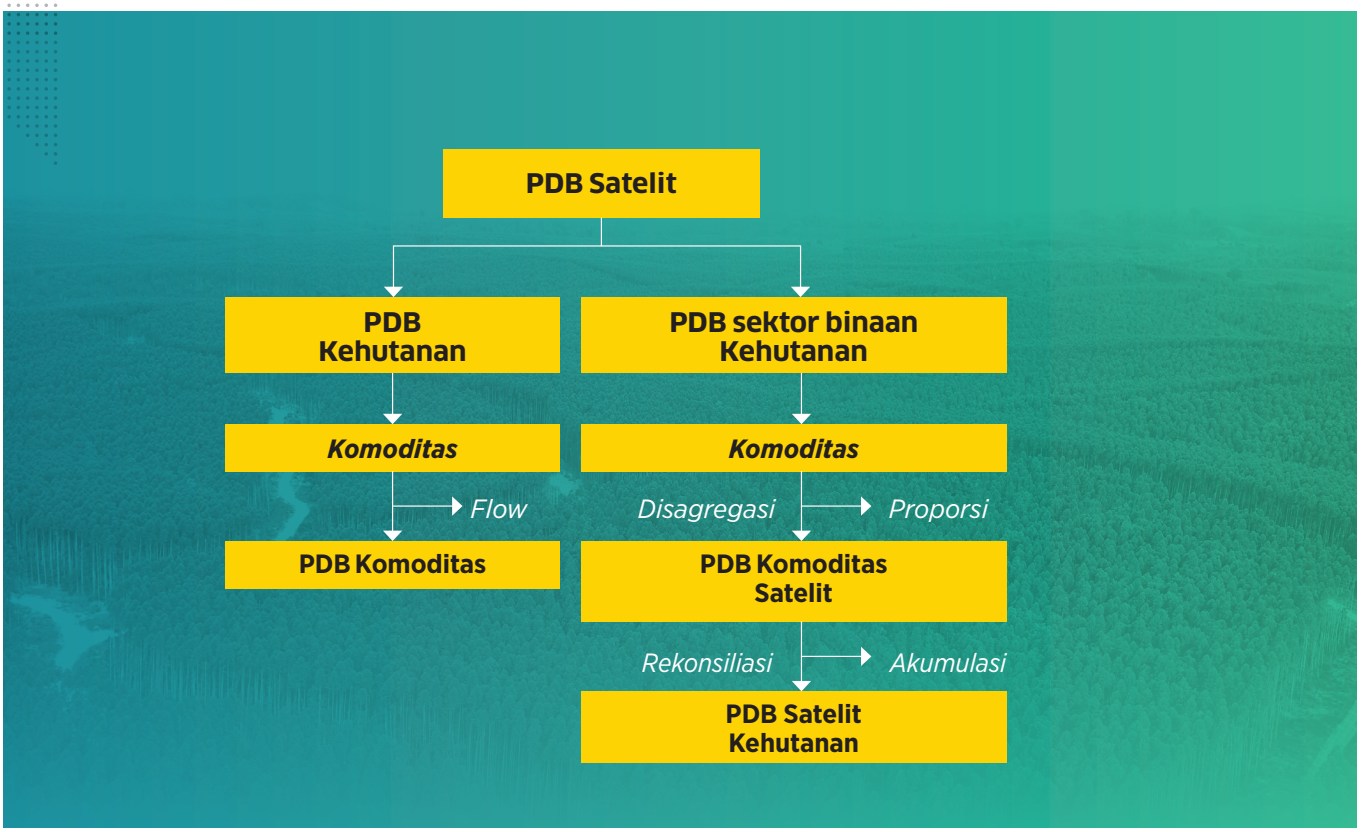

Gambar 1.1. Proses Transformasi PDB Kehutanan menjadi PDB Satelit Kehutanan.

regulasi.

Pada akhir tahun 1960-an, pembangunan subsektor kehutanan dilakukan secara besar-besaran dan komersial melalui eksploitasi sumberdaya hutan demi menunjang aktivitas perekonomian nasional. Hal tersebut dilakukan karena pada saat itu, kondisi keuangan Indonesia sedang mengalami kesulitan, sedangkan pembangunan ekonomi nasional perlu segera dilaksanakan. Sumber daya hutan pada akhirnya menjadi sumber pendanaan pilihan negara selain minyak dan gas. Hal ini dilatarbelakangi oleh melimpahnya sumber daya hutan yang dimiliki Indonesia dengan hutan tropis terluas ketiga di dunia setelah Brazil dan Republik Demokrasi Kongo.

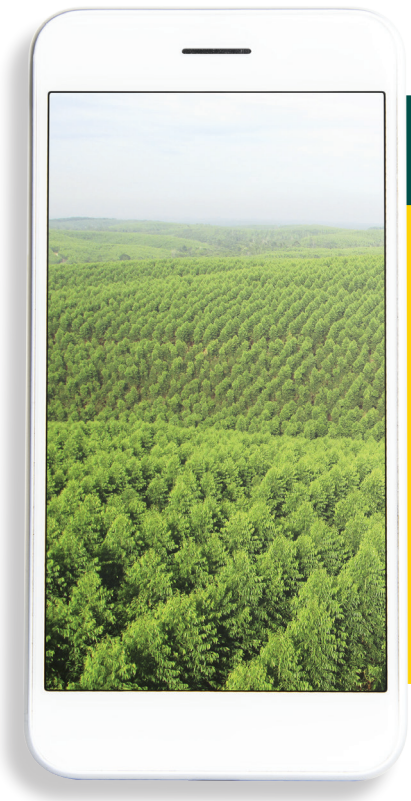

PDB SATELIT

Tujuan dan Manfaat

- Memberikan informasi tentang kinerja lapangan usaha kehutanan dan lapangan usaha berbasis kehutanan.
- Tersedianya informasi untuk analisis penghitungan kontribusi lapangan usaha kehutanan dan lapangan usaha berbasis kehutanan dalam perekonomian.

Gambar 1.2. Tujuan dan Manfaat PDB satelit

Perkembangan kegiatan pemanfaatan hutan dimulai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 tentang Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 1967. Dasar pemikiran undang-undang tersebut adalah untuk menarik investasi di sektor kehutanan, karena memiliki sumber daya hutan yang melimpah, tetapi Indonesia tidak memiliki cukup modal untuk mengelolanya. Sumber daya hutan ini.

Ekspor hasil hutan Indonesia pada awalnya terus meningkat dari kayu bulat hanya menjadi kayu olahan. Ekspor kayu olahan adalah kayu gergajian, kayu lapis dan produk kayu lainnya. Perkembangan ini secara tidak langsung menambah nilai bahan baku kayu Indonesia dan mendorong lebih banyak investasi di bidang kehutanan.

Kehutanan berada di bawah komando Departemen Kehutanan. Pengertian kehutanan sendiri adalah pemanfaatan

langsung atau tidak langsung hasil hutan kayu dan bukan kayu atau kegiatan usaha. Pemanfaatan langsung hasil hutan ditunjukkan dengan pemanfaatan hasil hutan yang disesuaikan dengan kebutuhan rumah tangga penghuni dan rumah tangga pengelola. Sementara itu, eksploitasi tidak langsung terjadi dalam bentuk toko, yang dapat mengubah bentuk hasil hutan menjadi produk tertentu.

Secara makro ekonomi, peran subsektor kehutanan biasanya ditunjukkan dengan besarnya nilai tambah (NTB) subsektor tersebut terhadap produk domestik bruto (PDB). Dalam angka PDB Indonesia yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), subsektor kehutanan hanya memuat bahan-bahan primer kehutanan seperti batang pohon, rotan dan jasa kehutanan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, cakupan binaan oleh Kementerian Kehutanan (sekarang KLHK) meliputi hasil produk primer kehutanan sampai industri kehutanan seperti industri penggergajian kayu, industri kayu lapis, panel kayu, dan veneer. Selain itu, dengan diterbitkannya Permenhut No. P55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal Dari Hutan Negara, dan diterbitkannya Permenhut P.35/ Menhut-II/2008 jo P.9/Menhut-II/2009 tentang Izin Industri Primer Hasil Hutan. Hal ini diharapkan dapat memperkuat peran subsektor kehutanan dalam perekonomian.

Pada penghitungan PDB konvensional selama ini, subsektor kehutanan mengalami dampak kurang menguntungkan akibat penghitungannya terhadap PDB. Dengan metode penghitungan tersebut, nilai kontribusi subsektor kehutanan terhadap PDB sangat rendah. Memang, kecilnya kontribusi Subsektor Kehutanan disebabkan oleh sistem pencatatan/ penghitungan yang tidak menilai secara menyeluruh seluruh aktivitas cakupan binaan KLHK yang menghasilkan nilai tambah. PDB dengan akun satelit kehutanan (*satellite account*), digunakan untuk mengukur kinerja KLHK secara lebih realistis dan proporsional. Biasanya, pengukuran dengan cara ini mengikuti kriteria penghitungan PDB dengan menambahkan kontribusi dari subsektor kehutanan yang sebelumnya tidak diperhitungkan. Oleh karena itu, hasil penghitungan menggunakan akun satelit dapat memberikan perspektif dan pendamping lain untuk metode penghitungan PDB konvensional.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penghitungan *satellite account* dimaksudkan untuk melengkapi penghitungan kontribusi Subsektor Kehutanan dalam PDB, sehingga diperoleh penilaian yang lebih proporsional dalam penghitungan PDB Subsektor Kehutanan dari hulu sampai hilir beserta pendistribusiannya. Penyempurnaan ini dilakukan dengan cara memperluas cakupan Subsektor Kehutanan, terutama pada industri primer kehutanan yang mengacu pada PP No.6 Tahun 2007 jo. PP No.3 Tahun 2008, serta pada Peredaran Hasil Hutan yang mengacu pada Permenhut No. P55/Menhut-II/2006, ditambah dengan P.35/Menhut-II/2008 jo P.9/Menhut-II/2009 tentang Izin Industri Primer Hasil Hutan.

Tujuan yang ingin dicapai yaitu tersedianya hasil analisis untuk menghitung kontribusi Subsektor Kehutanan terhadap PDB Indonesia berdasarkan kegiatan kehutanan dari hulu hingga hilir dan sebarannya dalam bentuk PDB *Satellite* Kehutanan.

1.5. Konsep dan Definisi

1. Industri Primer Kehutanan, meliputi industri primer hasil hutan kayu dan industri primer hasil hutan bukan kayu.
2. Industri Primer Hasil Hutan Kayu adalah industri yang mengolah Kayu Bulat (KB) dan atau Kayu Bulat Kecil (KBK) menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
3. Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu adalah industri yang mengolah hasil hutan bukan kayu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
4. Pendistribusian Produk Kehutanan adalah kegiatan penyaluran barang hasil kehutanan sampai ke tangan konsumen barang tersebut. Kegiatan penyaluran barang menimbulkan margin perdagangan yang pada dasarnya berupa keuntungan pedagang baik pedagang besar maupun eceran.
5. Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi yang beroperasi dalam suatu wilayah atau suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya 1 tahun).
6. Nilai Tambah Bruto (NTB) adalah besaran pertambahan nilai yang terjadi akibat adanya suatu proses produksi, atau diartikan juga sebagai besarnya nilai yang harus ditambahkan terhadap nilai pokok produk yang digunakan dalam proses produksi. Besaran nilai tambah tersebut mencakup balas jasa faktor produksi.
7. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) adalah pedoman pengklasifikasian lapangan usaha (kegiatan ekonomi) yang cakupannya telah disesuaikan dengan perkembangan perekonomian Indonesia terkini dan juga telah disesuaikan dengan "*International Standard Industrial Classification of All Economic Activites* (ISIC)" menurut revisi ke-4 tahun 2009. KBLI hanya mengelompokkan unit produksi menurut kegiatan ekonomi, tidak membedakan unit produksi menurut kepemilikan, jenis badan hukum, formal atau informal.
8. PDB Atas Dasar Harga Berlaku (PDB ADHB) adalah PDB yang dinilai atas dasar harga yang berlaku pada tahun-tahun bersangkutan. PDB yang dihasilkan disebut PDB Nominal, yang menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara.

9. PDB Atas Dasar Harga Konstan (PDB ADHK) adalah PDB yang dinilai atas dasar harga yang tetap (tahun dasar). PDB yang dihasilkan disebut PDB Riil, yang dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
10. Peranan (*share*) menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.
11. Laju pertumbuhan adalah besarnya perubahan PDB atas dasar harga konstan pada suatu periode dibandingkan periode sebelumnya, yang mencerminkan perubahan riil volume produksi barang dan jasa tanpa terjadinya perubahan harga (inflasi).
12. Laju implisit mencerminkan besarnya perubahan harga yang terjadi pada tingkat produsen barang dan jasa pada suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya.
13. *Establishment* adalah suatu kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa yang terletak dalam suatu lokasi, mempunyai catatan administrasi sendiri, dan ada satu atau lebih orang yang bertanggung jawab atas risiko usaha.
14. Industri Besar dan Sedang (IBS) adalah kegiatan industri pengolahan yang mempunyai tenaga kerja 20 orang atau lebih.
15. Industri Kecil dan Rumah Tangga (IKR) adalah kegiatan industri pengolahan yang mempunyai tenaga kerja kurang dari 20 orang.
16. Indeks harga adalah indikator harga yang digunakan untuk menghitung perubahan harga yang terjadi terhadap harga pada tahun dasar, dimana nilai indeks pada tahun dasar adalah 100.
17. *Deflator* adalah indikator harga (biasanya berupa indeks harga) yang digunakan untuk membagi suatu nilai pada tahun berjalan untuk memperoleh suatu nilai konstan dengan tahun dasar tertentu.
18. *Coding* adalah kegiatan untuk memberikan identitas pada setiap komoditi sesuai dengan klasifikasi yang sesuai, misalnya menggunakan KBLI 2009.

19. Destinasi adalah kegiatan untuk melakukan identifikasi terhadap sektor-sektor ekonomi yang menggunakan suatu barang atau jasa sebagai input antara dalam proses produksinya.
20. *Transfer In Transfer Out* (TITO) adalah kegiatan untuk melakukan homogenisasi suatu kegiatan ekonomi dengan cara memasukkan output suatu kegiatan ekonomi sektor tertentu beserta seluruh inputnya yang dihasilkan oleh *establishment* lain ke dalam suatu kegiatan ekonomi yang sejenis, serta mengeluarkan output kegiatan ekonomi sektor lain beserta seluruh inputnya yang dihasilkan oleh *establishment* tersebut untuk digabungkan ke dalam kegiatan ekonomi yang sejenis.

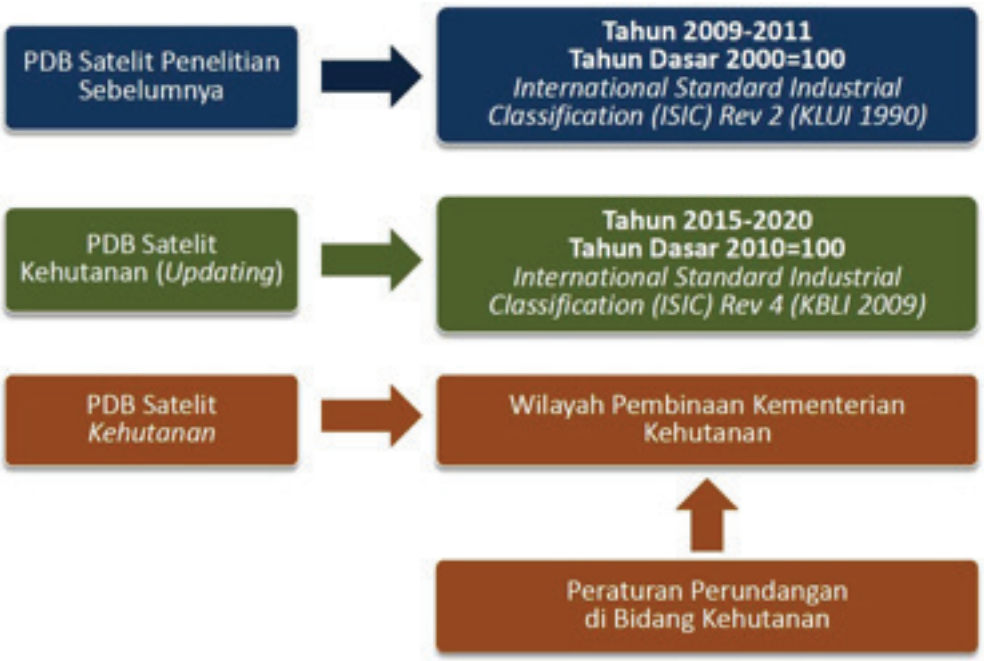

Gambar 1.3. Dasar Klasifikasi PDB Satelit Kehutanan

1.6. Ruang Lingkup dan Cakupan

Cakupan yang disusun untuk keperluan Penyusunan Neraca *Satellite* Kehutanan Tahun 2015 – 2020, sesuai dengan kesepakatan antara BPS dengan KLHK menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2019, 5 digit yaitu :

1.	01701 Perburuan dan Penangkapan Satwa Liar
2.	01702 Penangkaran Satwa Liar
3.	02111 Pengusahaan Hutan Jati
4.	02112 Pengusahaan Hutan Pinus
5.	02113 Pengusahaan Hutan Mahoni
6.	02114 Pengusahaan Hutan Sonokeling
7.	02115 Pengusahaan Hutan Sengon/Albasia/Jeunjing
8.	02116 Pengusahaan Hutan Cendana
9.	02117 Pengusahaan Hutan Alkasia
10.	02118 Pengusahaan Hutan Ekaliptus
11.	02119 Pengusahaan Hutan Lainnya
12.	02120 Pengusahaan Hutan Alam
13.	02131 Pengusahaan Rotan
14.	02132 Pengusahaan Getah Pinus
15.	02133 Pengusahaan Daun Kayu Putih
16.	02134 Pengusahaan Bambu
17.	02135 Pengusahaan Damar
18.	02136 Pengusahaan Gaharu
19.	02139 Pengusahaan Hutan bukan Kayu Lainnya
20.	02141 Pengusahaan Pembibitan Tanaman Jati
21.	02142 Pengusahaan Pembibitan Tanaman Pinus
22.	02143 Pengusahaan Pembibitan Tanaman Mahoni
23.	02144 Pengusahaan Pembibitan Tanaman Sonokeling

24.	02145 Pengusahaan Pembibitan Tanaman Sengon/Albasia/ Jeunjing
25.	02146 Pengusahaan Pembibitan Tanaman Jabon
26.	02147 Pengusahaan Pembibitan Tanaman Akasia
27.	02148 Pengusahaan Pembibitan Tanaman Ekaliptus
28.	02149 Pengusahaan Pembibitan TanamanKehutanan Lainnya
29.	02201 Pemanenan Kayu
30.	02202 Usaha Pemungutan Kayu
31.	02209 UsahaKehutanan Lainnya
32.	02301 Pemungutan Getah Karet
33.	02302 Pemungutan Rotan
34.	02303 Pemungutan Getah Pinus
35.	02304 Pemungutan Daun Kayu Putih
36.	02305 Pemungutan Kokon/ Kepompong Ulat Sutera
37.	02306 Pemungutan Damar
38.	02307 Pemungutan Madu
39.	02308 Pemungutan Bambu
40.	02309 Pemungutan Bukan Kayu Lainnya
41.	02401 Jasa Penggunaan Kawasan Hutan di Luar SektorKehutanan
42.	02402 Jasa Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
43.	02403 Jasa Rehabilitasi dan Restorsi Kehutanan Sosial
44.	02404 JasaKehutanan Bidang Perencanaan Kehutanan
45.	02405 Jasa Sertifikasi, Inspeksi, dan Verifikasi Produk Kehutanan
46.	02409 Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya
47.	16101 Industri Penggergajian Kayu
48.	16102 Industri Pengawetan Kayu
49.	16103 Industri Pengawetan Rotan, Bambu & Sejenisnya
50.	16104 Industri Pengolahan Rotan

51.	16211 Industri Kayu Lapis
52.	16212 Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood
53.	16213 Industri Panel Kayu Lainnya
54.	16214 Industri Veneer
55.	16221 Industri Barang Bangunan dari Kayu
56.	16222 Industri Bangunan Prafabrikasi dari Kayu
57.	16230 Industri Wadah dari Kayu
58.	16291 Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu
59.	16293 Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan Meubeler
60.	16294 Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu
61.	16295 Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu
62.	16299 Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL
63.	17011 Industri Bubur Kertas (Pulp)
64.	17012 Industri Kertas Budidaya
65.	17013 Industri Kertas Berharga
66.	17014 Industri Kertas Khusus
67.	17019 Industri Kertas Lainnya
68.	17021 Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang
69.	17022 Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton
70.	17091 Industri Kertas Tissue
71.	17099 Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL
72.	31001 Industri Furnitur dari Kayu
73.	31002 Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu
74.	46207 Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan
75.	46491 Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
76.	46636 Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu

77.	47216 Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan
78.	47526 Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu
79.	47591 Perdagangan Eceran Furnitur
80.	47595 Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan
81.	47781 Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput, dan Sejenisnya
82.	91031 Kegiatan Taman Konservasi Alam
83.	91032 Taman Nasional (TN)
84.	91033 Taman Hutan Raya (Tahura)
85.	91034 Taman Wisata Alam (TWA)
86.	91035 Hutan Lindung (HL), Suaka Margasatwa (SM), dan Cagar Alam (CA)
87.	91036 Taman Laut
88.	91037 Taman Buru dan Kebun Buru
89.	91039 Kegiatan Taman Konservasi Alam Lainnya

Hasil penyusunan PDB satelit kehutanan yang dibuat dari 89 komponen di atas dimaksudkan untuk melengkapi PDB kehutanan yang telah diterbitkan sebelumnya oleh BPS. Dengan cara ini, semua kegiatan yang terkait dengan kegiatan kehutanan diidentifikasi di bawah KBLI, memberikan subsektor kehutanan perspektif yang lebih luas tentang kontribusinya terhadap PDB.

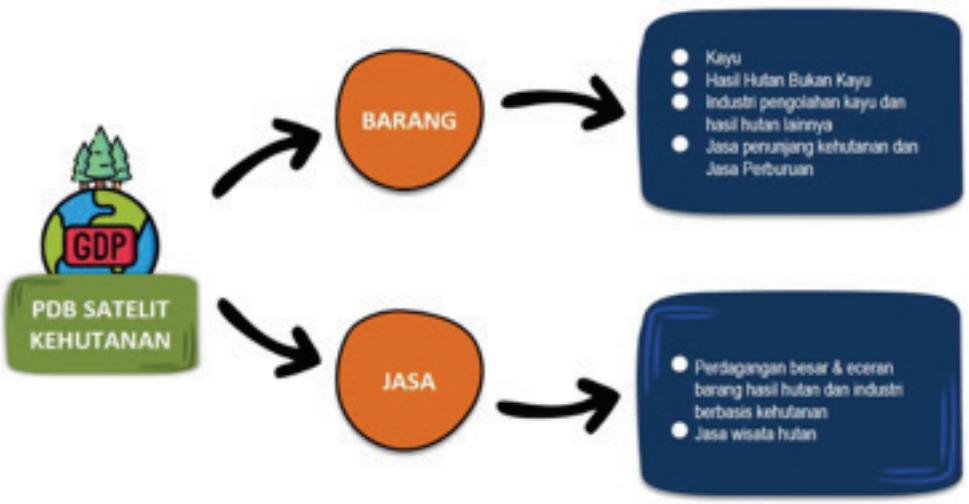

Gambar 1.4. Batasan PDB Satelit Kehutanan

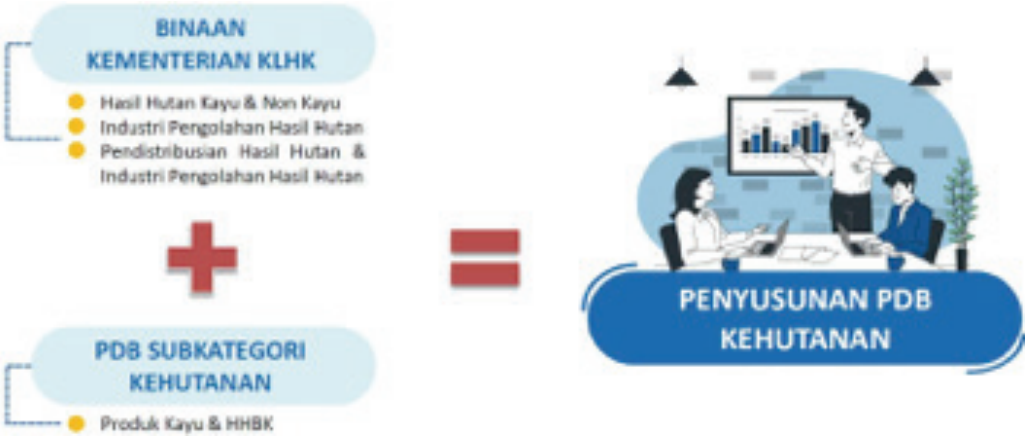

Gambar 1.5. Cakupan PDB Satelit Kehutanan

Melakukan *bridging* klasifikasi PDB Indonesia ke PDB Satelit Kehutanan, yang terdiri dari 6 klasifikasi industri. Hasil *bridging* klasifikasi PDB Satelit Kehutanan, antara lain: Kehutanan dan Penebangan Kayu; Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya; Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman; Industri Furnitur; Perdagangan Bedar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor; dan Jasa Lainnya.

Selain itu, juga dilakukan *bridging* klasifikasi PDB Satelit Kehutanan ke SUT 2010, yang terdiri dari 7 klasifikasi industri. Industri hasil *bridging* SUT 2010, antara lain Kehutanan dan Penebangan Kayu; Industri Barang dari Kayu dan Gabus; Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Industri Furnitur; Perdagangan Bedar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor; Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor; dan Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Swasta.

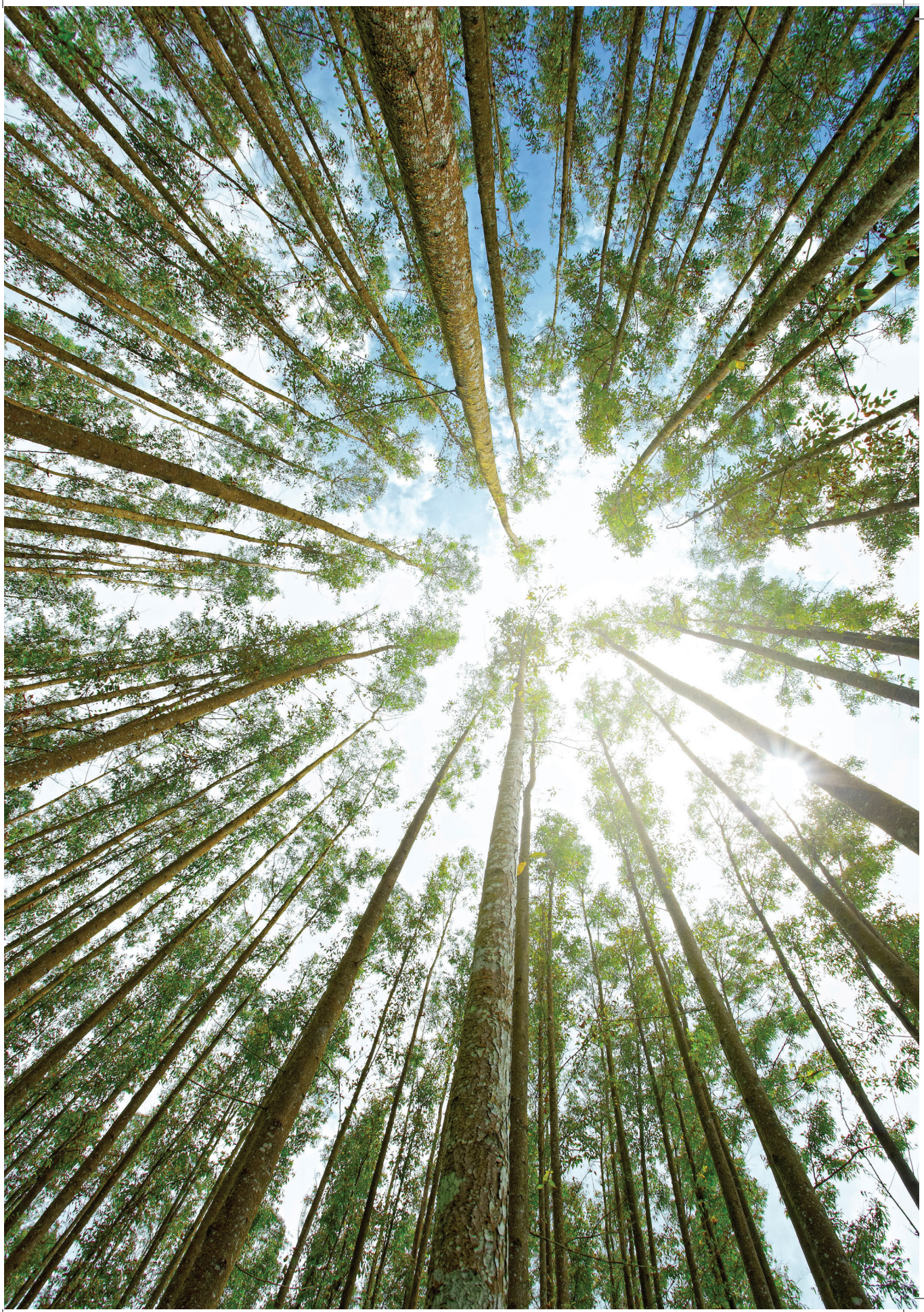

BAB 2
Sumber Data dan Metodologi

2.1. Sumber Data

Data yang digunakan untuk membuat PDB Satellite Kehutanan adalah:

- Data produksi, berasal dari KLHK dan Perum Perhutani. Data harga atau indikator harga didapatkan dari Statistik Perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) -berupa IUPHHK Hutan Alam atau IUPHHK-HA atau yang dulu dikenal dengan sebutan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan – Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) yang juga dikenal dengan Hutan Tanaman Industri (HTI), Statistik Pembudidayaan Tanaman, Indeks Harga Perdagangan Besar, yang bersumber dari publikasi BPS. Sementara untuk data struktur biaya, diperoleh dari Statistik Perusahaan HPH, dan Statistik Perusahaan Pembudidayaan Tanaman yang berasal dari BPS.

- Data industri besar dan sedang, didapatkan dari publikasi industri besar dan sedang, BPS. Data yang dipakai meliputi produksi yang dihasilkan, bahan baku dan penolong serta biaya-biaya lain, hingga jenis komoditi.
- Data industri kecil dan rumah tangga (IKR), didapatkan dari hasil pengolahan Sensus Ekonomi 2006. Data yang dipakai meliputi output dan biaya-biaya produksi. Sedangkan data Industri Mikro dan Kecil (IMK) Kayu dan Hasil Hutan Lainnya yang terbaru tersedia dalam 2 digit KBLI 2009 dari Subdit IKR BPS.
- Data indeks harga didapatkan dari pengolahan Indeks Harga Grosir (IHPB) Badan Pusat Statistik Harga Grosir BPS.

2.2. Metodologi

Penyusunan Neraca *Satellite* Kehutanan ini menggunakan metode yang mirip dengan penghitungan PDB Konvensional, hanya ditambahkan dengan memasukkan subkategori pendapatan negara yang termasuk dalam binaan KLHK yang sebelumnya tidak dipertimbangkan dalam PDB Subsektor Kehutanan. Termasuk PDB Subsektor Kehutanan. Dalam penghitungan neraca tersebut, dilakukan tiga proses penghitungan. Pertama adalah Penghitungan Nilai Tambah Subsektor Kehutanan, kedua adalah Penghitungan Nilai Tambah Bruto Industri Berbasis Kehutanan, dan ketiga adalah Penghitungan Nilai Tambah Bruto Perdagangan Produk Kehutanan.

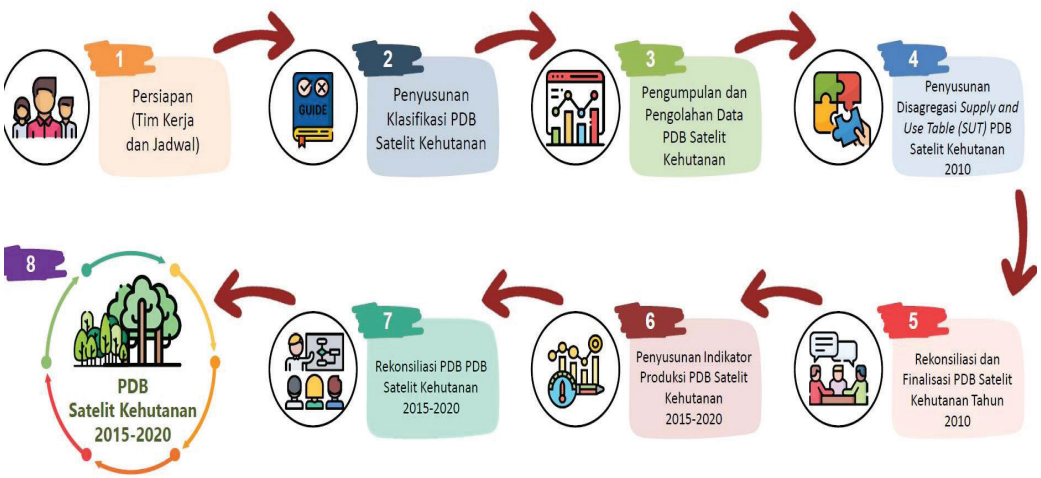

Gambar 2.1. Tahapan dan Jadwal Penyusunan Kajian

a. Penghitungan Nilai Tambah Bruto Subsektor Kehutanan

Output atas dasar harga berlaku golongan pokok kehutanan dan penebangan kayu didapatkan dengan mengalikan harga pada tahun yang bersangkutan dengan produksi. Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku golongan pokok kehutanan dan penebangan kayu didapatkan dengan mengalikan rasio nilai tambah bruto yang diperoleh dari Survei Khusus Sektoral (SKS) dengan output tersebut. Nilai rasio nilai tambah bruto dapat juga diperoleh dengan cara mengurangkan angka satu dengan rasio biaya antara.

Output dan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan dihitung dengan cara revaluasi. Output atas dasar harga konstan didapatkan dengan cara mengalikan harga komoditas pada tahun dasar dengan produksi pada tahun ke-t. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan didapatkan dengan mengalikan rasio nilai tambah bruto dengan output atas dasar harga konstan. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan dapat dipakai untuk menunjukkan laju pertumbuhan Subsektor Kehutanan. Alur kerja yang dilakukan dalam menghasilkan data PDB Subsektor Kehutanan dimulai dari mengumpulkan data produksi, harga, rasio biaya antara per komoditas kehutanan hingga menghitung PDB Subsektor Kehutanan dapat dilihat pada Gambar 2.2.

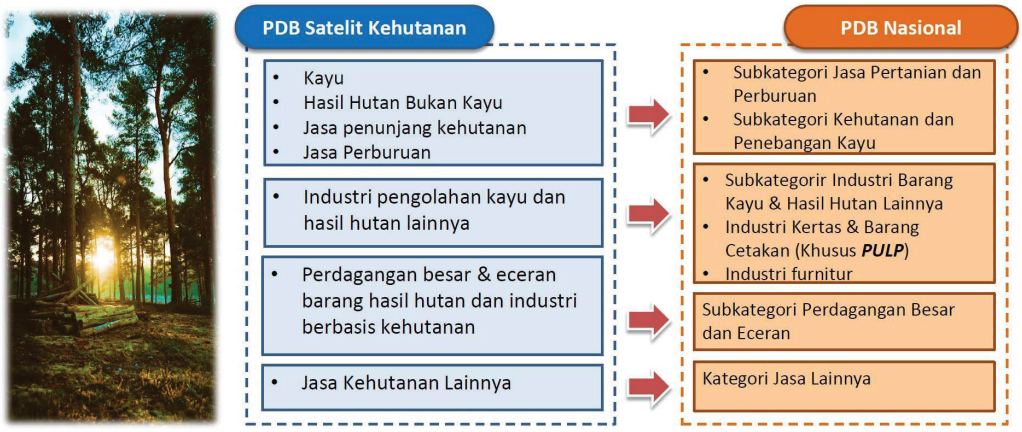

Gambar 2.2. Kesesuaian PDB Kehutanan dengan PDB Nasional

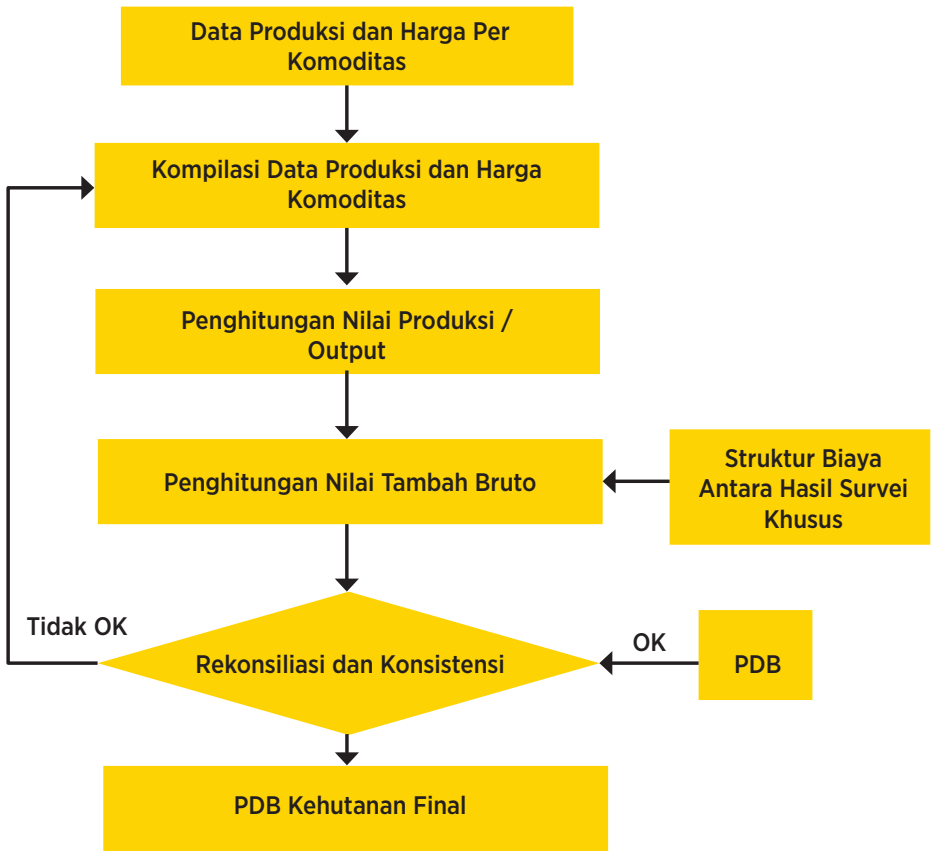

Gambar 2.3. Alur Kerja Penyusunan PDB Subsektor Kehutanan

b. Penghitungan Nilai Tambah Bruto Industri Berbasis Kehutanan

Data industri besar dan menengah dihasilkan dari survei industri berbasis sensus tahunan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *establishment*. Tabulasi akhirnya disajikan secara rinci menurut kelompok komoditi berdasarkan KBLI 2009 5 digit. Penentuan suatu establishment masuk ke dalam KBLI 5 digit tertentu didasarkan kepada produk utamanya (*main characteristic product*).

Produk utama adalah produk dengan nilai produksi tertinggi dibandingkan dengan nilai produk lain yang diproduksi oleh suatu *establishment*. Bahkan pada kenyataannya, dapat dilihat bahwa beberapa *establishment* dapat memproduksi beberapa jenis produk selain produk utama. Dengan kata lain, ketika menerapkan pendekatan bisnis, semua jenis barang yang dihasilkan oleh *establishment* dimasukkan dalam KBLI 5 digit tertentu dengan mengikuti produk utamanya.

Oleh karena itu dimungkinkan bahwa produk lainnya di luar produk utama tersebut mempunyai ciri produk yang tidak sesuai lagi dengan ciri produk utamanya. Ada kemungkinan bahwa produk lainnya tersebut memiliki kode KBLI 5 digit yang berbeda dengan produk utamanya.

Uraian di atas maka dapat memberikan suatu gambaran bahwa penyajian hasil survei tahunan industri besar dan sedang yang dirinci menurut KBLI 5 digit belum secara murni memperlihatkan identitas dari KBLI 5 digit tertentu. Hal tersebut disebabkan di dalamnya masih terdapat produk-produk di luar produk utama. Agar data hasil survei tahunan IBS ini dapat dipakai untuk kebutuhan penyusunan PDB Industri Berbasis Kehutanan, diperlukan proses pengolahan lebih lanjut.

Proses pengolahan data pada laporan ini dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Melakukan identifikasi *establishment* IBS yang sebagian atau seluruh barang- barang yang dihasilkan adalah barang-barang dari kayu dan bukan kayu.
2. Melakukan pengkodean (*coding*) setiap komoditi dari barang-barang yang dihasilkan untuk seluruh *establishment* yang terpilih pada butir 1 ke dalam KBLI 5 digit, meskipun hasil pengkodean berbeda dari KBLI yang akan disusun PDB-nya.
3. Melakukan pengkodean (*coding*) setiap komoditi dari bahan baku dan bahan tambahan (penolong) untuk seluruh *establishment* yang terpilih pada butir 1 ke dalam KBLI 5 digit.
4. Menjumlahkan nilai dari barang-barang yang dihasilkan dengan kode KBLI yang sama pada setiap *establishment*.
5. Melakukan destinasi terhadap bahan baku dan penolong setiap komoditi sesuai dengan industri pemakai (hasil butir 4).
6. Melakukan proses *Transfer In Transfer Out* (TITO) terhadap bahan baku maupun biaya lainnya sesuai dengan output yang sesuai. Output ini terdiri dari barang-barang yang dihasilkan, listrik yang dijual, jasa industri, selisih nilai stok barang setengah jadi, dan penerimaan lainnya.
7. Setelah proses TITO selesai, maka dilakukan penjumlahan (agregasi) barang- barang yang dihasilkan serta bahan baku dan biaya produksi lainnya, termasuk komponen nilai tambah sesuai dengan KBLI 5 digit Industri Berbasis Kehutanan yang telah ditentukan.

8. Memeriksa kelayakan besaran dan rasio nilai tambah menurut KBLI yang telah disepakati.
9. Membuat neraca produksi IBS menurut KBLI 5 digit.

Setelah neraca produksi industri besar dan sedang didapatkan, maka nilai tambah untuk industri besar dan sedang atas dasar harga berlaku telah dihasilkan. Lalu untuk menghitung nilai tambah industri besar dan sedang atas dasar harga konstan 2000, diperlukan suatu *deflator* yaitu Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB). Dari Output industri besar dan sedang hutan atas dasar harga berlaku, dibagi dengan indeks harga perdagangan besar maka diperoleh output industri besar dan sedang atas dasar harga konstan. Kemudian output atas dasar harga konstan tersebut dikali dengan rasio nilai tambah terhadap output tahun dasar sehingga diperoleh NTB industri besar dan sedang atas dasar harga konstan.

Dari uraian di atas diperoleh rumus sebagai berikut:

$Output_{b,t}$ = Pengolahan hasil TITO Industri Besar dan Sedang

$NTB_{b,t}$ = $Output_{b,t}$ – $Biaya\ antara_{b,t}$

Dimana:

$Output_{b,t}$ = Output/nilai produksi bruto atas dasar harga berlaku tahun t $NTB_{b,t}$ = Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku tahun t

$Biaya\ antara_{b,t}$ = Biaya yang habis dikeluarkan untuk proses produksi tahun t **$Output_{k,t}$** = Output/nilai produksi bruto atas dasar harga konstan tahun t $Output_{k,t}$ = $Output_t$: (Indeks $Harga_t$: 100)

$NTB_{k,t}$ = Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan tahun t $NTB_{k,t}$ = $Output_{k,t}$ x Rasio NTB_0

Indeks $Harga_t$ = Indeks harga perdagangan besar tahun t

Rasio NTB_0 = Rasio nilai tambah bruto terhadap output pada tahun dasar

Dasar penghitungan industri kecil dan kerajinan rumah tangga adalah output hasil pengolahan Sensus Ekonomi (SE) 2006. Output hasil SE 2006 dibagi dengan IHPB tahun yang sama untuk memperoleh output atas dasar harga konstan. Kemudian untuk output atas dasar harga konstan tahun 2009 sampai 2011, diestimasi dengan menggunakan indikator produksi hasil Survei IMK yang hasilnya disajikan dalam 2 dijit KBLI 2009 dan indikator tenaga kerja. Setelah output atas dasar harga konstan masing-masing tahun diperoleh, selanjutnya dikalikan dengan IHPB untuk mendapatkan output atas dasar harga berlaku masing masing tahun. NTB atas dasar harga berlaku dihitung dari output atas dasar berlaku dikalikan dengan rasio NTB tahun berjalan. Demikian juga NTB atas dasar harga konstan dihitung dari output atas dasar harga konstan dikalikan dengan rasio NTB tahun dasar.

PDB Industri Berbasis Kehutanan atas dasar harga berlaku dan konstan dihasilkan dari penjumlahan nilai tambah industri besar dan sedang dan nilai tambah industri kecil dan kerajinan rumah tangga untuk masing-masing harga berlaku dan harga konstan. Pemilihan KBLI untuk menghitung PDB Subsektor Kehutanan telah dilakukan secara cermat. Proses pengolahan datanya mencakup *coding* dan TITO. Alur penghitungan PDB Industri Berbasis Kehutanan disajikan dalam Gambar 2.4.

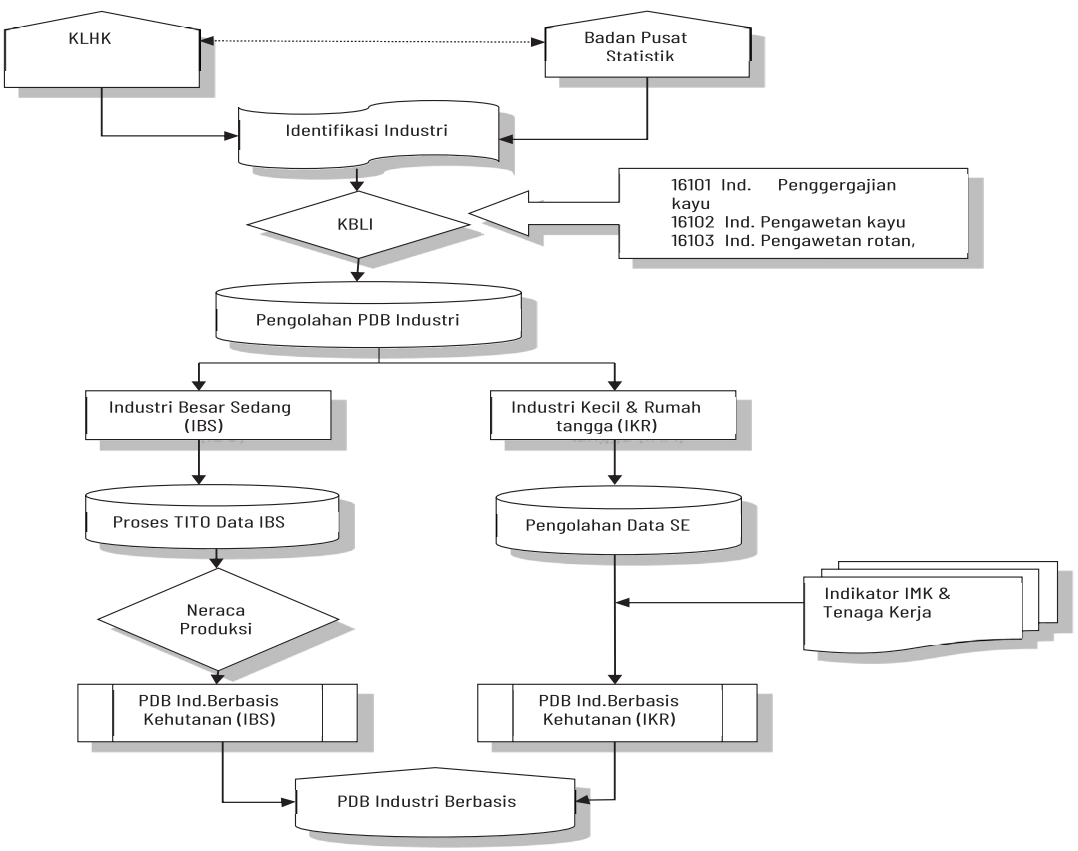

Gambar 2.4. Diagram Logika Framework PDB Industri Berbasis Kehutanan

c. Penghitungan Nilai Tambah Bruto Perdagangan Produk Kehutanan

Sektor perdagangan terdiri dari kegiatan mengumpulkan dan mendistribusikan barang baru dan bekas. Distribusi dimulai dari produsen (untuk produk dalam negeri) dan importir (untuk produk impor) sampai ke konsumen tanpa mengubah sifat produk. Produsen atau importir yang tercantum di sini adalah pemasok / pemasok pertama dalam periode tertentu. Konsumen adalah pengguna/ pengguna komoditas tersebut dan terdiri dari sektor produksi, rumah tangga, nirlaba, pemerintah, pembentukan modal, penyimpanan, dan ekspor.

Kegiatan pedagang juga mencakup perantara, agen, dan kegiatan perdagangan penjualan yang memproduksi produk (komoditas) yang diperdagangkan. Transaksi komersial dapat dibagi menjadi dua jenis kegiatan, grosir dan eceran, tergantung pada fungsi dan tujuannya. Grosir umumnya adalah penjualan massal (*wholesale*), dan eceran adalah penjualan kecil. Pembeli dari pengecer biasanya rumah tangga, dan pembeli dari grosir biasanya pengecer, grosir lainnya, bisnis, lembaga pemerintah, dan organisasi nirlaba.

Produk yang siap untuk diperdagangkan dari sektor kehutanan meliputi produk primer kehutanan serta industri kehutanan yang berasal dari produksi dalam negeri. Output perdagangan merupakan total margin dari nilai produk kehutanan yang diperdagangkan. Penghitungan output ini diperoleh dengan melakukan pendekatan arus barang, yaitu total nilai barang yang diperdagangkan dikalikan rasio margin perdagangan. Data mengenai total nilai barang diperdagangkan yang berasal dari produk domestik didapatkan dari hasil estimasi output masing-masing produk kehutanan. Sedangkan data mengenai rasio margin perdagangan didapatkan dari survei khusus.

Struktur input kegiatan perdagangan meliputi pembungkus dan biaya pengemasan, biaya promosi dan iklan, sewa kamar, alat tulis, listrik dan telepon, pos dan pengiriman, bea dan retribusi, biaya tenaga kerja, pajak dan biaya lainnya. Sumber data yang digunakan berasal dari survei khusus. Hasil pengolahan survei tersebut akan memberikan data rasio masing-masing komponen input terhadap total pendapatan/pengeluarannya.

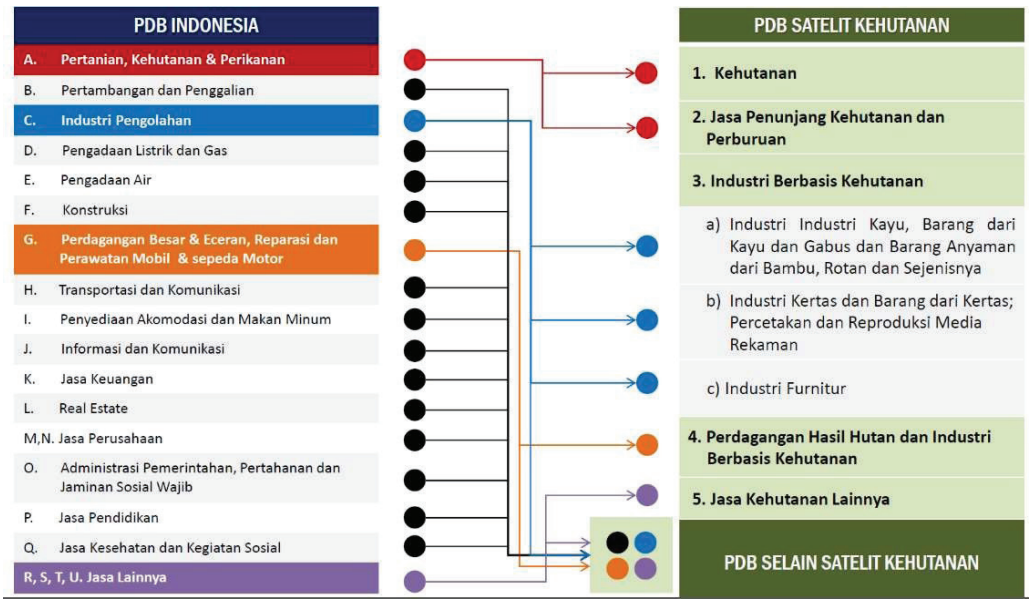

Gambar 2.5. Konkordansi PDB 17 Industri ke dalam PDB Satelit Kehutanan

BAB 3
Analisis dan Pembahasan

3.1 Perkembangan PDB Kehutanan dan PDB Satelit Kehutanan Tahun 2015-2020

Berdasarkan hasil pengolahan sementara untuk PDB Satelit Kehutanan Tahun 2015-2020, diinformasikan bahwa terdapat penyempurnaan penghitungan PDB Satelit Kehutanan. Penyempurnaan penghitungan (PDB Satelit Kehutanan) yang lebih komprehensif telah mempertimbangkan produk kehutanan dari hulu sampai hilir beserta distribusinya. Hal tersebut mendorong peningkatan kontribusi Subsektor Kehutanan terhadap PDB Indonesia. Terjadi penambahan nilai pada PDB Satelit Kehutanan dibandingkan dengan penghitungan PDB Subsektor Kehutanan (konvensional) sebelumnya, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020.

Dalam metode penghitungan PDB Subsektor Kehutanan secara konvensional yang selama ini dilakukan, tidak melakukan penghitungan secara menyeluruh hanya berdasarkan cakupan binaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Tabel 3.1 menunjukkan hasil penghitungan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk Produk Domestik Bruto (PDB) Satelit Kehutanan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2020 (miliar Rupiah).

LAPANGAN USAHA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Kehutanan	82.321,80	87.542,40	91.609,40	97.396,80	104.121,90	108.639,80
2. Industri Pengolahan Berbasis Kehutanan	185.348,60	189.373,30	198.832,80	206.263,80	211.797,50	211.167,20
a. Industri Kayu, Barang daru Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya	76.984,00	79.103,10	80.591,20	82.874,70	79.627,50	77.927,40
b. Industri Kertas dan Barang dari Kertas	80.774,80	81.794,40	88.154,20	92.027,50	97.428,90	98.903,90
c. Industri Furnitur Berbasis Kehutanan	27.589,80	28.475,80	30.087,40	31.361,60	34.741,10	34.335,90
3. Pedagangan Hasil Kehutanan dan Hasil Industri Berbasis Kehutanan	87.096,30	88.711,30	92.716,10	96.488,50	98.920,90	99.280,30
4. Jasa Perburuan dan Jasa Kehutanan Lainnya	468,70	546,20	559,00	599,50	627,80	519,80
NTB SATELIT KEHUTANAN ATAS HARGA DASAR	355.235,40	366.173,20	383.717,30	400.748,60	415.468,10	419.607,10
5. Pajak dikurang Subsidi atas Produk Kehutanan dan Lapangan Usaha Berbasis Kehutanan	3.371,30	5.542,70	5.018,20	7.165,00	5.253,40	4.063,80
PDB SATELIT KEHUTANAN	**358.606,70**	**371.715,90**	**388.735,50**	**407.913,60**	**420.721,50**	**423.670,90**
PDB SELAIN SATELIT KEHUTANAN	**11.167.726,10**	**12.030.012,60**	**13.201.090,20**	**14.430.842,40**	**15.411.813,90**	**15.010.480,90**
PDB INDONESIA	**11.526.332,80**	**12.401.728,50**	**13.589.825,70**	**14.838.756,00**	**15.832.535,40**	**15.434.151,80**

Tabel 3.1. PDB Satelit Kehutanan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020 (miliarRupiah)

Selain menghitung Produk Domestik Bruto (PDB) Satelit Kehutanan Atas Dasar Harga Berlaku berdasarkan nilai nominal, BPS juga melakukan penghitungan kontribusi PDB satelit berdasarkan harga berlaku tahun 2015-2020 (Tabel 3,2).

LAPANGAN USAHA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Kehutanan	0,71	0,71	0,67	0,66	0,66	0,70
2. Industri Pengolahan Berbasis Kehutanan	1,61	1,53	1,46	1,39	1,34	1,37
a. Industri Kayu, Barang daru Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya	0,67	0,64	0,59	0,56	0,50	0,50
b. Industri Kertas dan Barang dari Kertas	0,70	0,66	0,65	0,62	0,62	0,64
c. Industri Furnitur Berbasis Kehutanan	0,24	0,23	0,22	0,21	0,22	0,22
3. Pedagangan Hasil Kehutanan dan Hasil Industri Berbasis Kehutanan	0,76	0,72	0,68	0,65	0,62	0,64
4. Jasa Perburuan dan Jasa Kehutanan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NTB SATELIT KEHUTANAN ATAS HARGA DASAR	3,08	2,95	2,82	2,70	2,62	2,72
5. Pajak dikurang Subsidi atas Produk Kehutanan dan Lapangan Usaha Berbasis Kehutanan	0,03	0,04	0,04	0,05	0,03	0,03
PDB SATELIT KEHUTANAN	**3,11**	**3,00**	**2,86**	**2,75**	**2,66**	**2,75**
PDB SELAIN SATELIT KEHUTANAN	**96,89**	**97,00**	**97,14**	**97,25**	**97,34**	**97,25**
PDB INDONESIA	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Tabel 3.2. Kontribusi PDB Satelit Kehutanan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2020 terhadap PDB Indonesia (Persen)

Gambar 3.1 menyajikan Grafik Distribusi PDB Satelit Kehutanan 2015-2020 Atas Dasar Harga Berlaku (Persen) untuk memberikan gambaran yang lebih jelas kontribusi PDB Satelit Kehutanan terhadap PDB Indonesia.

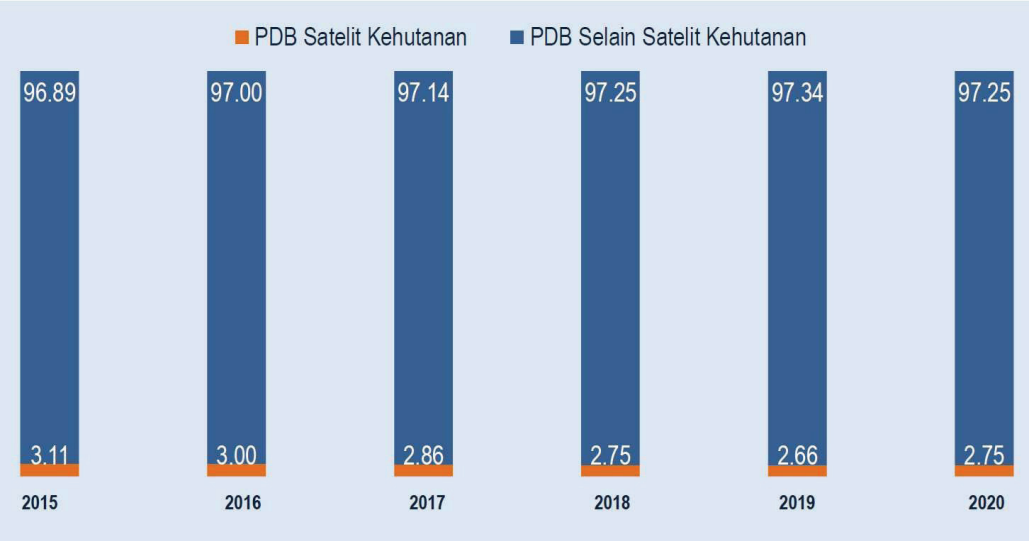

Gambar 3.1 Grafik Distribusi PDB Satelit Kehutanan 2015-2020 Atas Dasar Harga Berlaku (Persen)

Hasil penyusunan PDB Satelit Kehutanan Tahun 2015-2020 yang dihasilkan dari seluruh cakupan membuat cara pandang terhadap Subsektor Kehutanan dalam memberikan kontribusinya terhadap PDB nasional menjadi lebih komprehensif karena telah dilakukan identifikasi terhadap seluruh aktivitas yang berkaitan dengan binaan KLHK berdasarkan KBLI. Sebelum dilakukan penyempurnaan penghitungan PDB Subsektor Kehutanan terlihat bahwa pada PDB Subsektor Kehutanan atas dasar harga berlaku tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020 masing-masing sebesar Rp 82.321,80 miliar, Rp 87.542,40 miliar, 91.609,40 miliar, 97.396,80 miliar, 104.121,90 miliar, dan Rp 108.639,80 miliar. Setelah dilakukan penyempurnaan penghitungan (PDB *Satellite* Kehutanan), PDB Subsektor Kehutanan bertambah sekitar tiga kali lipat. PDB *Satellite* Subsektor Kehutanan atas dasar harga berlaku tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020 masing-masing sebesar Rp 358.606,70 miliar, Rp 371.715,90 miliar, 388.735,50 miliar, 407.913,60 miliar, 420.721,50 miliar, dan Rp 423.670,90 miliar.

Pada metode penghitungan konvensional, penciptaan PDB oleh Subsektor Kehutanan diketahui hanya sebesar 0,71 persen terhadap PDB Indonesia pada tahun 2015. Setelah dalam penghitungannya memasukkan PDB Industri Berbasis Kehutanan dan Perdagangan Produk Kehutanan, maka peranan Subsektor Kehutanan bertambah sebesar 2,40 persen sehingga menjadi 3,11 persen. Pada tahun 2016, dengan metode penghitungan yang sama, peranan Subsektor Kehutanan pada PDB Indonesia juga mengalami peningkatan. Awalnya, PDB Subsektor Kehutanan diketahui hanya sebesar 0,71 persen terhadap PDB Indonesia. Setelah dalam penghitungannya memasukkan PDB Industri Berbasis Kehutanan dan Perdagangan Produk Kehutanan, maka peranan Subsektor Kehutanan bertambah sebesar 2,29 persen sehingga menjadi 3,00 persen. Pada tahun 2017, dengan metode penghitungan yang sama, peranan Subsektor Kehutanan pada PDB Indonesia juga mengalami peningkatan. Awalnya, PDB Subsektor Kehutanan diketahui hanya sebesar 0,67 persen terhadap PDB Indonesia. Setelah dalam penghitungannya memasukkan PDB Industri Berbasis Kehutanan dan Perdagangan Produk Kehutanan, maka peranan Subsektor Kehutanan bertambah sebesar 2,19 persen sehingga menjadi 2,86 persen. Pada tahun 2018, dengan metode penghitungan yang sama, peranan Subsektor Kehutanan pada PDB Indonesia juga mengalami peningkatan. Awalnya, PDB Subsektor Kehutanan diketahui hanya sebesar 0,66 persen terhadap PDB Indonesia. Setelah dalam penghitungannya memasukkan PDB Industri Berbasis Kehutanan dan Perdagangan Produk Kehutanan, maka peranan Subsektor Kehutanan bertambah sebesar 2,09 persen sehingga menjadi 2,75 persen. Pada tahun 2019, dengan metode penghitungan yang sama, peranan Subsektor Kehutanan pada PDB Indonesia juga mengalami peningkatan. Awalnya, PDB Subsektor Kehutanan diketahui hanya sebesar 0,66 persen terhadap PDB Indonesia. Setelah dalam penghitungannya memasukkan PDB Industri Berbasis Kehutanan dan Perdagangan Produk Kehutanan, maka peranan Subsektor Kehutanan bertambah sebesar 2,00 persen sehingga menjadi 2,66 persen. Terakhir, pada tahun 2020, dengan metode penghitungan yang sama, peranan Subsektor Kehutanan pada PDB Indonesia juga mengalami peningkatan. Awalnya, PDB Subsektor Kehutanan diketahui hanya sebesar 0,70 persen terhadap PDB Indonesia. Setelah dalam penghitungannya

memasukkan PDB Industri Berbasis Kehutanan dan Perdagangan Produk Kehutanan, maka peranan Subsektor Kehutanan bertambah sebesar 2,05 persen sehingga menjadi 2,75 persen. Namun demikian, kontribusi kehutanan baik pada produk primer maupun hasil olahan dan perdagangan produk kehutanan, cenderung menunjukkan penurunan, kecuali pada kontribusi kehutanan produk primer di tahun 2020. Selama periode 2015 – 2020, diketahui penurunan kontribusi dari Industri Berbasis Kehutanan dan Perdagangan Produk Kehutanan terhadap PDB Indonesia lebih besar daripada perubahan kontribusi Subsektor Kehutanan.

Gambar 3.2 menyajikan Grafik Perbandingan Kontribusi PDB Satelit Kehutanan Tahun 2015 dan 2020 Atas Dasar Harga Berlaku (Persen).

Gambar 3.2 menunjukkan bahwa kontribusi PDB kehutanan tahun 2020 meningkat, namun demikian kontribusi PDB satelit kehutanan dari Industri Pengolahan Berbasis Kehutanan, Perdagangan Hasil Hutan dan Hasil Industri Berbasis Kehutanan, dan Jasa Perburuan pada tahun 2020 umumnya menurun dibandingkan dengan tahun 2015, kecuali PDB dari Pajak Bersih Produk Kehutanan dan Lapangan Usaha Berbasis Kehutanan yang sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2015.

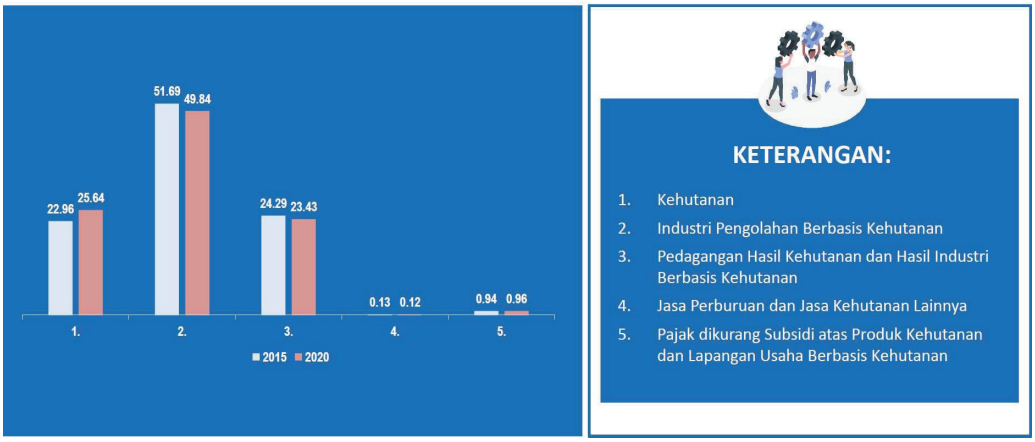

Gambar 3.2. Grafik Perbandingan Kontribusi PDB Satelit Kehutanan Tahun 2015dan 2020 Atas Dasar Harga Berlaku (Persen)

Gambar 3.4 menunjukkan bahwa Riau adalah Provinsi dengan kontribusi terbesar di Subsektor Kehutanan dan Logging, diikuti oleh Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah. Munculnya Jawa Timur sebagai Provinsi yang menyumbang PDB kehutanan terbesar kedua setelah Riau cukup mengejutkan. Besarnya kontribusi Provinsi Jawa Timur dalam PDB Kehutanan diduga disebabkan oleh semakin meningkatnya produksi kayu dari Hutan Rakyat serta tumbuhnya industri perkayuan primer yang berorientasi ekspor, seperti *Barcore.* Hal yang serupa mungkin terjadi di Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat masuk dalam enam provinsi dengan kontribusi PDB Kehutanan terbesar di Indonesia tahun 2019. Sedangkan persentase kontribusi subsektor Kehutanan dan Logging di 34 Provinsi terhadap PDB Kehutanan Nasional Tahun 2020 disajikan pada Gambar 3.5.

Gambar 3.5 menunjukkan bahwa posisi Riau sebagai Provinsi dengan kontribusi terbesar di Subsektor Kehutanan dan Logging pada tahun 2020 tidak berubah sebagaimana tahun sebelumnya. Demikian pula dengan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sementara, posisi Provinsi Kalimantan Timur yang pada tahun 2019 berada di posisi ketiga bergeser ke posisi kelima pada tahun 2020. Posisi ketiga dan keempat ditempati oleh Provinsi Sumatera

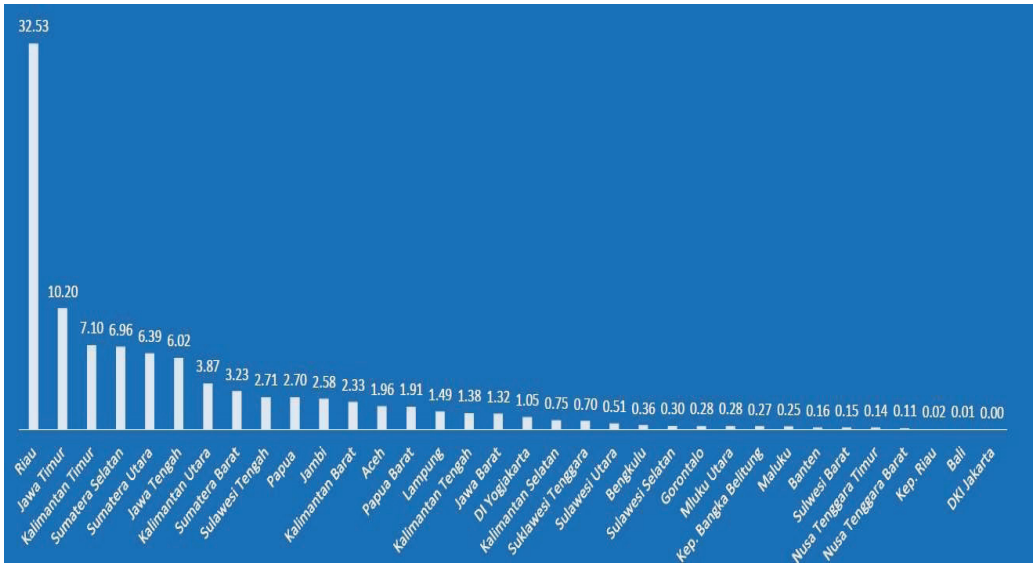

Gambar 3.3. Kontribusi Subsektor Kehutanan dan Logging di 34 Provinsi terhadap PDB Kehutanan Nasional Tahun 2019 (Persen)

Selatan dan Sumatera Utara. Posisi Jawa Timur dan Jawa Tengah yang tetap di posisi kedua dan keenam menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi berbasis kehutanan di kedua provinsi ini telah cukup mapan dan stabil dalam mendukung perekonomian di kedua provinsi.

Tabel 3.5 menunjukkan hasil penghitungan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk Produk Domestik Bruto (PDB) Satelit Kehutanan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015-2020 (miliar Rupiah).

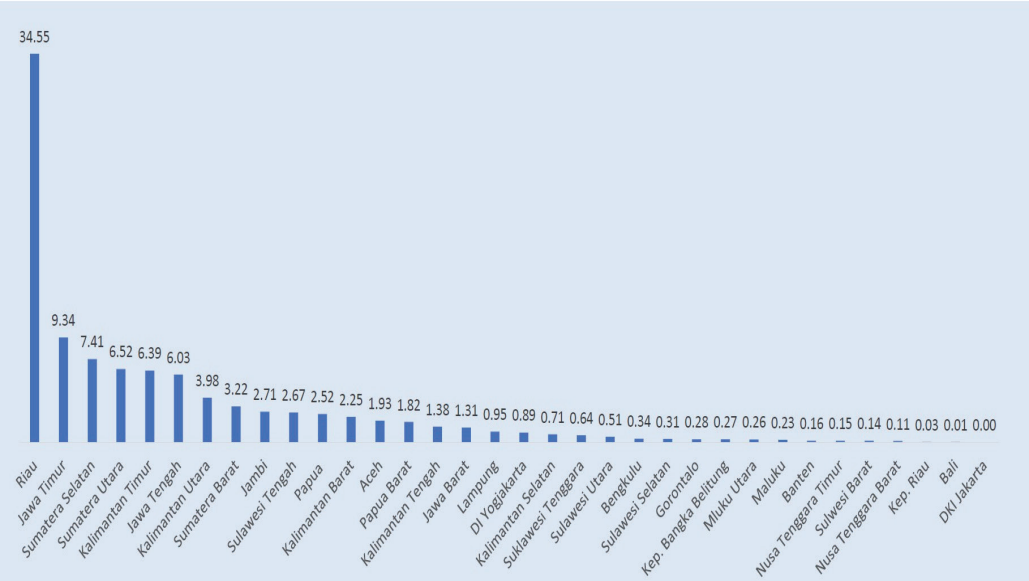

Gambar 3.4. Kontribusi Subsektor Kehutanan dan Logging di 34 Provinsi terhadap PDB Kehutanan Nasional Tahun 2020 (Persen)

Selain menghitung Produk Domestik Bruto (PDB) Satelit Kehutanan atas dasar harga konstan berdasarka nilai nominal, BPS juga melakukan penghitungan laju pertumbuhan PDB satelit kehutanan berdasarkan harga konstan tahun 2015-2020 (Tabel 3.6.)

Dari Tabel 3.6 dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 PDB Kehutanan mengalami penurunan laju pertumbuhan PDB sebesar 0,03%. Sedangkan PDB Satelit kehutanan rata-rata mengalami penurunan laju pertumbuhan PDB sebesar 0,92%. Penurunan laju pertumbuhan PDB terjadi di semua lapangan usaha kehutanan, kecuali industri kertas dan barang dari kertas yang mengalami peningkatan laju pertumbuhan 1,46%.

Gambar 3.6 menunjukkan Grafik Laju Pertumbuhan PDB Kehutanan, PDB Satelit Kehutanan, dan PDB Indonesia selama periode tahun 2016-2020 Berdasarkan Harga Konstan (Miliar Rupiah)

LAPANGAN USAHA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Kehutanan	60.623,50	60.002,00	61.279,60	62.981,80	63.217,60	63.195,90
2. Industri Pengolahan Berbasis Kehutanan	145.972,00	148.688,50	149.573,10	150.880,90	154.709,70	153.567,70
a. Industri Kayu, Barang daru Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya	60.145,20	61.200,00	61.329,90	61.846,10	59.036,70	57.770,20
b. Industri Kertas dan Barang dari Kertas	64.054,20	65.615,90	65.554,00	65.819,20	70.511,00	71.538,10
c. Industri Furnitur Berbasis Kehutanan	21.772,60	21.872,60	22.689,20	23.215,60	25.162,00	24.259,40
3. Pedagangan Hasil Kehutanan dan Hasil Industri Berbasis Kehutanan	67.268,70	68.210,50	68.745,60	69.548,40	70.216,30	69.645,50
4. Jasa Perburuan dan Jasa Kehutanan Lainnya	363,60	414,70	411,20	429,80	433,50	338,40
NTB SATELIT KEHUTANAN ATAS HARGA DASAR	274.227,80	277.315,70	280.009,50	283.840,90	288.577,10	286.747,50
5. Pajak dikurang Subsidi atas Produk Kehutanan dan Lapangan Usaha Berbasis Kehutanan	2.602,51	4.197,68	3.661,92	5.074,80	3.648,92	2.777,08
PDB SATELIT KEHUTANAN	**276.830,31**	**281.513,38**	**283.671,42**	**288.915,70**	**292.226,02**	**289.524,58**
PDB SELAIN SATELIT KEHUTANAN	**8.705.686,79**	**9.153.100,02**	**9.629.256,68**	**10.136.936,20**	**10.656.811,78**	**10.432.918,12**
PDB INDONESIA	**8.982.517,10**	**9.434.613,40**	**9.912.928,10**	**10.425.851,90**	**10.949.037,80**	**10.722.442,70**

Tabel 3.3. PDB Satelit Kehutanan Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2015- 2020 (Miliar Rupiah)

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Kehutanan	-1,03	2,13	2,78	0,37	-0,03
2. Industri Pengolahan Berbasis Kehutanan	1,86	0,59	0,87	2,54	-0,74
a. Industri Kayu, Barang daru Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya	1,75	0,21	0,84	-4,54	-2,15
b. Industri Kertas dan Barang dari Kertas	2,44	-0,09	0,40	7,13	1,46
c. Industri Furnitur Berbasis Kehutanan	0,46	3,73	2,32	8,38	-3,59
3. Pedagangan Hasil Kehutanan dan Hasil Industri Berbasis Kehutanan	1,40	0,78	1,17	0,96	-0,81
4. Jasa Perburuan dan Jasa Kehutanan Lainnya	14,05	-0,84	4,52	0,86	-21,94
NTB SATELIT KEHUTANAN ATAS HARGA DASAR	1,13	0,97	1,37	1,67	-0,63
5. Pajak dikurang Subsidi atas Produk Kehutanan dan Lapangan Usaha Berbasis Kehutanan	61,29	-12,76	38,58	-28,10	-23,89
PDB SATELIT KEHUTANAN	**1,69**	**0,77**	**1,85**	**1,15**	**-0,92**
PDB SELAIN SATELIT KEHUTANAN	**5,14**	**5,20**	**5,27**	**5,13**	**-2,10**
PDB INDONESIA	**5,03**	**5,07**	**5,17**	**5,02**	**-2,07**

Tabel 3.4. Laju Pertumbuhan PDB Satelit Kehutanan Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2015-2020 (Miliar Rupiah)

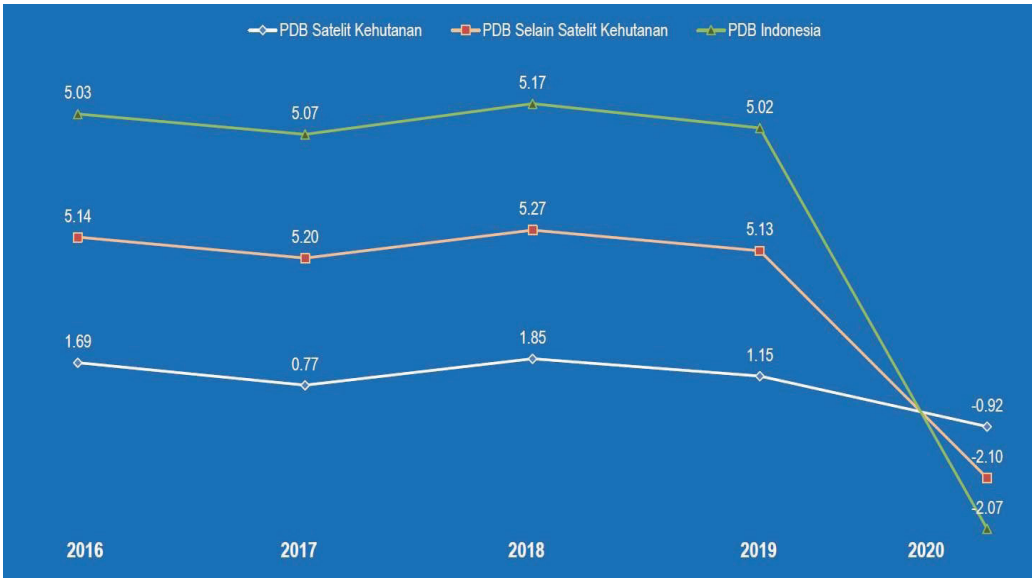

Gambar 3.4. Grafik Laju Pertumbuhan PDB Satelit Kehutanan 2016-2020 Berdasarkan Harga Konstan (Miliar Rupiah)

3.2 Evaluasi Fluktuasi PDB Kehutanan dan PDB Satelit Kehutanan

Sampai dengan Bulan Agustus 2021, telah disusun catatan-catatan fenomena ekonomi PDB Satelit Kehutanan periode 2016-2020. Adapun fenomena ekonomi yang didapatkan dalam setiap lapangan usaha PDB Satelit Kehutanan adalah sebagai berikut:

3.2.1 Fluktuasi PDB Kehutanan

Fenomena fluktuasi PDB Lapangan Usaha Kehutanan Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 3.7.

Tahun	Pertumbuhan PDB	Fenomena
(1)	(2)	(3)
2016	-1,03	Terdapat beberapa Perusahaan HTI yang dibekukan karena lahan konsesi mereka terbakar.
2017	2,13	Produksi kayu bulat dari hutan tanaman industri pada 2017 sebesar 38 juta m3 meningkat dari sebelumnya 32 juta m3 pada 2016.
2018	2,78	Produksi kayu bulat dan kinerja ekspor menunjukkan tren positif sampai akhir tahun 2018 karena perang dagang Amerika Serikat dengan China, yang potensial membuka pasar ekspor ke Amerika Serikat.
2019	0,37	1. Terdapat kenaikan produksi Hasil Hutan Bukan Kayu : Tahun 2019 produksi dari sektor non kayu naik secara signifikan yaitu sebesar 474.198 ton dari sebelumnya tahun 2018 yang hanya sebesar 329.633 ton. 2. Ekspor hasil hutan pada tahun 2019 juga sedikit meningkat yaitu senilai 11,64 miliar dolar Amerika, sedangkan tahun 2018 senilai 11,27 miliar dolar Amerika.
2020	-0,03	Kemungkinan pengaruh pandemic COVID-19

Tabel 3.5. Fenomena PDB Lapangan Usaha Kehutanan 2016-2020

3.2.2 Fluktuasi PDB Industri Berbasis Kehutanan: Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya

Fenomena PDB Lapangan Usaha Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 3.8.

Tahun	Pertumbuhan PDB	Fenomena
(1)	(2)	(3)
2016	2,44	1. Pada 2016, industri pulp dan kertas menyumbang USD 3,79 miliar pada pendapatan nasional. Disamping itu, industri kertas juga menyerap lebih dari 260.000 tenaga kerja Indonesia. 2. Meningkatnya ekspor pulp (3,88 persen), kertas tissue (18,05 persen), dan kertas lainnya (3,90 persen)
2017	-0,09	1. Produksi kertas turun 5,19 persen (Laporan Keuangan Tjiwi Kimia) 2. Menurunnya ekpor kertas khusus sebesar 18,79 persen
2018	0,40	1. Produksi kertas turun 0,26 persen serta produksi kertas industri turun 24,04 persen (Laporan Keuangan Tjiwi Kimia) 2. Produksi bubur kertas turun 9,37 persen serta produksi kertas industri turun 1,83 persen (Laporan Keuangan Indah Kiat) 3. Menurunnya ekspor pulp sebesar 7,33 persen serta menurunnya ekspor kertas khusus sebesar 13,10 persen
2019	7,13	1. Produksi kertas industri dan lainnya tumbuh 89,15 persen (Laporan Keuangan Tjiwi Kimia) 2. Produksi kertas budaya tumbuh 4,05 persen serta produksi tissue tumbuh 500 persen (Laporan Keuangan Indah Kiat) 3. Meningkatnya ekspor pulp (24,33 persen), kertas tissue (26,82 persen), kertas dan papan kertas bergelombang (10,07 persen) serta kertas lainnya (5,41 persen)
2020	1,46	1. Meningkatnya produksi pulp (17,90 persen), kertas industri (7,32 persen), serta kertas tissue (23,21 persen) (Laporan Keuangan INKP) 2. Meningkatnya produksi kertas budaya (26,10 persen) (Laporan Keuangan TJIWI KIMIA) 3. Produksi kertas industri secara volume meningkat 3,86% (Laporan Keuangan Fajar Surya Wisesa) 4. Produksi pulp secara volume meningkat 11,22% (Laporan Keuangan Toba Pulp) 5. Produksi tissue secara volume meningkat 3,18% (Laporan Keuangan Suparma Tbk)

Tabel 3.6. Fenomena PDB Lapangan Usaha Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya Tahun 2016-2020

3.2.3 Fluktuasi Industri Kertas dan Barang dari Kertas

Fenomena PDB Lapangan Usaha Industri Kertas dan Barang dari Kertas Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 3.9.

Tahun	Pertumbuhan PDB	Fenomena
(1)	(2)	(3)
2016	2,44	1. Pada 2016, industri pulp dan kertas menyumbang USD 3,79 miliar pada pendapatan nasional. Disamping itu, industri kertas juga menyerap lebih dari 260.000 tenaga kerja Indonesia. 2. Meningkatnya ekspor pulp (3,88 persen), kertas tissue (18,05 persen), dan kertas lainnya (3,90 persen)
2017	-0,09	1. Produksi kertas turun 5,19 persen (Laporan Keuangan Tjiwi Kimia)
		2. Menurunnya ekpor kertas khusus sebesar 18,79 persen
2018	0,40	1. Produksi kertas turun 0,26 persen serta produksi kertas industri turun 24,04 persen (Laporan Keuangan Tjiwi Kimia)
		2. Produksi bubur kertas turun 9,37 persen serta produksi kertas industri turun 1,83 persen (Laporan Keuangan Indah Kiat)
		3. Menurunnya ekspor pulp sebesar 7,33 persen serta menurunnya ekspor kertas khusus sebesar 13,10 persen
2019	7,13	1. Produksi kertas industri dan lainnya tumbuh 89,15 persen (Laporan Keuangan Tjiwi Kimia)
		2. Produksi kertas budaya tumbuh 4,05 persen serta produksi tissue tumbuh 500 persen (Laporan Keuangan Indah Kiat)
		3. Meningkatnya ekspor pulp (24,33 persen), kertas tissue (26,82 persen), kertas dan papan kertas bergelombang (10,07 persen) serta kertas lainnya (5,41 persen)
2020	1,46	1. Meningkatnya produksi pulp (17,90 persen), kertas industri (7,32 persen), serta kertas tissue (23,21 persen) (Laporan Keuangan INKP)
		2. Meningkatnya produksi kertas budaya (26,10 persen) (Laporan Keuangan TJIWI KIMIA)
		3. Produksi kertas industri secara volume meningkat 3,86% (Laporan Keuangan Fajar Surya Wisesa)
		4. Produksi pulp secara volume meningkat 11,22% (Laporan Keuangan Toba Pulp)
		5. Produksi tissue secara volume meningkat 3,18% (Laporan Keuangan Suparma Tbk)

Tabel 3.7. Fenomena PDB Lapangan Usaha Industri Kertas dan Barang dari Kertas Tahun 2016-2020

3.2.4 Fluktuasi PDB Industri Furnitur

Fenomena PDB Lapangan Usaha Industri Furnitur Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 3.10.

Tahun	Pertumbuhan PDB	Fenomena
(1)	(2)	(3)
2016	0,46	
2017	3,73	1. Peningkatan Permintaan Ekspor Furniture di Beberapa Negara Tujuan walaupun belum sebaik tahun 2015 sebesar 1,63 milliar US$ 2. Penjualan sektor manufaktur PT Integra Indocabinet Tbk (WOOD): 1. Ekspor (share: 72,50%): 17,66% 2. Domestik (share: 27,50%): 49,80% 3. Total: 25,04% Penjualan industri furnitur mengalami kenaikan sebesar 25.04% pada tahun 2017 dikarenakan terdapat kenaikan pada kuantitas penjualan lokal untuk project Wisma Atlet Kemayoran dan peningkatan kuantitas ekspor atas building component, knock down dan set up. (Laporan Keuangan PT. Integra Kabinet Tbk -WOOD)
2018	2,32	1. Kinerja ekspor furniture sedikit terkoreksi walaupun tidak sebaik di tahun 2017 dengan total pembukuan sebesar 1,49 miliar US$ 2. Penjualan sektor manufaktur PT Integra Indocabinet Tbk (WOOD): 1. Ekspor (share: 79,08%): 16,23% 2. Domestik (share: 20,92%): -18,95% 3. Total: 6,55%
2019	8,38	Penjualan sektor manufaktur PT Integra Indocabinet Tbk (WOOD): 1. Ekspor (share: 69,77%): 0,33% 2. Domestik (share: 30,23%): 64,34% 3. Total: 13,72% Alasan: Penjualan segmen Manufaktur di tahun 2019 yang mengalami kenaikan penjualan tertinggi sebesar 13,72% merupakan dampak dari penerapan tarif bea masuk dan awal penerapan anti-dumping duty dan anti-subsidy duty terhadap produk-produk dari China oleh Amerika Serikat sehingga permintaan terhadap produk Perseroan meningkat
2020	-3,59	Penjualan sektor manufaktur PT Integra Indocabinet Tbk (WOOD): 1. Ekspor (share: 82,10%): 72,04% 2. Domestik (share: 17,90%): -13,44% 3. Total: 46,20% Alasan: Peningkatan penjualan segmen Manufaktur yang mencatat pertumbuhan 46,2% didorong oleh tingginya permintaan ekspor.

Tabel 3.8. Fenomena PDB Lapangan Usaha Industri Furnitur Tahun 2016-2020

BAB 4

Analisis Potensi HBBK dan Jasa Lingkungan

Berdasarkan hasil kajian Penyusunan PDB *Satellite* Kehutanan tahun 2020, kontribusi PDB *Satellite* Kehutanan menyumbang 2,75% dari total nilai tambah dari total PDB Indonesia, meningkat 2,05% dari PDB konvensional. Nilai 2,75% diperoleh dari penjumlahan PDB Subsektor Kehutanan Konvensional ditambah PDB Industri Berbasis Kehutanan dan PDB Perdagangan yang berkaitan dengan produk kehutanan. Namun, mengingat potensi kekayaan hutan Indonesia dan beberapa hal yang terekam dalam pencatatan konvensional maupun *satellite*, diduga dengan kuat bahwa ada beberapa potensi hutan yang masih belum terhitung dan berpeluang untuk dimasukkan sebagai penyumbang kontribusi terhadap PDB Nasional.

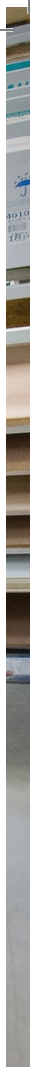

Minimnya peranan PDB *Satellite* Kehutanan yang hanya menyumbang kontribusi 2,75% dari total PDB Indonesia, sekurang-kurangnya disebabkan karena dua hal, yakni :

1. Pertama, cakupan ruang lingkup pengukurannya terbatas pada kegiatan kehutanan yang konvensional seperti produksi kayu bulat dan produk/hasil hutan lainnya, industri berbasis produk kehutanan, dan perdagangan produk/hasil hutan.
2. Kedua, metode penyusunan PDB itu sendiri menggunakan kaidah SNA (*System of National Account*) yang berlaku secara internasional. Metode ini hanya mengukur transaksi ekonomi di dalam lingkup kegiatan ekonomi, sehingga jika berbicara mengenai hutan, maka sudut pandangnya adalah sebagai sumber daya alam yang interaksinya dengan lingkup kegiatan ekonomi yang menciptakan manfaat ekonomi secara langsung/menghasilkan nilai tambah saja.

Keterbatasan ruang lingkup pengukuran kajian Penyusunan PDB *Satellite* Kehutanan bisa dicermati dengan tidak masuknya kontribusi yang berasal dari jasa ekosistem hutan untuk menopang kesejahteraan masyarakat, dan peran hutan dalam mempertahankan mata pencaharian masyarakat. Hutan juga memproduksi energi biomasa yang potensial untuk dihitung, Badan Energi Internasional (IEA) (2007) mencatat bahwa energi biomassa diperkirakan menyumbang 10 persen dari energi primer dunia pada tahun 2004 sebesar 45 $\pm$ 10 ExaJoule (EJ), dimana 20 – 30 % disumbang Negara Dunia Ketiga. Selain itu, sampai saat ini nilai tambah yang dihasilkan dari cadangan karbon di hutan juga perlu dikaji untuk dimasukkan sebagai kontributor pada PDB Subsektor. Pijakan legalitas kajian tersebut bisa dilakukan melalui Permenhut No. P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata cara perizinan usaha pemanfaatan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon pada hutan produksi dan hutan lindung.

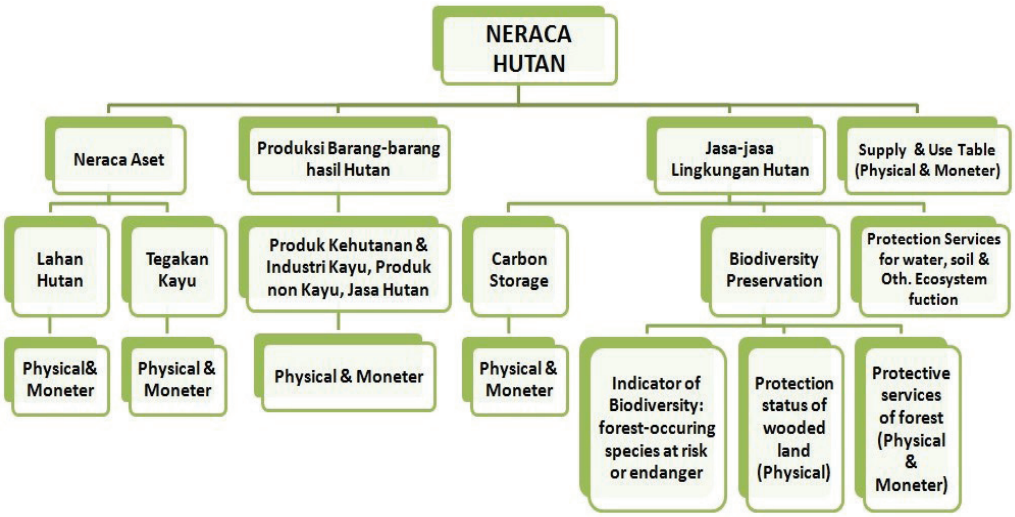

Gambar 4.1. Neraca Ekonomi Sumber Daya Hutan

Pada permasalahan kedua di atas, anggapan bahwa pengukuran PDB itu sendiri kurang tepat, didasari pada pemakaian metode penghitungan SNA hanya berfokus pada aliran transaksi barang dan jasa (produk) di dalam ekonomi. Sedangkan menurut tinjauan manual *System of Environmental and Economic Account* (SEEA), yang merupakan salah satu neraca satelit dari SNA, disamping aliran produk di dalam ekonomi, terjadi pula aliran produk antara ekonomi dan lingkungan, dan sebaliknya, serta aliran produk di dalam lingkungan itu sendiri. Aliran produk dari lingkungan ke dalam ekonomi menggambarkan lingkungan sebagai pemilik aset alami (*non-produced asset*) yang menyediakan bahan baku alam (*natural inputs*) yang menjadi input dalam ekonomi, dan sebaliknya lingkungan menampung residu dan limbah dari kegiatan produksi. Hal ini diperkuat oleh kajian Glenn Marie Lange (2004) yang menyusun neraca penghitungan PDB Kehutanan menjadi empat bagian besar, yaitu: neraca asset, produksi barang-barang hasil hutan, jasa-jasa lingkungan hutan, dan *supply & usable*.

Kegiatan ekonomi membutuhkan input atau masukan yang melibatkan penggunaan aset. Banyak dari aset ini berasal dari proses produksi (bangunan, mesin, kendaraan, dsb.) atau proses alam (tanah, hutan,

sumber daya mineral, sumber daya air, dsb.). Baik manufaktur maupun aset alam memberikan masukan bagi proses produksi barang dan jasa. Hutan rumah bagi lebih dari 50% spesies darat (Shvidenko et al. 2005), memainkan peran penting dalam perlindungan daerah aliran sungai dan pengendalian iklim (jasa ekosistem) dan memiliki peran penting baik secara kultura dan simbolik. Jasa ekosistem hutan digolongkan dalam empat kelompok:

(i) Jasa *provisioning*
: hutan sebagai penyedia kayu

(ii) Jasa *regulatory*
: hutan sebagai penyerap karbon

(iii) Jasa pendukung
: hutan menjaga ketahanan formasi tanah

(iv) Jasa *cultural*: jasa wisata menikmati keindahan hutan taman nasional Sementara ini, belum ada metode pasti untuk mengukur nilai jasa ekosistem hutan di tingkat global, namun prediksi konservatif cenderung mendapatkan hasil pengukuran yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa mengukur jasa ekosistem penting untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan atas tanah dan penggunaan sumberdaya hutan.

Selain itu, lapangan kerja yang tersedia oleh hutan memiliki nilai yang signifikan. FAO (2010) menyebutkan di seluruh dunia, sekitar 10 juta orang bekerja di bidang manajemen hutan dan konservasi, serta dipastikan lebih banyak lagi oran yang bergantung hidupnya pada sumberdaya hutan. Total pekerja formal di sektor industri pengolahan primer, pulp dan kertas, serta industri furnitur sekitar 18,2 juta orang (Nair dan Rutt, 2009). Tenaga kerja informal di sektor kehutanan, yaitu tenaga kerja yang tidak memiliki jaminan perlindungan sosial untuk dirinya dan keluarganya, jumlahnya cukup banyak, sekitar 0,4 persen dari angkatan kerja global (FAO, 2009). Apalagi sejumlah masyarakat adat yang bergantung pada hutan serta masyarakat yang berkecimpung dalam *agroforestry*, jumlahnya diperkirakan melebihi pekerja di sektor kehutanan formal. *Agroforestry* dapat menjadi opsi untuk meningkatkan manfaat hutan bagi masyarakat di sekitarnya.

Usaha untuk memasukkan jasa ekosistem hutan merupakan salah satu aspek dari ekonomi hijau (*greening the economy*). *Greening the economy* menyiratkan upaya mengelola dan berinvestasi dalam sektor kehutanan sebagai aset alam yang menghasilkan berbagai macam manfaat bagi

masyarakat. Peran ekonomi yang lebih luas dari hutan dalam ekonomi hijau meliputi: sebagai pabrik produksi (memproduksi barang dari kayu, bahan untuk makanan dan obat-obatan herbal), infrastruktur ekologi (memproduksi barang publik dari regulasi iklim terhadap sumber daya air), dan sebagai penyedia layanan keanekaragaman hayati hutan (biodiversity).

Kehutanan dalam ekonomi hijau juga akan memenuhi kebutuhan mata pencaharian masyarakat setempat dengan menyediakan kayu bakar, bahan bangunan, sumber makanan dan tanaman obat. Kontrol lokal yang efektif dan pengelolaan hutan perlu ditingkatkan, tetapi pemerintah akan memastikan ada insentif ekonomi yang lebih besar untuk melakukannya. Insentif ini akan muncul dari suatu sistem yang kuat dan adil yang menjamin hutan sebagai barang publik, terutama penyimpanan karbon dan konservasi keanekaragaman hayati. Ini bisa dilakukan melalui mekanisme *polluters – pay – more* atau pajak lingkungan, yaitu pihak yang mengeksploitasi hutan secara masif diharuskan membayar sejumlah uang untuk mengkompensasi masyarakat lokal yang menjaga kelestarian hutan yang terdampak oleh eksploitasi hutan tersebut. Hutan juga akan menarik minat dari lembaga keuangan dengan menganggap hutan sebagai aset ekonomi baru. Interaksi antara subyek dan obyek dalam matriks pemanfaatan jasa lingkungan ditampilkan dalam Tabel 4.1.

Jenis	Produk	Produsen	Pemanfaat JLH	Mekanisme Imbal Jasa
1. Jasa Perlindungan Tata Air	1. Aliran Air 2. Persediaan Air (Kualitas & Kuantitas) 3. Habitat Aquatik	1. Pemilik / Pengelola Hutan 2. Penyelamat Lingkungan 3. Pendamping masyarakat yang terlibat dalam 1 + 2	Pengguna air : • PLTA • PDAM • Air Irigasi / Pertanian • Perikanan • Perhubungan • Industri Air Kemasan • Air Rumah Tangga • Wisata Arung Jeram	1. Regulasi oleh Pemerintah 2. Willingness to pay 3. Benefit sharing
2. Jasa Penyedia Keindahan Bentang Alam (*Scenic Beauty*)	1. Iklim mikro 2. Pemandangan alam 3. Nilai cultural/ historis	1. Pemilik / Pengelola Hutan 1. Penyelamat Lingkungan 2. Pendamping masyarakat yang terlibat dalam 1 + 2	Pengguna jasa penyedia keindahan bentang alam : • Wisata Alam • Wisata Pendidikan Lingkungan • Wisata Religi • Industri Perhotelan • Industri Restoran, dll	1. Tiket masuk 2. Regulasi oleh Pemerintah 3. Willingness to pay
3. Jasa Penyerapan dan Penyimpan Karbon	1. Carbon 2. Oxygen	1. Pemilik / Pengelola Hutan 2. Penyelamat Lingkungan 3. Pendamping masyarakat yang terlibat dalam 1 + 2	• Annex I Countries • Masyarakat Industri yang menghasilkan polusi • Masyarakat lainnya yang peduli lingkungan	1. CDM (*Kyoto protocol*) 2. Willingness to pay (non Kyoto protocol) 3. Mekanisme investasi (non Kyoto protocol)
4. Jasa Penyedia dan Perlindungan Keanekaraga- man Hayati	1. Flora/Fauna untuk kesenangan 2. Flora/Fauna sumber genetik 3. Flora/Fauna + Jasad Renik sebagai materi biofarmaka 4. Flora/Fauna + Jasad Renik sebagai materi biokosmetika 5. Flora/Fauna sebagai bahan pangan	1. Pemilik / Pengelola Hutan 2. Penyelamat Lingkungan 3. Pendamping masyarakat yang terlibat dalam 1 + 2	• Bisnis Research and Development • Industri farmasi • Industri kosmetika • Bisnis flora - fauna	1. Pembayaran atas paten 2. Bagi hasil 3. Willingness to pay 4. Regulasi oleh Pemerintah 5. Mekanisme pasar murni

Tabel 4.1. Matriks Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan (JLH)

Seiring berkembangnya pemahaman yang lebih baik dan pengakuan hutan sebagai barang publik, maka menjadi sangat penting bagi pengelola hutan dan pemerintah untuk menjelaskan secara lebih efektif dan transparan nilai dari hutan. Hal ini memerlukan kemampuan untuk mengukur dan menilai kontribusi sektor kehutanan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan cara yang lebih canggih dan menangkap berbagai macam barang yang dipasarkan, non-dipasarkan, dan jasa yang berkontribusi signifikan. Masuknya beberapa hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan terpinggirkan yang ada di sekitar hutan.

Sebagai barang publik, penting untuk dipahami bahwa sebagian besar jasa lingkungan tidak dapat dikesampingkan (*nonexcludable*). Artinya, tidak ada perbedaan dalam penggunaan sumber daya oleh konsumen, baik yang memenuhi kualifikasi maupun yang tidak memenuhi kualifikasi. Semua konsumen berhak untuk menerima dan menikmati barang dan jasa yang *nonexcludable*. Beberapa jasa lingkungan lainnya bersifat *excludable*, sehingga diperlukan kualifikasi tertentu untuk dapat menggunakannya. Contoh paling sederhana adalah layanan pengelolaan air yang dapat bersifat *nonexcludable dan pada sisi lain excludable*. Tidak dapat dipungkiri bahwa air sungai digunakan sebagai sarana transportasi dan irigasi

bersifat *nonexcludable*, dan siapa saja dapat menggunakannya secara gratis. Air sungai yang diolah untuk keperluan rumah tangga oleh Perusahaan Air Minu (PAM) sekarang sifatnya *excludable*. Hanya orang yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat memanfaatkan air tersebut.

Pemahaman terkait sifat jasa lingkungan sangat penting, terutama ketika menentukan mekanisme imbal jasa lingkungan. Dalam contoh di atas, mekanisme pasar tidak berlaku untuk penggunaan air untuk transportasi dan irigasi. Namun mekanisme pasar berlaku untuk penggunaan air bersih olahan. Penghitungan manfaat hutan sebagai penyedia jasa lingkungan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih tinggi dalam perekonomian dengan mengetahui berbagai kemampuannya dalam menyediakan sumberdaya air, penyerap karbon, penghasil oksigen, jasa wisata alam, perlindungan satwa, biodiversitas dan sebagainya. Hutan sebagai penyedia sumberdaya air menyediakan manfaat lingkungan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, antara lain jasa peredam banjir, erosi dan sedimentasi tanah, serta jasa pengendalian tata air. Terhadap peran ganda produk kehutanan tersebut, maka imbal jasa yang diperoleh semestinya bisa dioptimalkan. Pada saat produk utama kehutanan adalah barang yang *excludable*, misalnya kayu, maka jasa produk lain yang sifatnya *nonexcludable* seperti penyerapan CO2 dapat turut dimasukkan dalam komponen harga produk yang bersifat *excludable* tadi.

Tidak semua jasa lingkungan dialokasikan melalui mekanisme pasar, sehingga intervensi regulasi sangat dibutuhkan. Untuk meningkatkan kontribusi kehutanan terhadap PDB, penting untuk menerapkan Peraturan Menteri Kehutanan No. S.36/MenhutII/2009 dengan menyederhanakan prosedur perizinan pemanfaatan jasa lingkungan. Proses pemanfaatan jasa lingkungan semestinya *embedded* dengan izin pemanfaatan hutan produksi, sehingga pemberian izin diberikan dalam satu kesatuan ekosistem, bukan berdasarkan komoditi. Manfaat hasil hutan semakin dapat ditingkatkan dengan fleksibilitas pemilik untuk mengelola ekosistem hutan produksi dengan lebih kreatif. Pada saat bersamaan, potensi kerugian negara dapat diminimalisir akibat hasil pemanfaatan hutan produksi dengan satu komoditi (kayu misalnya), bisa jadi lebih rendah dibandingkan jika berbagai komoditi dalam ekosistem dapat dimanfaatkan secara bersamaan.

BAB 5

Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

5.1 Kesimpulan

1. Penyempurnaan penyusunan PDB Satelit Kehutanan dari hulu sampai hilir beserta distribusinya, menyebabkan meningkatnya kontribusi subsektor kehutanan sekitar tiga kali lipat, yaitu dari sekitar 0,70 persen menjadi 2,75 persen pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh adanya tambahan kontribusi dari industri berbasis kehutanan sebesar 1,21 persen, perdagangan produk kehutanan sebesar 0,64 persen, dan pajak bersih produk kehutanan dan lapangan usaha berbasis kehutanan 0,03%. Sementara kontribusi jasa perburuan dan jasa lainnya tidak menunjukkan perubahan yang signifikan,

2. Laju pertumbuhan Industri Berbasis Kehutanan lebih cepat dibandingkan Subsektor Kehutanan sebagai kegiatan ekonomi yang menjadi penyedia bahan bakunya pada tahun 2020.
3. Laju pertumbuhan implisit untuk Industri Berbasis Kehutanan, Perdagangan Produk Kehutanan dan Subsektor Kehutanan lebih rendah bila dibandingkan laju pertumbuhan implisit PDB Indonesia.
4. Naik turunnya pertumbuhan Industri Berbasis Kehutanan, Perdagangan Produk Kehutanan dan Subsektor Kehutanan pada level 5 dijit KBLI selain dari pertumbuhan establishment industri itu sendiri, juga berasal dari migrasi komoditi-komoditi yang sejenis yang berasal dari KBLI lain sebagai hasil proses *Transfer In Transfer Out* (TITO). Hal ini menyebabkan pertumbuhan yang terjadi pada suatu industri dengan kode 5 dijit KBLI tertentu menjadi sangat fluktuatif.

5.2 Rekomendasi Kebijakan

1. Penyempurnaan penyusunan PDB *Satellite* Kehutanan menurut binaan KLHK perlu dikembangkan cakupannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama pada peran hutan terhadap jasa lingkungan dan hasil hutan non kayu. Komunikasi intensif lintas Kementerian/Lembaga perlu dibangun, sehingga perluasan cakupan tersebut secara terbuka memperoleh pengakuan.
2. Perlunya percepatan penerbitan izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Tanaman Industri (HTI), dan mendorong pembangunan Hutan Rakyat (HR) sebagai salah satu faktor penting yang mampu meningkatkan *activity based* yang menghasilkan nilai tambah bagi sub sektor kehutanan. Dalam konteks ini, pembangunan hutan tanaman merupakan kegiatan berbasis lahan yang selain memproduksi kayu, juga berpotensi besar untuk menghasilkan produksi non kayu, seperti kegiatan agroforestry.
3. Untuk mengoptimalkan kontribusi pemanfaatan jasa lingkungan bagi peningkatan PDB Kehutanan, diperlukan proses penyederhanaan perizinan terhadap pemanfaatan jasa lingkungan, yang semestinya melekat dengan izin pemanfaatan hutan produksi dalam satu kesatuan ekosistem, bukan berdasarkan komoditi.
4. Dalam rangka memberikan informasi yang valid kepada publik tentang kontribusi sub sektor kehutanan, maka penyusunan *Satellite Account* PDB Kehutanan yang menjadi binaan KLHK perlu diperkuat dan dipayungi oleh peraturan dalam bentuk Keputusan Presiden.

Daftar Pustaka

FAO, 2009. *State of the World's Forest 2009*. FAO. Rome, Italy.

-------, 2010. *Global Forest Resources Assessment 2010. Main Report*. FAO. Rome, Italy.

IEA, 2007. *Potential Contribution of Bioenery to the World's Future Energy Demand*.

IEA Bioenergy Report 2007.

Kementerian Kehutanan, 2011. Road Map Pembangunan Industri Kehutanan Berbasis Hutan Tanaman. Jakarta.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021. Statistik Kehutanan Indonesia 2020. Jakarta.

Landell-Mills, N. and I. Porras. 2002. Silver Bullet or Fools' Gold. *A Global Review of Markets for Environmental Services and Their Impact on the Poor*. London : Intenational Institute for Environment and Development.

Lange, G. 2004. *Manual for Environmental amd Economic Accounts for Forestry : A Tool for Cross-Sectoral Policy Analysis*. Working Paper of Forestry Department, FAO. Rome, Italy.

Nair, CTS. and Rutt, R.. 2009. *Creating Forestry Jobs to Boost the Economy and Build A Green Future*. Paper presented at the nineteenth session of the FAO Committee on Forestry, 2009. Rome , Italy.

Shvidenko, A., C.V. Barber and R. Persson, 2005: *Forest and woodland systems. Ecosystems and Human Well-being*: Volume 1: Current State and Trends, R. Hassan, R. Scholes and N. Ash, Eds., Island Press, Washington, District of Columbia.

SHARP

Lampiran

Lampiran 1. Deskripsi 5 Digit KBLI Industri Berbasis Kehutanan

No.	KBLI	Deskripsi
1.	**16101**	**Industri Penggergajian Kayu** Kelompok ini mencakup usaha penggergajian, penyerutan, pengirisan, pengulitan dan pemotongan kayu gelondongan menjadi balok, kaso (usuk), reng, papan dan sebagainya. Termasuk industri kayu untuk bantalan rel kereta, kayu untuk lantai dan wol kayu, tepung kayu, irisan dan partikel kayu.
2.	**16102**	**Industri Pengawetan Kayu** Kelompok ini mencakup usaha pengawetan kayu dengan cara pengeringan kayu, pengolahan kimia dan perendamankayu dengan bahan pengawet atau bahan lainnya.
3.	**16103**	**Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan Sejenisnya** Kelompok ini mencakup usaha pengawetan rotan, bambudan sejenisnya.
4.	**16104**	**Industri Pengolahan Rotan** Kelompok ini mencakup usaha pengolahan rotan menjadi bahan setengah jadi, seperti rotan poles, hati rotan dan kulit rotan.
5.	**16211**	**Industri Kayu Lapis** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kayu lapis biasa, seperti kayu lapis tripleks, multipleks, kayu lapis interior, eksterior dan sejenisnya. Termasuk juga kayu lapis konstruksi, seperti kayu lapis cetak beton, kayu lapis tahan air dan sejenisnya.

No.	KBLI	Deskripsi
6.	**16212**	**Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk *DecorativePlywood*** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kayu lapis yang dilaminasi, seperti *teak wood, rose wood, polyester plywood* dan sejenisnya. Termasuk juga bambu lapis yang dilaminasi.
7.	**16213**	**Industri Panel Kayu Lainnya** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel kayu lainnya, seperti *block board, particle board, chip board, laminboard, fibre board, Medium Density Fibreboard* (MDF) dan sejenisnya.
8.	**16214**	**Industri *Veneer*** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan serutan pelapis (*veneer*) dengan cara pengupasan (*rotary*), penyayatan (*slicer*) dan sejenisnya.
9.	**16221**	**Industri Barang Bangunan dari Kayu** Kelompok ini mencakup usaha pengerjaan kayu untuk bahan bangunan, seperti balok, kaso, rangka atap, *dowels*, *moulding*, kusen, lis, daun pintu/jendela, tiang penopang yang dibuat dari kayu, lantai/lantai dari papan yang bergambar (lantai hias) atau kepingan atau potongan lantai dan lainnya yang terpasang menjadi panel, langit-langit, atap, kerei, tangga dari kayu dan susurannya, manik-manik dari kayu dan papan penghias tembok dan papan nama dan pengerjaan kayu untuk bahan bangunan lainnya. Termasuk industri rumah bergerak dan partisi kayu (tidak termasuk penyekat ruangan yang berdiri sendiri/furnitur).
10.	**16222**	**Industri Bangunan Prafabrikasi dari Kayu** Kelompok ini mencakup usaha pengerjaan kayu untuk bangunan prafabrikasi. Termasuk kegiatan pemasangan konstruksi bangunan prafabrikasi.

No.	KBLI	Deskripsi
11.	**16230**	**Industri Wadah dari Kayu** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam wadah atau peti/kotak dari kayu untuk pengemasan, seperti kotak kemas, boks, peti kayu, drum kayu dan kemasan sejenisnya dari kayu; palet (*pallets*), kotak palet dan papan muat dari kayu lainnya; barel, tong, ember dan produk dari kayu lainnya; dan gulungan kawat dari kayu.
12.	**16291**	**Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macamtikar, *webbing lampit,* tas, topi, tampah, kukusan, bakul, kipas, tatakan, bilik/gedek dan sejenisnya yang bahan utamanya dari rotan atau bambu.

Tabel 1. PDB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 - 2021 (Triwulan III)

(Persen)

KATEGORI	LAPANGAN USAHA		Tahun											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**	2021***
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		956.119,7	1.058.245,3	1.152.262,1	1.275.048,4	1.409.655,7	1.555.207,0	1.671.597,8	1.787.963,2	1.900.621,7	2.012.742,8	2.115.086,1	618.569,4
	1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	754.434,4	832.513,6	902.125,9	994.778,4	1.089.549,7	1.183.968,6	1.266.865,4	1.347.526,2	1.417.316,9	1.488.985,7	1.574.977,4	474.029,0
		a. Tanaman Pangan	253.326,6	270.977,4	305.670,5	332.111,9	343.252,3	397.408,6	425.185,6	438.889,5	449.553,1	446.497,3	473.953,8	117.136,0
		b. Tanaman Hortikultura	110.395,3	125.286,1	125.107,9	137.368,8	160.568,6	174.453,2	187.402,6	197.325,6	218.713,2	238.830,5	250.457,8	69.304,1
		c. Tanaman Perkebunan	268.207,3	303.402,9	323.361,6	358.172,4	398.260,7	405.291,5	428.782,6	471.466,4	489.185,6	517.507,8	560.202,2	210.737,6
		d. Peternakan	108.399,9	117.256,6	130.614,2	147.981,9	167.008,0	184.151,5	201.123,5	213.780,8	232.274,7	256.849,6	260.189,6	67.938,4
		e. Jasa Pertanian dan Perburuan	14.105,3	15.590,6	17.371,7	19.143,4	20.460,1	22.663,8	24.371,1	26.063,9	27.590,3	29.300,5	30.174,0	8.912,9
	2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	58.125,9	62.247,7	65.882,2	69.599,2	74.618,0	82.321,8	87.542,4	91.609,4	97.396,8	104.121,9	108.639,8	29.372,7
	3	Perikanan	143.559,4	163.484,0	184.254,0	210.670,8	245.488,0	288.916,6	317.190,0	348.827,6	385.908,0	419.635,2	431.468,9	115.167,7
B	Pertambangan dan Penggalian		718.128,6	924.813,4	1.000.307,6	1.050.745,8	1.039.423,0	881.694,1	890.868,3	1.029.554,6	1.198.987,1	1.149.913,5	993.541,9	413.148,1
	1	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	336.169,7	444.067,8	492.894,2	520.088,1	509.783,3	384.515,9	364.985,6	391.449,9	460.169,9	439.602,8	332.559,6	119.822,2
	2	Pertambangan Batubara dan Lignit	160.732,5	253.025,5	270.519,1	282.193,1	259.766,6	229.973,9	231.697,8	323.364,5	401.276,9	368.890,5	283.194,7	173.456,9
	3	Pertambangan Bijih Logam	109.244,2	104.283,9	100.844,8	98.468,4	93.615,2	74.264,2	73.301,0	94.322,3	111.321,4	96.824,6	130.956,9	55.701,5

KATEGORI	LAPANGAN USAHA		Tahun											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**	2021***
	4	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	111.982,2	123.436,2	136.049,5	149.996,2	176.257,9	192.940,1	220.883,9	220.417,9	226.218,9	244.595,6	246.830,7	64.167,5
C	Industri Pengolahan		1.512.760,8	1.704.250,5	1.848.150,9	2.007.426,8	2.227.584,0	2.418.891,7	2.545.203,6	2.739.711,9	2.947.450,8	3.119.593,8	3.068.041,7	828.448,3
	1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	233.822,2	284.098,7	298.402,9	314.215,5	337.200,6	320.845,1	286.400,0	309.372,7	332.299,0	336.672,6	307.606,4	78.982,6
	Industri Pengolahan Non Migas		1.278.938,6	1.420.151,8	1.549.748,0	1.693.211,3	1.890.383,4	2.098.046,6	2.258.803,6	2.430.339,2	2.615.151,8	2.782.921,2	2.760.435,3	749.465,7
	1	Industri Makanan dan Minuman	360.443,1	410.387,4	457.773,4	491.142,4	562.016,6	647.071,9	740.810,2	834.425,1	927.443,5	1.012.959,8	1.057.000,7	291.590,0
	2	Industri Pengolahan Tembakau	67.249,4	71.735,4	79.340,0	82.684,3	95.668,1	108.651,6	117.086,3	122.229,6	131.937,3	140.966,5	135.935,1	33.425,8
	3	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	96.306,9	108.192,1	116.557,8	129.912,0	139.031,6	139.393,6	143.545,0	150.535,3	168.545,2	200.019,4	186.626,8	45.613,3
	4	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	19.697,2	22.045,0	21.686,7	24.810,0	28.600,2	31.440,9	35.214,1	36.988,8	41.716,0	42.499,0	39.204,0	10.494,0
	5	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	56.775,1	59.501,0	60.628,6	66.958,0	76.071,9	77.993,4	80.077,6	81.580,8	83.710,0	80.319,9	78.689,2	19.623,9
	6	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	67.984,8	75.308,0	73.664,8	74.319,0	84.372,5	87.760,4	89.650,0	96.616,2	101.758,2	109.892,2	110.562,3	28.313,5
	7	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	114.332,4	124.716,9	143.460,2	157.042,1	180.037,2	209.788,2	223.404,7	236.192,9	239.678,0	265.925,1	296.710,3	87.884,6

KATEGORI	LAPANGAN USAHA		Tahun											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**	2021***
	8	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	66.763,0	72.006,0	76.425,0	76.466,3	80.262,9	85.951,4	79.100,9	85.869,6	92.662,6	87.975,4	82.856,6	21.360,8
	9	Industri Barang Galian bukan Logam	50.948,3	55.606,4	63.028,2	69.400,6	76.852,0	83.371,0	89.056,0	89.605,8	93.166,9	93.362,6	85.860,2	23.253,8
	10	Industri Logam Dasar	54.471,5	62.846,1	64.557,3	74.495,1	82.118,8	90.159,3	89.559,7	98.845,5	111.341,3	116.068,6	120.956,8	34.813,8
	11	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	130.750,5	142.059,4	162.969,7	186.194,9	198.080,6	226.678,1	241.756,5	252.870,9	257.687,0	265.384,3	252.142,8	61.794,5
	12	Industri Mesin dan Perlengkapan	23.767,2	23.376,4	24.832,1	25.504,2	33.078,8	37.287,5	40.169,5	43.093,0	47.879,6	46.982,5	43.230,6	12.042,6
	13	Industri Alat Angkutan	134.260,2	154.863,9	166.390,7	192.768,0	207.401,4	220.511,0	236.558,9	246.916,1	260.986,8	258.287,3	208.886,0	63.010,0
	14	Industri Furnitur	20.069,3	21.984,5	22.486,5	24.930,6	28.117,7	31.339,7	32.124,2	33.851,1	35.487,6	39.239,0	38.653,1	10.480,7
	15	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	15.119,7	15.523,3	15.947,0	16.583,8	18.673,1	20.648,6	20.690,0	20.718,5	21.151,8	23.039,6	23.120,8	5.764,4
D	Pengadaan Listrik dan Gas		72.549,1	91.721,9	95.637,8	98.686,8	114.905,1	129.833,7	142.344,4	162.339,8	176.640,3	185.115,3	179.741,6	47.532,2
	1	Ketenagalistrikan	58.866,5	72.815,8	73.349,8	74.358,3	84.150,8	100.645,2	112.792,3	132.975,9	144.437,1	151.975,9	150.541,1	39.731,6
	2	Pengadaan Gas dan Produksi Es	13.682,6	18.906,1	22.288,0	24.328,5	30.754,3	29.188,5	29.552,1	29.363,9	32.203,2	33.139,4	29.200,5	7.800,6
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang		5.848,5	6.208,8	6.603,8	7.209,0	7.840,6	8.546,3	8.909,4	9.438,6	10.023,6	10.736,3	11.302,8	3.001,3
F	Konstruksi		626.905,4	712.184,4	805.208,1	905.990,5	1.041.949,5	1.177.084,1	1.287.600,8	1.410.513,6	1.562.297,0	1.701.741,2	1.652.659,6	449.341,7

KATEGORI	LAPANGAN USAHA		Tahun											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**	2021***
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		923.923,8	1.066.092,1	1.138.484,4	1.261.145,6	1.419.239,4	1.532.876,7	1.635.410,4	1.768.865,2	1.931.813,0	2.060.378,8	1.995.470,1	563.512,7
	1	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	182.140,5	208.944,3	228.666,5	258.942,3	292.839,1	311.606,1	334.787,8	356.436,0	386.619,9	416.437,3	360.071,2	102.009,8
	2	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	741.783,3	857.147,8	909.817,9	1.002.203,3	1.126.400,3	1.221.270,6	1.300.622,6	1.412.429,2	1.545.193,1	1.643.941,5	1.635.398,9	461.502,9
H	Transportasi dan Pergudangan		245.375,4	276.122,4	313.156,2	375.305,9	466.968,9	578.464,3	644.993,9	735.229,6	797.777,0	881.547,5	689.700,7	168.853,5
	1	Angkutan Rel	2.374,7	2.408,3	2.782,9	3.142,5	4.227,9	6.577,3	7.319,1	9.172,0	10.462,9	12.092,1	7.789,8	1.617,3
	2	Angkutan Darat	135.485,6	148.061,6	159.225,7	190.200,7	225.881,6	281.079,1	300.985,0	328.306,7	354.035,6	390.604,4	380.884,3	102.503,1
	3	Angkutan Laut	21.715,3	24.082,7	26.614,7	30.061,9	36.074,9	39.307,3	39.907,1	41.985,8	45.108,9	50.576,3	48.614,8	12.648,2
	4	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	8.113,1	9.202,3	9.780,0	11.164,6	13.137,3	14.266,8	14.185,5	15.077,5	16.030,6	17.416,2	15.722,0	3.964,0
	5	Angkutan Udara	38.304,2	47.029,1	62.201,1	77.721,8	108.791,9	143.664,0	177.904,1	220.966,6	240.931,1	257.735,6	105.058,1	16.197,1
	6	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	39.382,5	45.338,4	52.551,8	63.014,4	78.855,3	93.569,8	104.693,1	119.721,0	131.207,9	153.122,9	131.631,7	31.923,8
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		200.281,8	224.215,3	252.612,3	289.498,3	321.062,1	341.555,8	363.055,5	387.013,1	412.709,7	440.211,2	394.230,9	97.655,8
	1	Penyediaan Akomodasi	35.764,3	41.102,4	51.052,4	63.489,0	74.255,1	80.790,5	86.421,4	91.953,3	96.571,7	99.207,5	74.700,9	16.438,6
	2	Penyediaan Makan Minum	164.517,5	183.112,9	201.559,9	226.009,3	246.807,0	260.765,3	276.634,1	295.059,8	316.138,0	341.003,7	319.530,0	81.217,2

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	Tahun											
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**	2021***
J	Informasi dan Komunikasi	256.048,1	281.777,6	311.362,4	341.009,4	369.457,3	406.016,5	449.188,7	513.715,9	558.938,0	626.532,6	695.839,1	188.894,4
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	239.728,4	270.586,3	320.534,3	370.131,9	408.438,8	464.399,9	520.206,8	571.203,6	616.315,1	671.433,8	696.065,5	184.410,2
	1 Jasa Perantara Keuangan	149.842,7	167.456,3	204.479,4	237.169,6	256.028,9	290.943,1	327.378,2	353.059,7	375.503,9	405.183,7	418.860,0	114.130,1
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	51.410,5	58.759,3	65.882,2	76.004,5	87.336,5	99.041,1	109.355,2	124.126,2	137.653,4	149.880,9	159.032,6	40.353,2
	3 Jasa Keuangan Lainnya	32.701,7	37.760,8	42.687,6	48.278,5	55.244,7	63.465,3	71.857,2	81.435,8	90.037,0	102.631,9	104.115,2	26.158,6
	4 Jasa Penunjang Keuangan	5.773,5	6.609,9	7.485,1	8.679,3	9.828,7	10.950,4	11.616,2	12.581,9	13.120,8	13.737,3	14.057,7	3.768,3
L	Real Estate	198.213,5	218.796,6	237.913,9	264.275,0	294.573,4	327.601,4	350.488,2	382.259,2	406.013,7	439.455,9	453.780,9	118.298,8
M,N	Jasa Perusahaan	99.085,4	113.975,3	127.724,2	144.604,1	165.990,6	190.267,9	211.623,6	238.217,0	267.094,0	304.285,5	294.255,5	73.690,2
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	259.646,1	304.755,7	340.567,6	372.195,0	404.629,6	449.382,4	476.490,9	499.343,6	541.685,6	571.622,3	580.175,2	127.334,6
P	Jasa Pendidikan	201.559,5	232.726,8	270.372,3	307.862,3	341.818,4	387.611,4	417.344,8	447.137,6	481.747,0	522.375,2	549.396,5	132.751,8
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	66.444,7	76.404,9	86.235,4	96.881,3	109.147,2	123.191,5	132.100,5	144.830,7	158.070,1	174.740,0	201.149,0	60.845,6
R,S,T,U	Jasa lainnya	101.061,0	113.022,0	122.566,2	140.315,5	163.548,8	190.581,0	211.427,9	239.258,6	268.574,7	309.002,1	302.568,2	76.493,7
A	NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR	6.683.679,8	7.675.899,3	8.429.699,5	9.308.331,6	10.306.232,4	11.163.205,7	11.958.855,5	13.066.595,8	14.236.758,4	15.181.427,8	14.873.005,3	4.152.782,3
B	PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	180.453,3	155.826,7	186.005,0	237.802,4	263.472,9	363.127,1	442.873,0	523.229,9	601.997,6	651.107,6	561.146,5	172.654,6
C	PRODUK DOMESTIK BRUTO	6.864.133,1	7.831.726,0	8.615.704,5	9.546.134,0	10.569.705,3	11.526.332,8	12.401.728,5	13.589.825,7	14.838.756,0	15.832.535,4	15.434.151,8	4.325.436,9

* Angka sementara
** Angka sangat sementara
*** Angka sangat sangat sementara

Tabel 2. PDB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 - 2021 (Triwulan III)

(Miliar Rupiah)

KATEGORI	LAPANGAN USAHA		Tahun											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**	2021***
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		956.119,7	993.857,3	1.039.440,7	1.083.141,8	1.129.052,7	1.171.445,8	1.210.955,5	1.258.375,7	1.307.253,0	1.354.399,1	1.378.131,3	383.514,6
	1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	754.434,4	780.581,1	816.304,4	847.763,7	880.389,5	906.805,5	936.356,9	970.262,9	1.005.655,0	1.038.902,9	1.060.823,1	301.314,4
		a. Tanaman Pangan	253.326,6	250.787,4	263.076,2	268.268,2	268.426,9	280.018,8	287.216,5	293.858,0	298.027,3	292.883,0	303.247,4	79.372,3
		b. Tanaman Hortikultura	110.395,3	120.079,3	117.424,5	118.207,7	124.300,9	127.110,0	130.832,3	135.649,0	145.131,2	153.157,8	159.539,3	42.610,7
		c. Tanaman Perkebunan	268.207,3	281.465,0	301.019,5	319.532,6	338.502,2	345.164,9	357.137,7	373.194,2	387.496,7	405.147,5	410.553,4	131.654,9
		d. Peternakan	108.399,9	113.603,3	119.249,8	125.302,3	132.221,1	136.936,4	143.036,5	148.688,8	155.539,9	167.637,9	167.084,8	42.038,9
		e. Jasa Pertanian dan Perburuan	14.105,3	14.646,1	15.534,4	16.452,9	16.938,4	17.575,4	18.133,9	18.872,9	19.459,9	20.076,7	20.398,2	5.637,6
	2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	58.125,9	58.731,0	58.872,0	59.228,8	59.573,5	60.623,5	60.002,0	61.279,6	62.981,8	63.217,6	63.195,9	16.673,0
	3	Perikanan	143.559,4	154.545,2	164.264,3	176.149,3	189.089,7	204.016,8	214.596,6	226.833,2	238.616,2	252.278,6	254.112,3	65.527,2
B	Pertambangan dan Penggalian		718.128,6	748.956,3	771.561,6	791.054,4	794.489,5	767.327,2	774.593,1	779.678,4	796.505,0	806.206,2	790.475,2	211.889,9
	1	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	336.169,7	335.737,1	323.632,4	313.328,1	307.161,7	307.325,8	313.743,9	302.653,0	298.420,1	289.980,1	272.583,2	65.736,6
	2	Pertambangan Batubara dan Lignit	160.732,5	199.244,0	230.589,2	247.594,6	251.073,6	232.725,3	223.098,6	226.478,9	235.561,4	259.598,5	245.498,6	69.205,9
	3	Pertambangan Bijih Logam	109.244,2	95.413,7	91.614,5	98.608,6	98.257,9	87.702,9	89.303,2	95.150,4	103.719,4	88.003,4	105.829,4	34.041,1
	4	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	111.982,2	118.561,5	125.725,5	131.523,1	137.996,3	139.573,2	148.447,4	155.396,1	158.804,1	168.624,2	166.564,0	42.906,3

KATEGORI	LAPANGAN USAHA		Tahun											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**	2021***
C	Industri Pengolahan		1.512.760,8	1.607.452,0	1.697.787,2	1.771.961,9	1.854.256,7	1.934.533,2	2.016.876,9	2.103.466,1	2.193.368,4	2.276.667,8	2.209.920,3	578.167,1
	1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	233.822,2	233.051,9	227.456,1	221.449,9	216.750,8	214.312,0	220.392,1	219.849,4	219.831,8	217.402,2	202.603,7	49.801,6
	Industri Pengolahan Non Migas		1.278.938,6	1.374.400,1	1.470.331,1	1.550.512,0	1.637.505,9	1.720.221,2	1.796.484,8	1.883.616,7	1.973.536,6	2.059.265,6	2.007.316,6	528.365,5
	1	Industri Makanan dan Minuman	360.443,1	400.003,7	441.341,7	459.283,0	502.856,2	540.756,4	585.786,3	639.834,4	690.462,5	744.170,5	755.914,9	202.383,6
	2	Industri Pengolahan Tembakau	67.249,4	67.096,8	73.011,4	72.814,0	78.878,7	83.798,7	85.119,7	84.572,4	87.548,7	90.486,7	85.257,5	20.804,0
	3	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	96.306,9	102.561,1	108.753,6	115.913,1	117.723,4	112.078,9	111.978,2	116.261,6	126.406,8	145.804,6	132.851,0	32.241,6
	4	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	19.697,2	21.852,3	20.665,3	21.745,7	22.967,7	23.879,2	25.875,3	26.449,0	28.941,7	28.654,1	26.142,6	6.937,0
	5	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	56.775,1	55.230,9	54.786,9	58.180,6	61.742,5	60.735,4	61.790,6	61.870,4	62.337,3	59.498,3	58.212,1	14.294,5
	6	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	67.984,8	70.631,6	68.590,4	68.229,4	70.670,1	70.556,8	72.399,9	72.640,6	73.681,6	80.211,0	80.385,3	19.277,1
	7	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	114.332,4	124.230,7	140.101,8	147.248,6	153.191,9	164.843,0	174.469,8	182.380,2	179.791,9	195.040,9	213.360,5	60.189,4

KATEGORI	LAPANGAN USAHA		Tahun											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**	2021***
	8	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	66.763,0	68.152,6	73.307,4	71.945,7	72.777,3	76.442,1	69.940,9	71.666,8	76.627,8	72.398,8	68.337,7	16.503,5
	9	Industri Barang Galian bukan Logam	50.948,3	54.909,8	59.252,4	61.228,7	62.706,8	66.485,2	70.118,7	69.512,9	71.424,4	70.690,7	64.239,2	16.902,3
	10	Industri Logam Dasar	54.471,5	61.859,7	60.888,7	67.972,4	72.059,1	76.532,1	77.293,0	81.832,6	89.188,6	91.716,9	97.099,5	27.194,3
	11	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	130.750,5	142.245,0	158.803,5	173.452,4	178.544,2	192.528,0	200.860,9	206.469,3	205.216,8	204.172,5	193.026,6	45.342,3
	12	Industri Mesin dan Perlengkapan	23.767,2	25.794,5	25.436,7	24.163,8	26.259,7	28.250,5	29.676,6	31.325,0	34.297,3	32.881,0	29.536,4	8.087,1
	13	Industri Alat Angkutan	134.260,2	142.815,2	148.905,4	171.165,5	178.022,5	182.289,1	190.523,4	197.527,9	205.907,2	198.853,9	159.359,0	46.883,0
	14	Industri Furnitur	20.069,3	22.061,8	21.588,5	22.375,4	23.179,9	24.377,4	24.489,8	25.383,7	25.946,0	28.113,0	27.167,5	7.295,5
	15	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	15.119,7	14.954,4	14.897,4	14.793,7	15.925,9	16.668,4	16.161,7	15.889,9	15.758,0	16.572,7	16.426,8	4.030,3
D	Pengadaan Listrik dan Gas		72.549,1	76.678,1	84.393,0	88.805,1	94.047,2	94.894,8	100.009,9	101.551,3	107.108,6	111.436,7	108.826,4	28.719,7
	1	Ketenagalistrikan	58.866,5	63.384,5	70.826,5	75.050,7	79.581,5	81.407,0	86.580,3	88.663,4	93.318,0	97.623,8	96.663,1	25.494,1
	2	Pengadaan Gas dan Produksi Es	13.682,6	13.293,6	13.566,5	13.754,4	14.465,7	13.487,8	13.429,6	12.887,9	13.790,6	13.812,9	12.163,3	3.225,6
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang		5.848,5	6.125,1	6.329,8	6.539,9	6.882,5	7.369,0	7.634,6	7.985,3	8.429,4	9.004,9	9.449,3	2.477,3
F	Konstruksi		626.905,4	683.421,9	728.226,4	772.719,6	826.615,6	879.163,9	925.040,3	987.924,9	1.048.082,8	1.108.425,0	1.072.334,8	278.240,8

KATEGORI	LAPANGAN USAHA		Tahun											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**	2021***
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		923.923,8	1.013.199,6	1.067.911,5	1.119.272,1	1.177.297,5	1.207.164,5	1.255.760,8	1.311.746,5	1.376.878,7	1.440.263,0	1.386.695,4	368.999,5
	1	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	182.140,5	190.877,7	203.430,9	218.291,1	229.228,4	229.967,5	239.089,3	250.442,6	262.578,5	272.349,7	233.947,2	65.484,9
	2	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	741.783,3	822.321,9	864.480,6	900.981,0	948.069,1	977.197,0	1.016.671,5	1.061.303,9	1.114.300,2	1.167.913,3	1.152.748,2	303.514,6
H	Transportasi dan Pergudangan		245.375,4	265.774,0	284.662,6	304.506,2	326.933,0	348.855,9	374.843,4	406.679,4	435.336,5	463.157,5	393.481,9	97.857,6
	1	Angkutan Rel	2.374,7	2.297,9	2.201,7	2.336,9	2.823,1	2.948,6	3.050,6	3.630,2	4.020,0	4.200,3	2.422,0	482,3
	2	Angkutan Darat	135.485,6	145.018,6	155.851,8	167.559,5	180.367,4	192.631,0	206.218,1	222.587,3	238.457,7	262.208,1	248.208,0	65.286,7
	3	Angkutan Laut	21.715,3	23.541,5	25.600,8	27.372,4	29.473,7	30.174,0	30.550,9	31.969,1	34.276,4	37.897,0	36.164,5	9.341,5
	4	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	8.113,1	8.813,3	9.057,0	9.469,2	10.117,6	10.222,2	10.371,9	10.995,1	11.566,5	12.212,2	10.624,6	2.538,2
	5	Angkutan Udara	38.304,2	43.917,4	47.030,3	49.263,2	52.255,1	57.671,8	65.295,4	73.084,2	77.493,4	69.926,9	32.859,6	5.190,2
	6	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	39.382,5	42.185,3	44.921,0	48.505,0	51.896,1	55.208,3	59.356,5	64.413,5	69.522,5	76.713,0	63.203,2	15.018,7
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		200.281,8	214.022,0	228.232,6	243.748,3	257.815,5	268.922,4	282.823,4	298.129,7	315.068,6	333.306,8	299.248,0	73.777,6
	1	Penyediaan Akomodasi	35.764,3	39.784,9	43.567,4	47.699,6	51.426,7	54.340,3	57.440,8	60.394,4	62.997,3	63.869,6	48.285,8	10.578,6
	2	Penyediaan Makan Minum	164.517,5	174.237,1	184.665,2	196.048,7	206.388,8	214.582,1	225.382,6	237.735,3	252.071,3	269.437,2	250.962,2	63.199,0

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	Tahun											
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**	2021***
J	Informasi dan Komunikasi	256.048,1	281.693,8	316.278,7	349.150,1	384.475,6	421.769,8	459.208,1	503.420,7	538.762,7	589.536,1	651.930,9	175.654,3
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	239.728,4	256.443,0	280.896,1	305.515,1	319.825,5	347.269,0	378.279,4	398.971,4	415.620,6	443.093,1	457.482,0	115.869,4
	1 Jasa Perantara Keuangan	149.842,7	158.503,7	175.168,1	192.098,0	197.712,2	216.631,2	237.896,4	246.031,8	251.912,3	267.387,0	278.028,3	71.070,0
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	51.410,5	55.801,8	60.045,0	64.661,3	69.794,6	74.398,1	79.292,8	86.687,9	93.169,9	98.453,6	102.398,6	25.581,9
	3 Jasa Keuangan Lainnya	32.701,7	35.860,2	38.867,7	41.371,7	44.464,7	48.013,8	52.472,8	57.290,8	61.371,0	67.894,7	67.520,0	16.700,9
	4 Jasa Penunjang Keuangan	5.773,5	6.277,3	6.815,3	7.384,1	7.854,0	8.225,9	8.617,4	8.960,9	9.167,4	9.357,8	9.535,1	2.516,6
L	Real Estate	198.213,5	213.441,4	229.254,2	244.237,5	256.440,2	266.979,6	279.500,5	289.568,5	299.648,2	316.901,1	324.259,4	84.164,3
M,N	Jasa Perusahaan	99.085,4	108.239,3	116.293,3	125.490,7	137.795,3	148.395,5	159.321,7	172.763,8	187.691,1	206.936,2	195.671,1	48.242,2
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	259.646,1	276.336,8	282.235,3	289.448,9	296.329,7	310.054,6	319.965,0	326.514,3	349.277,6	365.533,8	365.440,9	80.508,0
P	Jasa Pendidikan	201.559,5	215.029,1	232.704,3	250.016,2	263.685,0	283.020,1	293.887,6	304.810,8	321.133,8	341.355,1	350.329,8	84.172,8
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	66.444,7	72.592,1	78.380,1	84.621,4	91.357,1	97.465,8	102.490,2	109.497,5	117.322,2	127.522,1	142.309,7	42.104,8
R,S,T,U	Jasa lainnya	101.061,0	109.372,4	115.675,4	123.083,1	134.070,1	144.904,2	156.507,5	170.174,8	185.405,6	205.011,4	196.608,7	49.170,7
A	NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR	6.683.679,8	7.142.634,2	7.560.262,8	7.953.312,3	8.351.368,7	8.699.535,3	9.097.697,9	9.531.259,1	10.002.892,8	10.498.755,9	10.332.595,1	2.703.530,6
B	PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	180.453,3	145.001,1	166.820,6	203.185,5	213.497,9	282.981,8	336.915,5	381.669,0	422.959,1	450.281,9	389.847,6	112.398,0
C	PRODUK DOMESTIK BRUTO	6.864.133,1	7.287.635,3	7.727.083,4	8.156.497,8	8.564.866,6	8.982.517,1	9.434.613,4	9.912.928,1	10.425.851,9	10.949.037,8	10.722.442,7	2.815.928,6

* Angka sementara
** Angka sangat sementara
*** Angka sangat sangat sementara

Tabel 3 Laju Implisit PDB Tahun 2010 - 2021 (Triwulan III)

(Persen)

KATE-GORI	LAPANGAN USAHA		Tahun											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**	2021***
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		-	13,51	13,37	13,36	13,34	13,49	13,48	13,16	12,81	12,71	13,70	14,30
	1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	-	10,63	10,47	10,42	10,31	10,27	10,22	9,92	9,55	9,40	10,20	10,96
		a. Tanaman Pangan	-	3,46	3,55	3,48	3,25	3,45	3,43	3,23	3,03	2,82	3,07	2,71
		b. Tanaman Hortikultura	-	1,60	1,45	1,44	1,52	1,51	1,51	1,45	1,47	1,51	1,62	1,60
		c. Tanaman Perkebunan	-	3,87	3,75	3,75	3,77	3,52	3,46	3,47	3,30	3,27	3,63	4,87
		d. Peternakan	-	1,50	1,52	1,55	1,58	1,60	1,62	1,57	1,57	1,62	1,69	1,57
		e. Jasa Pertanian dan Perburuan	-	0,20	0,20	0,20	0,19	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,20	0,21
	2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	-	0,79	0,76	0,73	0,71	0,71	0,71	0,67	0,66	0,66	0,70	0,68
	3	Perikanan	-	2,09	2,14	2,21	2,32	2,51	2,56	2,57	2,60	2,65	2,80	2,66
B	Pertambangan dan Penggalian		-	11,81	11,61	11,01	9,83	7,65	7,18	7,58	8,08	7,26	6,44	9,55
	1	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-	5,67	5,72	5,45	4,82	3,34	2,94	2,88	3,10	2,78	2,15	2,77
	2	Pertambangan Batubara dan Lignit	-	3,23	3,14	2,96	2,46	2,00	1,87	2,38	2,70	2,33	1,83	4,01
	3	Pertambangan Bijih Logam	-	1,33	1,17	1,03	0,89	0,64	0,59	0,69	0,75	0,61	0,85	1,29
	4	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	-	1,58	1,58	1,57	1,67	1,67	1,78	1,62	1,52	1,54	1,60	1,48
C	Industri Pengolahan		-	21,76	21,45	21,03	21,08	20,99	20,52	20,16	19,86	19,70	19,88	19,15

KATEGORI	LAPANGAN USAHA		Tahun											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**	2021***
	1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	3,63	3,46	3,29	3,19	2,78	2,31	2,28	2,24	2,13	1,99	1,83
	Industri Pengolahan Non Migas		-	18,13	17,99	17,74	17,88	18,20	18,21	17,88	17,62	17,58	17,89	17,33
	1	Industri Makanan dan Minuman	-	5,24	5,31	5,14	5,32	5,61	5,97	6,14	6,25	6,40	6,85	6,74
	2	Industri Pengolahan Tembakau	-	0,92	0,92	0,87	0,91	0,94	0,94	0,90	0,89	0,89	0,88	0,77
	3	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	-	1,38	1,35	1,36	1,32	1,21	1,16	1,11	1,14	1,26	1,21	1,05
	4	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	0,28	0,25	0,26	0,27	0,27	0,28	0,27	0,28	0,27	0,25	0,24
	5	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	-	0,76	0,70	0,70	0,72	0,68	0,65	0,60	0,56	0,51	0,51	0,45
	6	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	-	0,96	0,86	0,78	0,80	0,76	0,72	0,71	0,69	0,69	0,72	0,65
	7	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	-	1,59	1,67	1,65	1,70	1,82	1,80	1,74	1,62	1,68	1,92	2,03
	8	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	-	0,92	0,89	0,80	0,76	0,75	0,64	0,63	0,62	0,56	0,54	0,49
	9	Industri Barang Galian bukan Logam	-	0,71	0,73	0,73	0,73	0,72	0,72	0,66	0,63	0,59	0,56	0,54
	10	Industri Logam Dasar	-	0,80	0,75	0,78	0,78	0,78	0,72	0,73	0,75	0,73	0,78	0,80

KATEGORI	LAPANGAN USAHA		Tahun											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**	2021***
	11	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	-	1,81	1,89	1,95	1,87	1,97	1,95	1,86	1,74	1,68	1,63	1,43
	12	Industri Mesin dan Perlengkapan	-	0,30	0,29	0,27	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,30	0,28	0,28
	13	Industri Alat Angkutan	-	1,98	1,93	2,02	1,96	1,91	1,91	1,82	1,76	1,63	1,35	1,46
	14	Industri Furnitur	-	0,28	0,26	0,26	0,27	0,27	0,26	0,25	0,24	0,25	0,25	0,24
	15	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	-	0,20	0,19	0,17	0,18	0,18	0,17	0,15	0,14	0,15	0,15	0,13
D	Pengadaan Listrik dan Gas		-	1,17	1,11	1,03	1,09	1,13	1,15	1,19	1,19	1,17	1,16	1,10
	1	Ketenagalistrikan	-	0,93	0,85	0,78	0,80	0,87	0,91	0,98	0,97	0,96	0,98	0,92
	2	Pengadaan Gas dan Produksi Es	-	0,24	0,26	0,25	0,29	0,25	0,24	0,22	0,22	0,21	0,19	0,18
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang		-	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
F	Konstruksi		-	9,09	9,35	9,49	9,86	10,21	10,38	10,38	10,53	10,75	10,71	10,39
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		-	13,61	13,21	13,21	13,43	13,30	13,19	13,02	13,02	13,01	12,93	13,03
	1	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	-	2,67	2,65	2,71	2,77	2,70	2,70	2,62	2,61	2,63	2,33	2,36
	2	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	-	10,94	10,56	10,50	10,66	10,60	10,49	10,39	10,41	10,38	10,60	10,67

KATEGORI	LAPANGAN USAHA		Tahun											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**	2021***
H	Transportasi dan Pergudangan		-	3,53	3,63	3,93	4,42	5,02	5,20	5,41	5,38	5,57	4,47	3,90
	1	Angkutan Rel	-	0,03	0,03	0,03	0,04	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08	0,05	0,04
	2	Angkutan Darat	-	1,89	1,85	1,99	2,14	2,44	2,43	2,42	2,39	2,47	2,47	2,37
	3	Angkutan Laut	-	0,31	0,31	0,31	0,34	0,34	0,32	0,31	0,30	0,32	0,31	0,29
	4	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	-	0,12	0,11	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,09
	5	Angkutan Udara	-	0,60	0,72	0,81	1,03	1,25	1,43	1,63	1,62	1,63	0,68	0,37
	6	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	-	0,58	0,61	0,66	0,75	0,81	0,84	0,88	0,88	0,97	0,85	0,74
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		-	2,86	2,93	3,03	3,04	2,96	2,93	2,85	2,78	2,78	2,55	2,26
	1	Penyediaan Akomodasi	-	0,52	0,59	0,67	0,70	0,70	0,70	0,68	0,65	0,63	0,48	0,38
	2	Penyediaan Makan Minum	-	2,34	2,34	2,37	2,34	2,26	2,23	2,17	2,13	2,15	2,07	1,88
J	Informasi dan Komunikasi		-	3,60	3,61	3,57	3,50	3,52	3,62	3,78	3,77	3,96	4,51	4,37
K	Jasa Keuangan dan Asuransi		-	3,46	3,72	3,88	3,86	4,03	4,19	4,20	4,15	4,24	4,51	4,26
	1	Jasa Perantara Keuangan	-	2,14	2,37	2,48	2,42	2,52	2,64	2,60	2,53	2,56	2,71	2,64
	2	Asuransi dan Dana Pensiun	-	0,75	0,76	0,80	0,83	0,86	0,88	0,91	0,93	0,95	1,03	0,93
	3	Jasa Keuangan Lainnya	-	0,48	0,50	0,51	0,52	0,55	0,58	0,60	0,61	0,65	0,67	0,60
	4	Jasa Penunjang Keuangan	-	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
L	Real Estate		-	2,79	2,76	2,77	2,79	2,84	2,83	2,81	2,74	2,78	2,94	2,73
M,N	Jasa Perusahaan		-	1,46	1,48	1,51	1,57	1,65	1,71	1,75	1,80	1,92	1,91	1,70

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	Tahun											
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**	2021***
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	3,89	3,95	3,90	3,83	3,90	3,84	3,67	3,65	3,61	3,76	2,94
P	Jasa Pendidikan	-	2,97	3,14	3,22	3,23	3,36	3,37	3,29	3,25	3,30	3,56	3,07
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	0,98	1,00	1,01	1,03	1,07	1,07	1,07	1,07	1,10	1,30	1,41
R,S,T,U	Jasa lainnya	-	1,44	1,42	1,47	1,55	1,65	1,70	1,76	1,81	1,95	1,96	1,77
A	NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR	-	98,01	97,84	97,51	97,51	96,85	96,43	96,15	95,94	95,89	96,36	96,01
B	PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	-	1,99	2,16	2,49	2,49	3,15	3,57	3,85	4,06	4,11	3,64	3,99
C	PRODUK DOMESTIK BRUTO	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara
** Angka sangat sementara
*** Angka sangat sangat sementara

Tabel 4A Laju Pertumbuhan PDB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010-2021 (Triwulan III)

(Persen)

KATEGORI	LAPANGAN USAHA		Tahun											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**	2021***
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		-	3,95	4,59	4,20	4,24	3,75	3,37	3,92	3,88	3,61	1,75	1,88
	1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	-	3,47	4,58	3,85	3,85	3,00	3,26	3,62	3,65	3,31	2,11	2,82
		a. Tanaman Pangan	-	-1,00	4,90	1,97	0,06	4,32	2,57	2,31	1,42	-1,73	3,54	-10,85
		b. Tanaman Hortikultura	-	8,77	-2,21	0,67	5,15	2,26	2,93	3,68	6,99	5,53	4,17	-2,62
		c. Tanaman Perkebunan	-	4,94	6,95	6,15	5,94	1,97	3,47	4,50	3,83	4,56	1,33	19,83
		d. Peternakan	-	4,80	4,97	5,08	5,52	3,57	4,45	3,95	4,61	7,78	-0,33	-6,55
		e. Jasa Pertanian dan Perburuan	-	3,83	6,07	5,91	2,95	3,76	3,18	4,08	3,11	3,17	1,60	4,02
	2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	-	1,04	0,24	0,61	0,58	1,76	-1,03	2,13	2,78	0,37	-0,03	6,66
	3	Perikanan	-	7,65	6,29	7,24	7,35	7,89	5,19	5,70	5,19	5,73	0,73	-3,25
B	Pertambangan dan Penggalian		-	4,29	3,02	2,53	0,43	-3,42	0,95	0,66	2,16	1,22	-1,95	4,20
	1	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-	-0,13	-3,61	-3,18	-1,97	0,05	2,09	-3,54	-1,40	-2,83	-6,00	2,81
	2	Pertambangan Batubara dan Lignit	-	23,96	15,73	7,37	1,41	-7,31	-4,14	1,52	4,01	10,20	-5,43	4,58
	3	Pertambangan Bijih Logam	-	-12,66	-3,98	7,63	-0,36	-10,74	1,82	6,55	9,01	-15,15	20,26	3,62
	4	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	-	5,88	6,04	4,61	4,92	1,14	6,36	4,68	2,19	6,18	-1,22	6,22
C	Industri Pengolahan		-	6,26	5,62	4,37	4,64	4,33	4,26	4,29	4,27	3,80	-2,93	2,35

KATEGORI	LAPANGAN USAHA		Tahun											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**	2021***
	1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-0,33	-2,40	-2,64	-2,12	-1,13	2,84	-0,25	-0,01	-1,11	-6,81	-3,39
	Industri Pengolahan Non Migas		-	7,46	6,98	5,45	5,61	5,05	4,43	4,85	4,77	4,34	-2,52	2,93
	1	Industri Makanan dan Minuman	-	10,98	10,33	4,07	9,49	7,54	8,33	9,23	7,91	7,78	1,58	4,78
	2	Industri Pengolahan Tembakau	-	-0,23	8,82	-0,27	8,33	6,24	1,58	-0,64	3,52	3,36	-5,78	6,10
	3	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	-	6,49	6,04	6,58	1,56	-4,79	-0,09	3,83	8,73	15,35	-8,88	4,27
	4	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	10,94	-5,43	5,23	5,62	3,97	8,36	2,22	9,42	-0,99	-8,76	3,61
	5	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	-	-2,72	-0,80	6,19	6,12	-1,63	1,74	0,13	0,75	-4,55	-2,16	6,17
	6	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	-	3,89	-2,89	-0,53	3,58	-0,16	2,61	0,33	1,43	8,86	0,22	-0,54
	7	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	-	8,66	12,78	5,10	4,04	7,61	5,84	4,53	-1,42	8,48	9,39	6,23
	8	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	-	2,08	7,56	-1,86	1,16	5,04	-8,50	2,47	6,92	-5,52	-5,61	-6,45
	9	Industri Barang Galian bukan Logam	-	7,78	7,91	3,34	2,41	6,03	5,47	-0,86	2,75	-1,03	-9,13	6,12
	10	Industri Logam Dasar	-	13,56	-1,57	11,63	6,01	6,21	0,99	5,87	8,99	2,83	5,87	2,75

KATEGORI	LAPANGAN USAHA		Tahun											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**	2021***
	11	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	-	8,79	11,64	9,22	2,94	7,83	4,33	2,79	-0,61	-0,51	-5,46	-6,87
	12	Industri Mesin dan Perlengkapan	-	8,53	-1,39	-5,00	8,67	7,58	5,05	5,55	9,49	-4,13	-10,17	0,12
	13	Industri Alat Angkutan	-	6,37	4,26	14,95	4,01	2,40	4,52	3,68	4,24	-3,43	-19,86	3,08
	14	Industri Furnitur	-	9,93	-2,15	3,64	3,60	5,17	0,46	3,65	2,22	8,35	-3,36	1,91
	15	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	-	-1,09	-0,38	-0,70	7,65	4,66	-3,04	-1,68	-0,83	5,17	-0,88	0,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas		-	5,69	10,06	5,23	5,90	0,90	5,39	1,54	5,47	4,04	-2,34	3,10
	1	Ketenagalistrikan	-	7,67	11,74	5,96	6,04	2,29	6,35	2,41	5,25	4,61	-0,98	2,83
	2	Pengadaan Gas dan Produksi Es	-	-2,84	2,05	1,39	5,17	-6,76	-0,43	-4,03	7,00	0,16	-11,94	5,23
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang		-	4,73	3,34	3,32	5,24	7,07	3,60	4,59	5,56	6,83	4,94	0,33
F	Konstruksi		-	9,02	6,56	6,11	6,97	6,36	5,22	6,80	6,09	5,76	-3,26	5,13
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		-	9,66	5,40	4,81	5,18	2,54	4,03	4,46	4,97	4,60	-3,72	1,54
	1	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	-	4,80	6,58	7,30	5,01	0,32	3,97	4,75	4,85	3,72	-14,10	1,43
	2	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	-	10,86	5,13	4,22	5,23	3,07	4,04	4,39	4,99	4,81	-1,30	1,56

KATEGORI	LAPANGAN USAHA		Tahun											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**	2021***
H	Transportasi dan Pergudangan		-	8,31	7,11	6,97	7,36	6,71	7,45	8,49	7,05	6,39	-15,04	-1,37
	1	Angkutan Rel	-	-3,23	-4,19	6,14	20,81	4,45	3,46	19,00	10,74	4,49	-42,34	-24,05
	2	Angkutan Darat	-	7,04	7,47	7,51	7,64	6,80	7,05	7,94	7,13	9,96	-5,34	2,36
	3	Angkutan Laut	-	8,41	8,75	6,92	7,68	2,38	1,25	4,64	7,22	10,56	-4,57	3,20
	4	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	-	8,63	2,77	4,55	6,85	1,03	1,46	6,01	5,20	5,58	-13,00	5,01
	5	Angkutan Udara	-	14,65	7,09	4,75	6,07	10,37	13,22	11,93	6,03	-9,76	-53,01	-33,47
	6	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	-	7,12	6,48	7,98	6,99	6,38	7,51	8,52	7,93	10,34	-17,61	-3,30
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		-	6,86	6,64	6,80	5,77	4,31	5,17	5,41	5,68	5,79	-10,22	-5,73
	1	Penyediaan Akomodasi	-	11,24	9,51	9,48	7,81	5,67	5,71	5,14	4,31	1,38	-24,40	-16,68
	2	Penyediaan Makan Minum	-	5,91	5,99	6,16	5,27	3,97	5,03	5,48	6,03	6,89	-6,86	-3,60
J	Informasi dan Komunikasi		-	10,02	12,28	10,39	10,12	9,70	8,88	9,63	7,02	9,42	10,58	1,87
K	Jasa Keuangan dan Asuransi		-	6,97	9,54	8,76	4,68	8,58	8,93	5,47	4,17	6,61	3,25	-1,24
	1	Jasa Perantara Keuangan	-	5,78	10,51	9,66	2,92	9,57	9,82	3,42	2,39	6,14	3,98	-2,34
	2	Asuransi dan Dana Pensiun	-	8,54	7,60	7,69	7,94	6,60	6,58	9,33	7,48	5,67	4,01	-0,64
	3	Jasa Keuangan Lainnya	-	9,66	8,39	6,44	7,48	7,98	9,29	9,18	7,12	10,63	-0,55	2,29
	4	Jasa Penunjang Keuangan	-	8,73	8,57	8,35	6,36	4,74	4,76	3,99	2,30	2,08	1,89	1,58
L	Real Estate		-	7,68	7,41	6,54	5,00	4,11	4,69	3,60	3,48	5,76	2,32	1,54
M,N	Jasa Perusahaan		-	9,24	7,44	7,91	9,81	7,69	7,36	8,44	8,64	10,25	-5,44	-2,42

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	Tahun											
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**	2021***
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	6,43	2,13	2,56	2,38	4,63	3,20	2,05	6,97	4,65	-0,03	-16,69
P	Jasa Pendidikan	-	6,68	8,22	7,44	5,47	7,33	3,84	3,72	5,36	6,30	2,63	-4,65
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	9,25	7,97	7,96	7,96	6,69	5,16	6,84	7,15	8,69	11,60	16,10
R,S,T,U	Jasa lainnya	-	8,22	5,76	6,40	8,93	8,08	8,01	8,73	8,95	10,57	-4,10	-1,23
A	NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR	-	6,87	5,85	5,20	5,00	4,17	4,58	4,77	4,95	4,96	-1,58	1,12
B	PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	-	-19,65	15,05	21,80	5,08	32,55	19,06	13,28	10,82	6,46	-13,42	13,20
C	PRODUK DOMESTIK BRUTO	-	6,17	6,03	5,56	5,01	4,88	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07	1,55

* Angka sementara
** Angka sangat sementara
*** Angka sangat sangat sementara

Tabel 4B Laju Pertumbuhan PDB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010-2021 (Triwulan III)

(Persen)

KATE-GORI	LAPANGAN USAHA		Tahun											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**	2021***
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		-	3,95	4,59	4,20	4,24	3,75	3,37	3,92	3,88	3,61	1,75	1,31
	1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	-	3,47	4,58	3,85	3,85	3,00	3,26	3,62	3,65	3,31	2,11	0,69
		a. Tanaman Pangan	-	-1,00	4,90	1,97	0,06	4,32	2,57	2,31	1,42	-1,73	3,54	-5,80
		b. Tanaman Hortikultura	-	8,77	-2,21	0,67	5,15	2,26	2,93	3,68	6,99	5,53	4,17	-5,23
		c. Tanaman Perkebunan	-	4,94	6,95	6,15	5,94	1,97	3,47	4,50	3,83	4,56	1,33	8,34
		d. Peternakan	-	4,80	4,97	5,08	5,52	3,57	4,45	3,95	4,61	7,78	-0,33	-2,08
		e. Jasa Pertanian dan Perburuan	-	3,83	6,07	5,91	2,95	3,76	3,18	4,08	3,11	3,17	1,60	0,99
	2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	-	1,04	0,24	0,61	0,58	1,76	-1,03	2,13	2,78	0,37	-0,03	0,17
	3	Perikanan	-	7,65	6,29	7,24	7,35	7,89	5,19	5,70	5,19	5,73	0,73	4,55
B	Pertambangan dan Penggalian		-	4,29	3,02	2,53	0,43	-3,42	0,95	0,66	2,16	1,22	-1,95	7,78
	1	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-	-0,13	-3,61	-3,18	-1,97	0,05	2,09	-3,54	-1,40	-2,83	-6,00	-2,23
	2	Pertambangan Batubara dan Lignit	-	23,96	15,73	7,37	1,41	-7,31	-4,14	1,52	4,01	10,20	-5,43	14,95
	3	Pertambangan Bijih Logam	-	-12,66	-3,98	7,63	-0,36	-10,74	1,82	6,55	9,01	-15,15	20,26	24,73
	4	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	-	5,88	6,04	4,61	4,92	1,14	6,36	4,68	2,19	6,18	-1,22	2,49

KATEGORI	LAPANGAN USAHA		Tahun											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**	2021***
C	Industri Pengolahan		-	6,26	5,62	4,37	4,64	4,33	4,26	4,29	4,27	3,80	-2,93	3,68
	1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-0,33	-2,40	-2,64	-2,12	-1,13	2,84	-0,25	-0,01	-1,11	-6,81	-0,77
	Industri Pengolahan Non Migas		-	7,46	6,98	5,45	5,61	5,05	4,43	4,85	4,77	4,34	-2,52	4,12
	1	Industri Makanan dan Minuman	-	10,98	10,33	4,07	9,49	7,54	8,33	9,23	7,91	7,78	1,58	3,49
	2	Industri Pengolahan Tembakau	-	-0,23	8,82	-0,27	8,33	6,24	1,58	-0,64	3,52	3,36	-5,78	0,69
	3	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	-	6,49	6,04	6,58	1,56	-4,79	-0,09	3,83	8,73	15,35	-8,88	-3,34
	4	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	10,94	-5,43	5,23	5,62	3,97	8,36	2,22	9,42	-0,99	-8,76	18,12
	5	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	-	-2,72	-0,80	6,19	6,12	-1,63	1,74	0,13	0,75	-4,55	-2,16	-1,24
	6	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	-	3,89	-2,89	-0,53	3,58	-0,16	2,61	0,33	1,43	8,86	0,22	-5,37
	7	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	-	8,66	12,78	5,10	4,04	7,61	5,84	4,53	-1,42	8,48	9,39	9,71
	8	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	-	2,08	7,56	-1,86	1,16	5,04	-8,50	2,47	6,92	-5,52	-5,61	-2,80
	9	Industri Barang Galian bukan Logam	-	7,78	7,91	3,34	2,41	6,03	5,47	-0,86	2,75	-1,03	-9,13	2,96
	10	Industri Logam Dasar	-	13,56	-1,57	11,63	6,01	6,21	0,99	5,87	8,99	2,83	5,87	9,52

KATEGORI	LAPANGAN USAHA		Tahun											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**	2021***
	11	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	-	8,79	11,64	9,22	2,94	7,83	4,33	2,79	-0,61	-0,51	-5,46	-8,06
	12	Industri Mesin dan Perlengkapan	-	8,53	-1,39	-5,00	8,67	7,58	5,05	5,55	9,49	-4,13	-10,17	16,25
	13	Industri Alat Angkutan	-	6,37	4,26	14,95	4,01	2,40	4,52	3,68	4,24	-3,43	-19,86	27,84
	14	Industri Furnitur	-	9,93	-2,15	3,64	3,60	5,17	0,46	3,65	2,22	8,35	-3,36	7,02
	15	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	-	-1,09	-0,38	-0,70	7,65	4,66	-3,04	-1,68	-0,83	5,17	-0,88	-6,48
D	Pengadaan Listrik dan Gas		-	5,69	10,06	5,23	5,90	0,90	5,39	1,54	5,47	4,04	-2,34	3,85
	1	Ketenagalistrikan	-	7,67	11,74	5,96	6,04	2,29	6,35	2,41	5,25	4,61	-0,98	3,56
	2	Pengadaan Gas dan Produksi Es	-	-2,84	2,05	1,39	5,17	-6,76	-0,43	-4,03	7,00	0,16	-11,94	6,21
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang		-	4,73	3,34	3,32	5,24	7,07	3,60	4,59	5,56	6,83	4,94	4,56
F	Konstruksi		-	9,02	6,56	6,11	6,97	6,36	5,22	6,80	6,09	5,76	-3,26	3,84
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		-	9,66	5,40	4,81	5,18	2,54	4,03	4,46	4,97	4,60	-3,72	5,16
	1	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	-	4,80	6,58	7,30	5,01	0,32	3,97	4,75	4,85	3,72	-14,10	14,91
	2	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	-	10,86	5,13	4,22	5,23	3,07	4,04	4,39	4,99	4,81	-1,30	3,27

KATEGORI	LAPANGAN USAHA		Tahun											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**	2021***
H	Transportasi dan Pergudangan		-	8,31	7,11	6,97	7,36	6,71	7,45	8,49	7,05	6,39	-15,04	-0,72
	1	Angkutan Rel	-	-3,23	-4,19	6,14	20,81	4,45	3,46	19,00	10,74	4,49	-42,34	-7,96
	2	Angkutan Darat	-	7,04	7,47	7,51	7,64	6,80	7,05	7,94	7,13	9,96	-5,34	3,28
	3	Angkutan Laut	-	8,41	8,75	6,92	7,68	2,38	1,25	4,64	7,22	10,56	-4,57	0,67
	4	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	-	8,63	2,77	4,55	6,85	1,03	1,46	6,01	5,20	5,58	-13,00	-4,74
	5	Angkutan Udara	-	14,65	7,09	4,75	6,07	10,37	13,22	11,93	6,03	-9,76	-53,01	-19,74
	6	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	-	7,12	6,48	7,98	6,99	6,38	7,51	8,52	7,93	10,34	-17,61	-8,56
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		-	6,86	6,64	6,80	5,77	4,31	5,17	5,41	5,68	5,79	-10,22	-0,13
	1	Penyediaan Akomodasi	-	11,24	9,51	9,48	7,81	5,67	5,71	5,14	4,31	1,38	-24,40	-8,27
	2	Penyediaan Makan Minum	-	5,91	5,99	6,16	5,27	3,97	5,03	5,48	6,03	6,89	-6,86	1,37
J	Informasi dan Komunikasi		-	10,02	12,28	10,39	10,12	9,70	8,88	9,63	7,02	9,42	10,58	5,51
K	Jasa Keuangan dan Asuransi		-	6,97	9,54	8,76	4,68	8,58	8,93	5,47	4,17	6,61	3,25	4,29
	1	Jasa Perantara Keuangan	-	5,78	10,51	9,66	2,92	9,57	9,82	3,42	2,39	6,14	3,98	6,47
	2	Asuransi dan Dana Pensiun	-	8,54	7,60	7,69	7,94	6,60	6,58	9,33	7,48	5,67	4,01	1,15
	3	Jasa Keuangan Lainnya	-	9,66	8,39	6,44	7,48	7,98	9,29	9,18	7,12	10,63	-0,55	0,18
	4	Jasa Penunjang Keuangan	-	8,73	8,57	8,35	6,36	4,74	4,76	3,99	2,30	2,08	1,89	5,11
L	Real Estate		-	7,68	7,41	6,54	5,00	4,11	4,69	3,60	3,48	5,76	2,32	3,42
M,N	Jasa Perusahaan		-	9,24	7,44	7,91	9,81	7,69	7,36	8,44	8,64	10,25	-5,44	-0,59

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	Tahun											
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**	2021***
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	6,43	2,13	2,56	2,38	4,63	3,20	2,05	6,97	4,65	-0,03	-9,96
P	Jasa Pendidikan	-	6,68	8,22	7,44	5,47	7,33	3,84	3,72	5,36	6,30	2,63	-4,42
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	9,25	7,97	7,96	7,96	6,69	5,16	6,84	7,15	8,69	11,60	14,06
R,S,T,U	Jasa lainnya	-	8,22	5,76	6,40	8,93	8,08	8,01	8,73	8,95	10,57	-4,10	-0,30
A	NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR	-	6,87	5,85	5,20	5,00	4,17	4,58	4,77	4,95	4,96	-1,58	2,98
B	PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	-	-19,65	15,05	21,80	5,08	32,55	19,06	13,28	10,82	6,46	-13,42	18,14
C	PRODUK DOMESTIK BRUTO	-	6,17	6,03	5,56	5,01	4,88	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,51

* Angka sementara
** Angka sangat sementara
*** Angka sangat sangat sementara

Tabel 4C Laju Pertumbuhan PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan Kumulatif Tahun 2010 - 2021 (Triwulan III)

(Persen)

KATEGORI	LAPANGAN USAHA		Tahun											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**	2021***
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		-	3,95	4,59	4,20	4,24	3,75	3,37	3,92	3,88	3,61	1,75	1,62
	1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	-	3,47	4,58	3,85	3,85	3,00	3,26	3,62	3,65	3,31	2,11	1,37
		a. Tanaman Pangan	-	-1,00	4,90	1,97	0,06	4,32	2,57	2,31	1,42	-1,73	3,54	-1,53
		b. Tanaman Hortikultura	-	8,77	-2,21	0,67	5,15	2,26	2,93	3,68	6,99	5,53	4,17	-0,40
		c. Tanaman Perkebunan	-	4,94	6,95	6,15	5,94	1,97	3,47	4,50	3,83	4,56	1,33	3,88
		d. Peternakan	-	4,80	4,97	5,08	5,52	3,57	4,45	3,95	4,61	7,78	-0,33	2,46
		e. Jasa Pertanian dan Perburuan	-	3,83	6,07	5,91	2,95	3,76	3,18	4,08	3,11	3,17	1,60	1,81
	2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	-	1,04	0,24	0,61	0,58	1,76	-1,03	2,13	2,78	0,37	-0,03	-4,24
	3	Perikanan	-	7,65	6,29	7,24	7,35	7,89	5,19	5,70	5,19	5,73	0,73	4,23
B	Pertambangan dan Penggalian		-	4,29	3,02	2,53	0,43	-3,42	0,95	0,66	2,16	1,22	-1,95	3,61
	1	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-	-0,13	-3,61	-3,18	-1,97	0,05	2,09	-3,54	-1,40	-2,83	-6,00	-4,76
	2	Pertambangan Batubara dan Lignit	-	23,96	15,73	7,37	1,41	-7,31	-4,14	1,52	4,01	10,20	-5,43	6,59
	3	Pertambangan Bijih Logam	-	-12,66	-3,98	7,63	-0,36	-10,74	1,82	6,55	9,01	-15,15	20,26	22,29
	4	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	-	5,88	6,04	4,61	4,92	1,14	6,36	4,68	2,19	6,18	-1,22	1,22
C	Industri Pengolahan		-	6,26	5,62	4,37	4,64	4,33	4,26	4,29	4,27	3,80	-2,93	2,87

KATEGORI	LAPANGAN USAHA		Tahun											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**	2021***
	1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-0,33	-2,40	-2,64	-2,12	-1,13	2,84	-0,25	-0,01	-1,11	-6,81	-1,89
	Industri Pengolahan Non Migas		-	7,46	6,98	5,45	5,61	5,05	4,43	4,85	4,77	4,34	-2,52	3,37
	1	Industri Makanan dan Minuman	-	10,98	10,33	4,07	9,49	7,54	8,33	9,23	7,91	7,78	1,58	2,97
	2	Industri Pengolahan Tembakau	-	-0,23	8,82	-0,27	8,33	6,24	1,58	-0,64	3,52	3,36	-5,78	-3,68
	3	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	-	6,49	6,04	6,58	1,56	-4,79	-0,09	3,83	8,73	15,35	-8,88	-7,21
	4	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	10,94	-5,43	5,23	5,62	3,97	8,36	2,22	9,42	-0,99	-8,76	7,20
	5	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	-	-2,72	-0,80	6,19	6,12	-1,63	1,74	0,13	0,75	-4,55	-2,16	-5,31
	6	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	-	3,89	-2,89	-0,53	3,58	-0,16	2,61	0,33	1,43	8,86	0,22	-4,02
	7	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	-	8,66	12,78	5,10	4,04	7,61	5,84	4,53	-1,42	8,48	9,39	10,09
	8	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	-	2,08	7,56	-1,86	1,16	5,04	-8,50	2,47	6,92	-5,52	-5,61	4,07
	9	Industri Barang Galian bukan Logam	-	7,78	7,91	3,34	2,41	6,03	5,47	-0,86	2,75	-1,03	-9,13	1,05
	10	Industri Logam Dasar	-	13,56	-1,57	11,63	6,01	6,21	0,99	5,87	8,99	2,83	5,87	11,57

KATEGORI	LAPANGAN USAHA		Tahun											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**	2021***
	11	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	-	8,79	11,64	9,22	2,94	7,83	4,33	2,79	-0,61	-0,51	-5,46	-2,02
	12	Industri Mesin dan Perlengkapan	-	8,53	-1,39	-5,00	8,67	7,58	5,05	5,55	9,49	-4,13	-10,17	11,56
	13	Industri Alat Angkutan	-	6,37	4,26	14,95	4,01	2,40	4,52	3,68	4,24	-3,43	-19,86	16,13
	14	Industri Furnitur	-	9,93	-2,15	3,64	3,60	5,17	0,46	3,65	2,22	8,35	-3,36	7,41
	15	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	-	-1,09	-0,38	-0,70	7,65	4,66	-3,04	-1,68	-0,83	5,17	-0,88	-1,59
D	Pengadaan Listrik dan Gas		-	5,69	10,06	5,23	5,90	0,90	5,39	1,54	5,47	4,04	-2,34	4,76
	1	Ketenagalistrikan	-	7,67	11,74	5,96	6,04	2,29	6,35	2,41	5,25	4,61	-0,98	4,42
	2	Pengadaan Gas dan Produksi Es	-	-2,84	2,05	1,39	5,17	-6,76	-0,43	-4,03	7,00	0,16	-11,94	7,52
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang		-	4,73	3,34	3,32	5,24	7,07	3,60	4,59	5,56	6,83	4,94	5,27
F	Konstruksi		-	9,02	6,56	6,11	6,97	6,36	5,22	6,80	6,09	5,76	-3,26	2,43
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		-	9,66	5,40	4,81	5,18	2,54	4,03	4,46	4,97	4,60	-3,72	4,34
	1	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	-	4,80	6,58	7,30	5,01	0,32	3,97	4,75	4,85	3,72	-14,10	13,17
	2	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	-	10,86	5,13	4,22	5,23	3,07	4,04	4,39	4,99	4,81	-1,30	2,60

KATEGORI	LAPANGAN USAHA		Tahun											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**	2021***
H	Transportasi dan Pergudangan		-	8,31	7,11	6,97	7,36	6,71	7,45	8,49	7,05	6,39	-15,04	1,55
	1	Angkutan Rel	-	-3,23	-4,19	6,14	20,81	4,45	3,46	19,00	10,74	4,49	-42,34	-11,18
	2	Angkutan Darat	-	7,04	7,47	7,51	7,64	6,80	7,05	7,94	7,13	9,96	-5,34	4,87
	3	Angkutan Laut	-	8,41	8,75	6,92	7,68	2,38	1,25	4,64	7,22	10,56	-4,57	3,56
	4	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	-	8,63	2,77	4,55	6,85	1,03	1,46	6,01	5,20	5,58	-13,00	-6,64
	5	Angkutan Udara	-	14,65	7,09	4,75	6,07	10,37	13,22	11,93	6,03	-9,76	-53,01	-17,91
	6	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	-	7,12	6,48	7,98	6,99	6,38	7,51	8,52	7,93	10,34	-17,61	-0,72
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		-	6,86	6,64	6,80	5,77	4,31	5,17	5,41	5,68	5,79	-10,22	3,52
	1	Penyediaan Akomodasi	-	11,24	9,51	9,48	7,81	5,67	5,71	5,14	4,31	1,38	-24,40	0,92
	2	Penyediaan Makan Minum	-	5,91	5,99	6,16	5,27	3,97	5,03	5,48	6,03	6,89	-6,86	4,02
J	Informasi dan Komunikasi		-	10,02	12,28	10,39	10,12	9,70	8,88	9,63	7,02	9,42	10,58	7,01
K	Jasa Keuangan dan Asuransi		-	6,97	9,54	8,76	4,68	8,58	8,93	5,47	4,17	6,61	3,25	3,00
	1	Jasa Perantara Keuangan	-	5,78	10,51	9,66	2,92	9,57	9,82	3,42	2,39	6,14	3,98	5,23
	2	Asuransi dan Dana Pensiun	-	8,54	7,60	7,69	7,94	6,60	6,58	9,33	7,48	5,67	4,01	1,08
	3	Jasa Keuangan Lainnya	-	9,66	8,39	6,44	7,48	7,98	9,29	9,18	7,12	10,63	-0,55	-3,50
	4	Jasa Penunjang Keuangan	-	8,73	8,57	8,35	6,36	4,74	4,76	3,99	2,30	2,08	1,89	5,43
L	Real Estate		-	7,68	7,41	6,54	5,00	4,11	4,69	3,60	3,48	5,76	2,32	2,40
M,N	Jasa Perusahaan		-	9,24	7,44	7,91	9,81	7,69	7,36	8,44	8,64	10,25	-5,44	0,68

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	Tahun											
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**	2021***
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	6,43	2,13	2,56	2,38	4,63	3,20	2,05	6,97	4,65	-0,03	-1,14
P	Jasa Pendidikan	-	6,68	8,22	7,44	5,47	7,33	3,84	3,72	5,36	6,30	2,63	-0,11
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	9,25	7,97	7,96	7,96	6,69	5,16	6,84	7,15	8,69	11,60	9,81
R,S,T,U	Jasa lainnya	-	8,22	5,76	6,40	8,93	8,08	8,01	8,73	8,95	10,57	-4,10	1,69
A	NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR	-	6,87	5,85	5,20	5,00	4,17	4,58	4,77	4,95	4,96	-1,58	2,94
B	PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	-	-19,65	15,05	21,80	5,08	32,55	19,06	13,28	10,82	6,46	-13,42	11,61
C	PRODUK DOMESTIK BRUTO	-	6,17	6,03	5,56	5,01	4,88	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,24

* Angka sementara
** Angka sangat sementara
*** Angka sangat sangat sementara

Tabel 7A Laju Implisit PDB Tahun 2010 - 2021 (Triwulan III)

(Persen)

KATE-GORI	LAPANGAN USAHA		Tahun											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**	2021***
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		-	6,48	4,11	6,19	6,06	6,33	3,98	2,93	2,33	2,21	3,28	1,82
	1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	-	6,65	3,62	6,18	5,47	5,50	3,62	2,65	1,48	1,69	3,59	2,39
		a. Tanaman Pangan	-	8,05	7,53	6,55	3,29	10,98	4,31	0,89	1,00	1,06	2,52	2,27
		b. Tanaman Hortikultura	-	4,34	2,12	9,07	11,16	6,25	4,37	1,56	3,60	3,48	0,67	-0,54
		c. Tanaman Perkebunan	-	7,79	-0,35	4,35	4,96	-0,20	2,25	5,22	-0,07	1,18	6,82	3,66
		d. Peternakan	-	3,22	6,12	7,82	6,95	6,47	4,56	2,25	3,87	2,60	1,64	0,68
		e. Jasa Pertanian dan Perburuan	-	6,45	5,05	4,05	3,81	6,76	4,22	2,76	2,66	2,94	1,36	1,83
	2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	-	5,99	5,59	5,01	6,59	8,41	7,44	2,46	3,44	6,51	4,37	-0,26
	3	Perikanan	-	5,78	6,04	6,62	8,55	9,08	4,37	4,04	5,17	2,85	2,08	0,58
B	Pertambangan dan Penggalian		-	23,48	4,99	2,45	-1,51	-12,17	0,09	14,81	14,00	-5,25	-11,88	17,33
	1	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-	32,27	15,15	8,99	-0,01	-24,61	-7,02	11,18	19,22	-1,69	-19,52	7,54
	2	Pertambangan Batubara dan Lignit	-	26,99	-7,62	-2,85	-9,22	-4,49	5,10	37,48	19,31	-16,58	-18,82	42,19
	3	Pertambangan Bijih Logam	-	9,30	0,71	-9,28	-4,59	-11,12	-3,07	20,77	8,27	2,51	12,47	2,33
	4	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	-	4,11	3,94	5,39	12,00	8,23	7,64	-4,67	0,43	1,83	2,16	0,01
C	Industri Pengolahan		-	6,02	2,67	4,07	6,04	4,08	0,93	3,21	3,17	1,97	1,32	0,47

KATEGORI	LAPANGAN USAHA		Tahun											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**	2021***
	1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	21,90	7,62	8,16	9,64	-3,77	-13,20	8,29	7,42	2,45	-1,96	0,23
	Industri Pengolahan Non Migas		-	3,33	2,01	3,61	5,71	5,65	3,09	2,62	2,70	1,99	1,76	0,56
	1	Industri Makanan dan Minuman	-	2,60	1,10	3,10	4,51	7,06	5,69	3,12	3,00	1,34	2,73	0,04
	2	Industri Pengolahan Tembakau	-	6,91	1,64	4,50	6,81	6,90	6,09	5,07	4,27	3,37	2,35	0,12
	3	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	-	5,49	1,60	4,57	5,37	5,31	3,07	1,01	2,98	2,89	2,40	0,12
	4	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	0,88	4,03	8,72	9,14	5,74	3,36	2,76	3,07	2,90	1,11	0,08
	5	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	-	7,73	2,72	4,00	7,06	4,23	0,92	1,75	1,84	0,53	0,13	0,43
	6	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	-	6,62	0,73	1,42	9,61	4,18	-0,45	7,41	3,83	-0,80	0,39	1,79
	7	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	-	0,39	2,00	4,15	10,19	8,29	0,61	1,14	2,94	2,28	2,00	0,92
	8	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	-	5,65	-1,33	1,95	3,77	1,95	0,58	5,94	0,92	0,49	-0,22	0,70
	9	Industri Barang Galian bukan Logam	-	1,27	5,04	6,56	8,13	2,32	1,28	1,49	1,19	1,25	1,20	0,37
	10	Industri Logam Dasar	-	1,59	4,36	3,37	3,98	3,37	-1,64	4,25	3,35	1,37	-1,57	1,17

KATEGORI	LAPANGAN USAHA		Tahun											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**	2021***
	11	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	-	-0,13	2,76	4,60	3,35	6,13	2,23	1,76	2,53	3,51	0,50	1,45
	12	Industri Mesin dan Perlengkapan	-	-9,37	7,72	8,12	19,35	4,78	2,55	1,63	1,48	2,35	2,43	0,42
	13	Industri Alat Angkutan	-	8,44	3,05	0,79	3,45	3,83	2,64	0,68	1,40	2,48	0,92	0,33
	14	Industri Furnitur	-	-0,35	4,53	6,97	8,87	5,98	2,03	1,66	2,56	2,05	1,94	0,19
	15	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	-	3,80	3,12	4,72	4,59	5,65	3,34	1,85	2,95	3,57	1,24	0,63
D	Pengadaan Listrik dan Gas		-	19,62	-5,26	-1,94	9,94	11,98	4,03	12,32	3,16	0,73	-0,57	0,15
	1	Ketenagalistrikan	-	14,88	-9,85	-4,33	6,73	16,92	5,37	15,12	3,20	0,58	0,04	0,04
	2	Pengadaan Gas dan Produksi Es	-	42,22	15,52	7,66	20,20	1,79	1,68	3,54	2,49	2,74	0,06	0,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang		-	1,37	2,92	5,66	3,35	1,80	0,62	1,29	0,60	0,26	0,33	0,17
F	Konstruksi		-	4,21	6,11	6,04	7,51	6,22	3,96	2,57	4,40	3,00	0,38	1,17
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		-	5,22	1,32	5,69	6,99	5,33	2,56	3,54	4,05	1,96	0,59	1,57
	1	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	-	9,47	2,69	5,53	7,69	6,07	3,34	1,64	3,46	3,85	0,66	0,31
	2	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	-	4,24	0,97	5,69	6,81	5,19	2,36	4,03	4,20	1,51	0,79	1,86

KATEGORI	LAPANGAN USAHA		Tahun											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**	2021***
H	Transportasi dan Pergudangan		-	3,89	5,89	12,04	15,89	16,09	3,77	5,07	1,36	3,86	-7,91	-2,70
	1	Angkutan Rel	-	4,80	20,60	6,39	11,37	48,95	7,56	5,31	3,01	10,61	11,72	-0,55
	2	Angkutan Darat	-	2,10	0,07	11,11	10,33	16,51	0,03	1,06	0,66	0,34	3,01	-0,03
	3	Angkutan Laut	-	2,30	1,62	5,64	11,45	6,43	0,27	0,54	0,21	1,41	0,73	-0,17
	4	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	-	4,41	3,42	9,19	10,13	7,49	-2,00	0,26	1,07	2,90	3,76	0,06
	5	Angkutan Udara	-	7,09	23,51	19,29	31,96	19,65	9,38	10,97	2,83	18,55	-13,26	-0,93
	6	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	-	7,47	8,85	11,05	16,96	11,54	4,07	5,38	1,54	5,76	4,34	0,01
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		-	4,76	5,65	7,31	4,85	1,99	1,07	1,13	0,91	0,83	-0,25	0,02
	1	Penyediaan Akomodasi	-	3,31	13,42	13,59	8,48	2,97	1,20	1,20	0,68	1,33	-0,40	0,43
	2	Penyediaan Makan Minum	-	5,09	3,86	5,62	3,73	1,62	1,00	1,12	1,05	0,91	0,60	0,39
J	Informasi dan Komunikasi		-	0,03	-1,58	-0,79	-1,61	0,18	1,61	4,32	1,67	2,44	0,43	0,09
K	Jasa Keuangan dan Asuransi		-	5,52	8,15	6,17	5,41	4,72	2,83	4,11	3,58	2,19	0,41	1,25
	1	Jasa Perantara Keuangan	-	5,65	10,49	5,76	4,89	3,71	2,46	4,28	3,87	1,66	-0,58	1,98
	2	Asuransi dan Dana Pensiun	-	5,30	4,20	7,13	6,46	6,38	3,60	3,82	3,18	3,04	2,02	0,09
	3	Jasa Keuangan Lainnya	-	5,30	4,30	6,25	6,47	6,39	3,60	3,80	3,21	3,04	2,01	0,09
	4	Jasa Penunjang Keuangan	-	5,30	4,30	7,02	6,47	6,38	1,26	4,16	1,93	2,57	0,43	0,09
L	Real Estate		-	2,51	1,24	4,27	6,16	6,82	2,19	5,27	2,64	2,34	0,92	0,17
M,N	Jasa Perusahaan		-	5,30	4,30	4,92	4,54	6,44	3,60	3,81	3,20	3,33	2,27	0,09

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	Tahun											
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**	2021***
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	10,28	9,42	6,56	6,19	6,14	2,75	2,69	1,41	0,83	1,52	-2,73
P	Jasa Pendidikan	-	8,23	7,35	5,98	5,27	5,65	3,69	3,30	2,26	2,01	2,48	-1,25
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	5,25	4,53	4,06	4,35	5,79	1,97	2,62	1,86	1,70	3,15	0,46
R,S,T,U	Jasa lainnya	-	3,34	2,54	7,59	7,01	7,82	2,71	4,07	3,03	4,05	2,10	0,06
A	NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR	-	7,47	3,75	4,97	5,44	3,98	2,44	4,29	3,82	1,60	-0,46	2,00
B	PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	-	7,47	3,75	4,97	5,44	3,98	2,44	4,29	3,82	1,59	-0,46	2,00
C	PRODUK DOMESTIK BRUTO	-	7,47	3,75	4,97	5,44	3,98	2,44	4,29	3,82	1,60	-0,46	2,00

* Angka sementara
** Angka sangat sementara
*** Angka sangat sangat sementara

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

SEKRETRIAT JENDERAL

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR : SK.3905/MENLHK-SETJEN/DATIN/DTN.1/5/2021
TENTANG
TIM KERJA PENYUSUNAN PRODUK DOMESTIK BRUTO *(PDB)*
***SATELLITE ACCOUNT* SUB KATEGORI KEHUTANAN TAHUN 2015-2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyempurnaan penghitungan kontribusi Subsektor Kehutanan dalam PDB Sub Sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu, sehingga diperoleh penilaian yang lebih proporsional dalam penghitungan PDB Subsektor Kehutanan dari hulu sampai hilir beserta pendistribusiannya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan Penyusunan *Product Domestic Bruto (PDB) Satellite Account* Sub Kategori Kehutanan Tahun 2015-2020;

b. bahwa terhadap pelaksanaan pada poin a tersebut di atas perlu dibentuk Tim Kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Mengingat :

1. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
2. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Memperhatikan : Surat Direktur Neraca Produksi nomor : B-287/BPS/7100/04/2021 tanggal 5 April 2021 tentang Usulan Tim Teknis Penyusunan PDB Satellite Account Sub Kategori kehutanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TIM KERJA PENYUSUNAN *PRODUCT DOMESTIC BRUTO (PDB) SATELLITE ACCOUNT* SUB KATEGORI KEHUTANAN TAHUN 2015-2020;

KESATU	:	Membentuk Tim Kerja Penyusunan *Product Domestic Bruto (PDB) Satellite Account* Sub Kategori Kehutanan Tahun 2015-2020 dengan susunan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan 2 keputusan ini;
KEDUA	:	Masa tugas Tim Kerja berlaku selama 6 bulan, terhitung Bulan April s.d. September 2021;
KETIGA	:	Tim Kerja menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara berkala kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Pusat Data dan Informasi;
KEEMPAT	:	Segala biaya yang timbul akibat terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran (DIPA) BA 029 Kantor Pusat Sekretariat Jenderal, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2021 dan sumber anggaran lainnya yang tidak mengikat;
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal **1 April 2021**, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan diperbaiki seperlunya;

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Mei 2021
a.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL

Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, MM.
NIP 19640930 198903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Wakil Menteri Lingkungan HIdup dan Kehutanan,
2. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Kepala Badan Pusat Statistik;
4. Masing-masing Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR : SK.3905/MENLHK-SETJEN/DATIN/DTN.1/5/2021
TANGGAL : 21 Mei 2021
TENTANG : TIM PENYUSUNAN *PRODUCT DOMESTIC BRUTO (PDB) SATELLITE ACCOUNT* SUB KATEGORI KEHUTANAN TAHUN 2015-2020

A. Pengarah:
   1. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM;
   2. Mohammad Edy Mahmud, S.Si.,MP.;
B. Ketua Tim:
   1. Dr. Ir. Mahfudz, MP.;
   2. Ir. Dody Herlando, M.Econ.;
   3. Purwadi Soeprihanto, S.Hut., ME.
C. Wakil Ketua Tim:
   1. Muhammad Taufiqur Rahman, S.Hut., MSi.
   2. Suryadiningrat, SE., MM.;
D. Sekretariat:
   1. Dedy Lukmansjah, S.Si.
   2. Deden Achmad Sunarjo, S.Si., MM.;
   3. Widdia Angraini, S.Si., MT.;
   4. Ari Sugih Mulia, SE, MSE, MA.;
   5. Bayu Trihapsoro N, SE.;
   6. Trileni Ratna Aprita;
E. Anggota:
   - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
     1. Siswati, S.Hut.;
     2. Drs. Yayat Rukhiyat, SIP.;
     3. Ir. Triyono Saputro, MSi.;
     4. Adhi Suprihadhi, SHut., MSc.;
     5. Dr. Ir. Iwan Setiawan, MSc.;
     6. Yulfikar Tahir Zain, S.Hut.;
     7. Bambang Pancatriono, SKom.;
     8. Tri Adiriono, SHut., MSc;
     9. Iskandar, SHut.;
     10. Juarno;
   - Badan Pusat Statistik (BPS)
     1. Agung Sampurno, SST.;
     2. Fauzul Hidayah, SST.;
     3. Pipit Ronalia, SST.;
     4. Noviana Indriastuti, SAP.;

5. Wisnu Pratiko, SST.;
6. Suryani, SST.;
7. Luthfi Fajar Arifah, S.Tr.Stat.;
8. Ihsan Maulid Rahmawan, S.Tr.Stat.;
9. Windi Agustin Maulina, SST, MSE;
10. Hanaa Prisityowati, SST;
11. Nina Suri Sulistini, MT;
12. Endah Riawati, SST, MM;
13. Nasiyatul Ulfa, SST, MSi;
14. Diana Bhakti, SST, SE, MSi;
15. Riyuniawan Subekti, SST;
16. Suci Wulandari, SST;
17. Erma Novriawati, SST;
18. Rizky Zulkarnain SST, MSi;
19. Nur Indah Kristiani, S.Si., MSE;
20. Akhmad Mun'im, SST, MA;
21. Mella Anisa, SST;
22. Sagap Aliktipo, SE. M.Si;
23. Mudjiono, S.Si. ME.;
24. Wisnu Winardi SST, ME.;

- Asosisai Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)
  1. Dr. David;
  2. Dr. Soewarso;
  3. Dr. Endro Siswoko;
  4. Kusnan Rahim;

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 21 Mei 2021
a.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL

Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, MM.
NIP 19640930 198903 1 001

LAMPIRAN 2. KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NOMOR : SK.3905/MENLHK-SETJEN/DATIN/DTN.1/5/2021
TANGGAL : 21 Mei 2021
TENTANG : RINCIAN TUGAS TIM KERJA PENYUSUNAN *PRODUCT DOMESTIC BRUTO (PDB) SATELLITE ACCOUNT* SUB KATEGORI KEHUTANAN TAHUN 2015-2020

1. PENGARAH
   a. Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan *PDB Satellite Account* Sub Kategori Kehutanan Tahun 2015-2020;
   b. Meminta pertanggungjawaban dari Penanggung Jawab kegiatan penyusunan *PDB Satellite Account* Sub Kategori Kehutanan Tahun 2015-2020;
2. PENANGGUNG JAWAB
   a. Bertanggung jawab terhadap aktifitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Pengolah Data Penyusunan PDB Sub Sektor Kehutanan
   b. Memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim dalam penyusunan *PDB Satellite Account*
   c. Menyampaikan Laporan Hasil pelaksanaan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. KETUA/WAKIL KETUA
   a. Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun
   b. Membantu penanggung jawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Penyusun
   c. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim Penyusun kepada penanggung jawab
4. SEKRETARIS
   a. Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Kerja Penyusunan PDB Satellite Account Sub Kategori Kehutanan Tahun 2015-2020
   b. Membantu penanggung jawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Kerja penyusunan *PDB Satellite Account* Sub Kategori Kehutanan Tahun 2015-2020
   c. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil kegiatan penyusunan *PDB Satellite Account* Sub Kategori Kehutanan Tahun 2015-2020 kepada penanggung jawab
5. ANGGOTA
   a. Merevieu hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan PDB Satellite Account Sub Kategori Kehutanan Tahun 2015-2020;
   b. Melakukan analisis terhadap pencapaian pelaksanaan kegiatan penyusunan PDB Satellite Account Sub Kategori Kehutanan Tahun 2015-2020;
   c. Melakukan telaahan pelaksanaan kegiatan penyusunan PDB Satellite Account Sub Kategori Kehutanan Tahun 2015-2020;

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 21 Mei 2021
a.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL

Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, MM.
NIP 19640930 198903 1 001

KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA